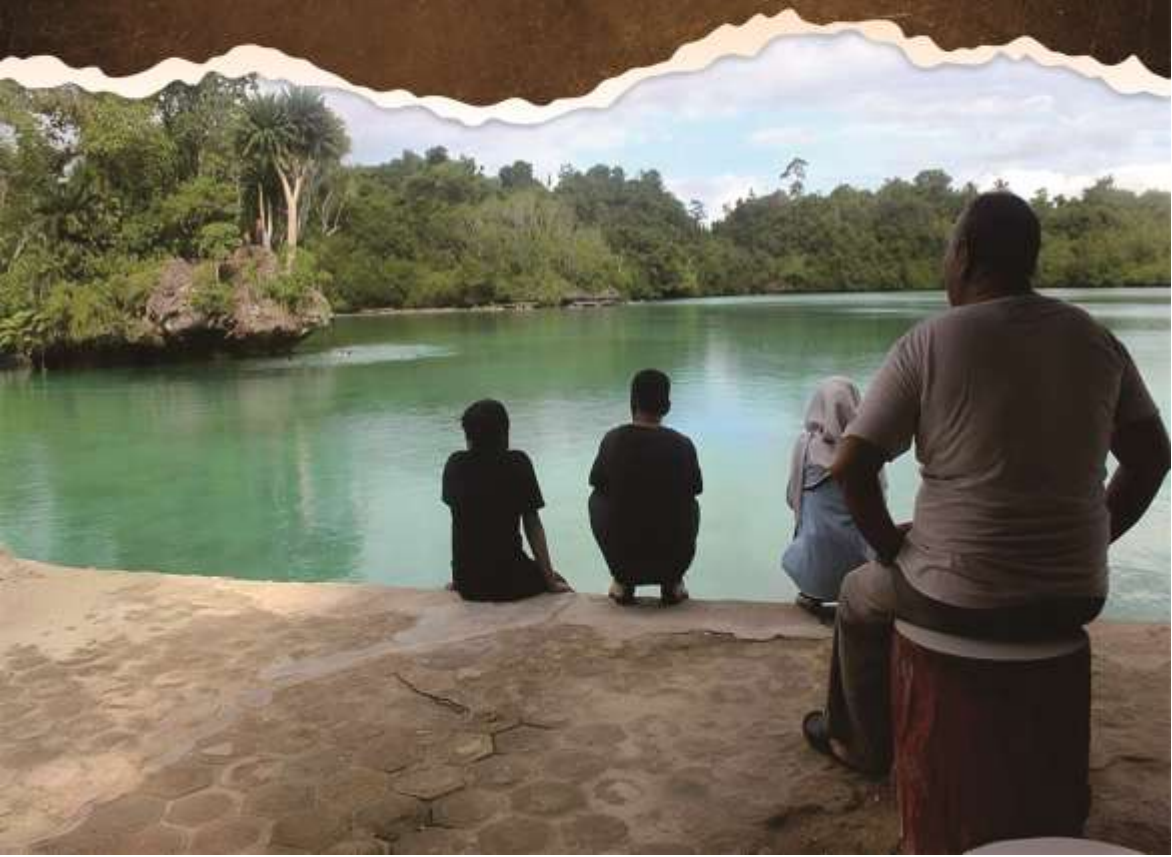




Peribadi
Muhammad Arsyad
Darmin Tuwu
Asriani
Suharty Roslan
Ratna Supiyah

KAPITA SELEKTA PEMISKINAN DAN KEMISKINAN



KAPITA SELEKTA PEMISKINAN DAN KEMISKINAN

PENULIS

**Peribadi
Muhammad Arsyad
Darmin Tuwu
Asriani
Suharty Roslan
Ratna Supiyah**

EDITOR

Prof. Dr. H. Jamaluddin Hos, M.Si.



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KAPITA SELEKTA PEMISKINAN DAN KEMISKINAN

**Peribadi - Muhammad Arsyad
Darmin Tuwu - Asriani
Suharty Roslan - Ratna Supiyah**

EDITOR:
Prof. Dr. H. Jamaluddin Hos, M.Si.

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-7051-43-1

CETAKAN PERTAMA:
Februari 2025

UKURAN:
xi + 140 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

DEDIKASI

Kalau alam pedesaan kita pada masa lalu dilambari dengan bunyi siamang, alunan ombak yang berdenting dan angin sepoi-sepoi yang bertiup demikian indah terasa karena menyatu dengan napas kehidupan sebuah perkampungan. Namun kini, peralatan industri pertambangan nikel dan mobil-mobil raksasa pengangkut tanah nikel yang terus berpacu dengan kecepatan tinggi adalah seolah sebuah balapan mobil yang tengah mengitari ruang sirkuit di tengah hutan belantara.



Kini, bukan hanya potensi Sumber Daya Alam di bawah daratan, di kedalaman lautan dan di tengah hutan belantara yang terus dieksplorasi dan dieksploitasi dengan nafsu angkara murkah. Akan tetapi, sekujur tubuh kaum perempuan dan anak-anak jalanan, para pengemis serta pengguna smartphone pun senantiasa menjadi obyek eksploitasi dari oknum-oknum tertentu yang lihai mengais seonggok materi haram. Tak terkecuali, para petarung Pemilu-kada pun terperangkap dalam rubrik eksploitasi cukong-cukong politik KHAN.....?

PENGANTAR EDITOR

Prof. Dr. Haji Jamaluddin Hos, M.Si

Pemiskinan merupakan sebuah potret fenomena sosial yang paling sadis serta berdampak luas terhadap individu, keluarga, komunitas, dan bahkan kepada bangsa dan negara. Ketimpangan struktural, ketimpangan kultural dan ketimpangan agraris serta kesenjangan sosial sebagai dampak dari proses pemiskinan, tampak nyata merusak tatanan kehidupan sosial yang sehat dan berkelanjutan. Sementara di tengah dinamika global yang kian melejit, masalah kemiskinan terus menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di negara maju maupun negara berkembang. Karena itulah, maka sangat penting sebagaimana disentil dalam buku ini, untuk menelaah secara lebih kritis atas problematika pemiskinan dan implikasi sosialnya terhadap kemiskinan itu sendiri.

Tampaknya, buku “Kapita Selekta Pemiskinan dan Kemiskinan” ini merupakan kumpulan tesis menyoal problematika sosial secara mendalam dari berbagai sudut pandang atas potret dinamika kehidupan masyarakat kontemporer. Di dalamnya tidak hanya menyajikan narasi yang realistis, tetapi juga mengusung pendekatan kritis yang mencerminkan keprihatinan yang mendalam terhadap gejala demokratisasi, pengrusakan ekosistem dan berbagai jenis ketimpangan sosial lainnya. Betapa penulis dengan cermat

menghadirkan refleksi kritis bernuansa multidimensional yang mampu menggugah pembaca untuk memaknai ulang realitas kehidupan masyarakat, kontemporer di berbagai wilayah perkampungan anak manusia dan makhluk hidup lainnya.

Betapa tidak, di awal pembahasan penulis menampilkan realitas “drama pemiskinan” yang menunjukkan kaum marginal seperti wong cilik menjadi korban eksploitasi struktural. Pemiskinan bukan semata-mata akibat kemalasan individu, melainkan buah dari dominasi sistem kapitalistik yang tak kenal lelah terus menguntungkan segelintir elit. Dalam konteks ini, penulis mencoba menggambarkan secara gamblang atas ketimpangan sosial antara kelompok miskin yang terpinggirkan dengan segelintir orang berbalut kemewahan. Tentu saja narasi ini membuka mata pembaca terhadap realitas bahwa kemiskinan sering kali merupakan hasil dari proses sosial yang tidak adil alias “bencana pemiskinan”.

Sedangkan pada pembahasan kedua adalah menyoal potret fenomenal degenerasi petani yang bersumber dari hasil penelitian empirik yang kini mulai sangat memprihatinkan. Penulis menyoroti rendahnya minat generasi muda untuk melanjutkan profesi sebagai petani yang kemudian berimplikasi pada krisis regenerasi di sektor pertanian. Padahal, dengan modernisasi dan teknologi, profesi petani memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan bahkan bisa menjadi kebanggaan sosial. Pesan ini menjadi refleksi mendalam tentang pentingnya

revitalisasi sektor agraria sebagai basis pembangunan masyarakat.

Sementara pada pembahasan ketiga adalah berupaya mengupas dan menguliti habis-habisan fenomena “amplopisme dan uangisme” yang berlangsung di arena Pemilukada. Betapa demikian memperlihatkan wajah suram pesta demokrasi dengan berbagai problematika sosial politiknya. Praktek politik uang yang demikian marak menggelegar di gelanggang politik pemilihan kepala daerah, adalah tidak hanya menunjukkan signifikansinya dengan tingkat kemiskinan pemilih, tetapi dengan sangat transparan menunjukkan bahwa gejala demokratisasi masih terdistorsi oleh logika materialistik dan hedonistik serta pragmatisme dan utilitarianisme. Penulis secara tajam mengaitkan fenomena ini dengan kualitas kepemimpinan yang terpilih, sehingga mengajak pembaca untuk merefleksikan dampaknya terhadap masa depan politik bangsa.

Sehubungan dengan itu, isu eksistensi perempuan miskin dan lemah yang masih dikotakkan dalam ruang domestik, juga mendapat ulasan khusus dalam buku ini sebagai hasil kajian fakta empiris, sehingga benar-benar perspektif kapita selektanya amat sangat terasa. Telaah penulis tentang peran perempuan dalam ranah produktif menjadi seruan kuat untuk menghapus stigma dan membuka akses yang lebih luas bagi perempuan di ruang publik. Hal ini sejalan dengan semangat kesetaraan gender dan inklusivitas dalam pembangunan sosial. Kemudian buku ini juga tidak melupakan aspek kelembagaan, dengan menyoroti

keberadaan Persaudaraan Madani sebagai model pemberdayaan masyarakat yang layak dipelajari. Demikian pula potret Musrenbang sebagai mekanisme “demokrasi deliberatif” juga menjadi pembelajaran penting dalam mengedepankan partisipasi publik dan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan.

Pada akhirnya, isu lingkungan merupakan epilog yang tajam dan terang benderang, karena penulis mengingatkan urgensi konservasi sistemik untuk menyelamatkan ekosistem dari ancaman eksploitasi tambang yang tampak demikian serakah belakangan ini. Seruan ini menjadi refleksi tentang perlunya harmoni antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun tesis yang tertuang dalam buku ini belum holistik sepenuhnya dalam menggambarkan aneka bentuk problematika sosial, namun sesungguhnya sudah menawarkan kontribusi yang sangat penting, sehingga sebagai pribadi saya memberikan apresiasi atas pemikiran para penulis yang tertuang dalam buku ini.

Kendari, Pebruari 2025

PENGANTAR PENULIS

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka (QS Āli ‘Imrān: 190-191).

Substansi kajian yang tertuang dalam buku “Kapita Selekta Pemiskinan dan Kemiskinan” ini adalah menggambarkan aneka problematika sosial dari berbagai sudut pandang. *Petama*, kajian diawali dengan narasi kehidupan di balik stamina *wong cilik* yang hampir pupus, namun terpampang gaya khas kehidupan penuh kemewahan dan serba lux pada segelintir orang yang bernasib mujur, atau mungkin juga diuntungkan oleh “drama pemiskinan”. Lebih celaka lagi, karena mereka tertuding pemalas, sehingga menjadi miskin. Padahal, mereka miskin karena faktor dominasi ”dramaturgis” di balik perilaku sandiwara kaum proyektor dan koruptor. Betapa terang benderang ”wong cilik” menjadi obyek eksploitasi dalam rangka menumbuhkembangkan kejantanan libido kapital, sehingga ”investasi haram” yang memiskinkan terus menggelembung di gelanggang kehidupan sosial.

Kedua, potret fenomenal proses degenerasi yang berlangsung di arena kehidupan anak manusia tani. Betapa suram potret regenerasi petani muda yang tampak dengan kualitas sangat minim. Tak pelak lagi, potret fenomenal minat generasi muda untuk menjadi petani yang demikian sangat rendah, sehingga gejala proses degenerasi manusia semakin melejit dan terang benderang. Padahal, dengan proses pengelolaan lahan pertanian melalui upaya pemanfaatan teknologi modern, maka menjadi petani tidak hanya dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan, tetapi juga menjadi sebuah kebanggaan sosial yang khas spektakuler.

Ketiga, potret ketimpangan sosial politik yang terpampang di gelanggang Pemilu adalah tak ubahnya seonggok materi yang meninabobokkan pemilih. Betapa tidak, ampolvisme berupa uang tunai menjadi daya tarik utama bagi sebagian besar pemilih, terutama di daerah pedesaan atau kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Betapa kandidat yang memiliki modal besar memanfaatkan situasi ini untuk meraih simpati pemilih dengan memberikan uang tunai sebagai bentuk “bantuan”. Sementara pemilih menganggap uang haram itu sebagai keuntungan langsung, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan di masa depan.

Keempat, eksistensi perempuan terus dikonotasikan sebagai manusia pekerja domestik (*homemaker*) yang dinilai tidak dapat berkontribusi secara aktif di luar rumah, sehingga banyak posisi strategis yang aksesnya tertutup bagi mereka.

Pasalnya, perempuan dianggap tidak pantas memimpin dalam pekerjaan karena dinilai sebagai makhluk yang terlalu menggunakan perasaan dan sulit mengambil keputusan dengan bijak. Lebih dari itu, kaum perempuan senantiasa dikaitkan dengan beberapa kata, “sumur, dapur, kasur” yang hingga kini digugat eksistensinya. Dalam konteks inilah, penulis dipembahasan keempat mengembangkan telaah kritis sebagai refleksi empirik yang menunjukkan peran penting kaum perempuan di ranah produktif.

Kelima, urgensi keberadaan sebuah lembaga dan pranata sosial ekonomi yang dikendalikan oleh sebuah pemerintahan daerah dalam rangka menumbuhkembangkan serta mensejahterakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui sebuah strategi pemberdayaan. Dalam konteks ini, adalah sebuah potret sosial atas keberadaan Persaudaraan Madani yang pernah menggelegar pada wilayah Pemerintahan Kota Kendari di bawah kendali “Asrun Musaddar” ketika itu. Betapa cukup ibrah atau pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan dan pergerakan kelembagaan itu.

Keenam, potret revitalisasi pranata dan sekaligus menunjukkan potret sosial Musyawarah Penyelenggaraan Pembangunan yang terkenal dengan istilah Musrenbang yang berlangsung di semua wilayah pedesaan yang menggebrak dari tingkat pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Betapa tidak, poses “demokrasi deliberatif” sebagai upaya peralihah teori perencanaan dari pola instrumental rasionalitas ke strategi

komunikasi rasional, maka sudah saatnya kearifan lokal dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Ketujuh, urgensi penyelamatan ekosistem dan lingkungan sosial sebagai akibat dari prahara pertambangan yang menunjukkan potret sosial “kanibalisme modern” dalam mengedepankan eksploitasi dan eksplorasi di berbagai ruang kehidupan anak manusia dan makhluk hidup lainnya dengan debu mesin penghancur ekosistem. Maka sudah saatnya upaya penyelamatan dan pemulihan serta pemeliharaan alam dengan memaksimalkan gerakan “konservasi sistemik” upaya peremajaan dikedepankan.

Atas dasar inilah, maka besar harapan agar buku potret kapita selekta ini dapat memberi kontribusi telaah kritisisme yang komprehensif kepada pembaca, terutama bagi mereka yang *concern* mendalami kajian potret sosial aneka kehidupan anak manusia perdesaan dan perkotaan dengan berbagai problematikanya. Tentu saja bagi mahasiswa atau bagi siapapun yang mendalami kajian sosiologi perdesaan, sosiologi agraria, antropologi pedesaan dan dinamika sosial, kian mendapatkan pemahaman substantif. Semoga buku ini dapat menjadi sumber bacaan yang mencerdaskan dan mencerahkan.

Kendari, Pebruari 2025

Peribadi, dkk.

DAFTAR ISI

DEDIKASI.....	i
PENGANTAR EDITOR.....	ii
PENGANTAR PENULIS.....	vi
 BAGIAN PERTAMA: POTRET PEMISKINAN DAN KEMISKINAN	 1
Peribadi dan Suharty Roslan	
 BAGIAN KEDUA: POTRET FENOMENAL DEGENERASI MANUSIA TANI	 12
Peribadi dan Ratna Supiyah	
 BAGIAN KETIGA: ANTARA KEBUTUHAN EKONOMI DAN PILIHAN POLITIK DI ARENA PEMILUKADA	 36
Asriani	
 BAGIAN KEEMPAT: PERAN PEKERJA PEREMPUAN DALAM MEMENUHI EKONOMI KELUARGA: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik	 46
Darmin Tuwu	
 BAGIAN KELIMA: PERSAUDARAAN MADANI DAN PRONANGKIS.....	 68
Peribadi	
 BAGIAN KEENAM: REVITALISASI PRANATA SOSIAL DAN KEMISKINAN PETANI.....	 87
Peribadi	
 BAGIAN KETUJUH: URGENSI PENYELAMATAN EKOSISTEM DAN LINGKUNGAN SOSIAL: Sebuah Epilog	 101
Muhammad Arsyad	

SEKILAS TENTANG PENULIS	132
--------------------------------------	------------

BAGIAN PERTAMA: POTRET PEMISKINAN DAN KEMISKINAN

Peribadi dan Suharty Roslan

Tampaknya kini, kanibalisme modern itu telah bergentayangan mengedepankan eksploitasi di berbagai ruang kehidupan anak manusia dan mahluk hidup lainnya dengan deru debu mesin Politik Perusak Demokrasi dan penghancur ekosistem.

Prolog. Dunia, adalah mungkin saja bagai neraka bagi penghuninya, ketika hidup tanpa apa-apa, tanpa sarana dan tanpa fasilitas yang serba mewah serta tanpa sembah sujud dari kaum avonturism. Itulah mungkin, sehingga banyak orang cenderung menghalalkan berbagai macam cara demi segudang materi Karena selain pemiliknya hidup senang tak kekurangan sesuatu apapun, juga bisa membuat banyak orang takluk dan bertekut lutut kepadanya.

Betapa sulitnya menjalani hidup dan kehidupan di tengah masyarakat kontemporer yang telah terlanjur mendeklarasikan materi sebagai falsafah kunci kebahagiaannya. Sehingga, hampir tak berguna rasanya sebuah kendaraan roda dua yang tak berasap, jika pemiliknya hidup berdampingan dengan pemilik sepeda motor yang berasap. Betapa tidak bernyalinya sang pemilik sepeda motor, jika bertetangga dengan pemilik roda empat, dan betapa malu-malunya pemilik kendaraan roda empat yang harganya menengah ke bawah jika bertemu dengan pemilik roda empat yang 2 M misalnya.

Sungguh demikian sadis kehidupan sosial ekonomi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Tak pelak lagi, bagi mereka yang kategori warga komunitas "wong cilik". Demi

sesuap nasi, spontanitas mereka berbondong-bondong mendekati sang dermawan yang berniat memberinya zakat, infaq dan sadaqah. Meskipun harus berujung maut seperti yang pernah terjadi di Pasuruan Jatim. Demikian mungkin konsekuensi logis dari sebuah kenyataan pahit dan potret buram yang terus menggeliat di tengah gubuk derita kaum papa yang berkubang derita hidup penuh nestapa.

Sementara itu, gebyar gonta-ganti program penanggulangan kemiskinan terus digelontorkan oleh Pemerintah serta aneka ragam model pemberdayaan yang disodorkan lembaga NGO yang concern dengan pemberdayaan. Mungkin saja, jika diibaratkan dengan sebuah “lagu bernada sedih” yang kemudian didendankan dengan merdu oleh sang pedangdut. Maka pendengar pun terbuai, hingga dana mengucur deras dari kantong-kantong mereka yang nota bene berlebihan. Namun jika diandaikan dengan sebuah “sinetron bersambung”, maka kita pun seolah terus menyaksikan “adegan adegan kemanusiaan” yang setiap episode pun silih berganti sang aktor dan aktris tampil spektakuler menghipnotis penontonnya. Entah dimana dan kapan endingnya? Nantilah sejarah yang memberinya catatan pinggir atas episode demi episode.

Apa tidak lucu menyoal proses penanggulangan kemiskinan yang menggeliat di tengah eskalasi drama pemiskinan yang kini aktor-aktrisnya mulai ditelanjangi di ruang pesakitan Tipikor? Betapa tidak, bantuan ke-haribaan “warga komunitas miskin” tertumpah bagai air bah ke bumi persada. Namun “drama pemiskinan” di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan BUMN, bersenandung sejak Orba hingga sukses gemilang meraih “prestise negara terkorup”. Jika demikian, bukankah ketika kita menumbuh kembangkan bedah kemiskinan serta upaya-upaya penanggulangan dengan gaya khas gonta-ganti paradigma dan metodologis, adalah bagian integral dari “geliat sandiwara” yang tampak signifikan dengan “eskalasi drama pemiskinan dimaksud?

Quo Vadis Pemiskinan. Betapa derasnya air mata mereka di tengah multi krisis yang tak berujung pangkal, terutama ketika harga sembako melambung tinggi dalam sebuah balapan harga yang tak kenal pilih kasih. Namun celaka "dua belas", karena di balik stamina kehidupan wong cilik hampir pupus, terpampang gaya khas kehidupan penuh kemewahan dan serba lux pada segelintir orang yang bernasib mujur, atau mungkin juga diuntungkan oleh "drama pemiskinan". Lebih celaka lagi, karena mereka tertuding pemalas, sehingga menjadi miskin. Padahal, mereka miskin karena faktor dominasi "dramaturgis" di balik perilaku sandiwara kaum proyektor. Betapa tidak, mereka yang biasa diklaim "wong licik"—meminjam istilah mantan Pak Ketua MPR, justru kondisi rentan dan kebablasan kerap kali menjadi momentum strategis untuk menumbuhkembangkan kejantanan libido kapital, sehingga "investasi haram" terus menggelembung. Dalam konteks ini, misalnya: "penimbunan kebutuhan pokok sehari-hari yang acapkali dilakoni oleh kaum saudagar, keengganan membayar royalti dan pajak yang acapkali dipentaskan oleh kaum pseedou kapitalism, dan prahara konvensional sang birokrat karena malu kucing digelar sebagai pelayan rakyat". Adalah sebuah gap sosiologis yang demikian menganga lebar antara gelagat kehidupan "top class dan lower class", jaraknya seolah antara langit dan bumi. Sehingga kehidupan kaum elite dalam suasana adem ayem dan tak kurang sesuatu apapun untuk selamanya (mungkin sampai 7 turunan).

Sebaliknya, huru hara perut plus biaya pengobatan dan pencerdasan anak-anak terus menggeleгар seakan tak pernah lelah menggeliat di gubuk derita. Betulkah plesetan kaum sastraawan: "Kaum elite terbahak-bahak sembari berselingkuh di atas kucuran keringat dan darah rakyat jelata; Mereka bagai lalat bertebaran dan berterbangan di atas bangkai dan tulang belulang yang membusuk." Namun ketika alam mungkir dari garis in line (gempah bumi misalnya), maka mereka pun bertakbir,

bertahmid dan bertahlil. Jika demikian, jadilah pejabat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang amanah; Ingatlah Tuhan dalam seluruh dimensi 5 waktu dan jangan hanya memohon pertolongan-Nya ketika di pesawat mendadak trouble (Peribadi, 2018; Peribadi, dkk., 2022).

Amoralisasi Pemiskinan. Mungkin masih segar dalam ingatan kita tentang ”zakat maut” yang pernah terjadi sekitar 20an tahun lalu di Pasuruan Jatim. Ketika itu peristiwa ini dipertontokan oleh semua media, sehingga hampir semua orang mempergunjingkannya. Tak terkecuali Presiden dan para anggota Kabinetnya menunjukkan wajah-wajah senduh sebagai ekspresi rasa ibah, duka, nestapa dan belasungkawa atas malapetaka yang menimpah saudara-saudaranya di seberang lautan nan jauh di sana. Demikian pula pada beberapa kasus lain sejenis dengan antrian zakat maut dimaksud, sudah pasti menggugah perasaan dan mengundang keprihatinan kita sebagai sebangsa dan setanah air yang aneka raga kekayaan alam terkandung di dalamnya.

Tak pelak lagi, bagi mereka yang merasa senasib (meski tidak sepenanggungan) sebagai warga komunitas yang acapkali disimbolkan: ”wong cilik, kelas inferior dan kaum proletariat”, maka mungkin saja mereka tidak hanya meneteskan air mata. Akan tetapi, mungkin juga mereka cemas atau was-was bahwa ”pada suatu saat kita pun mengalami nasib yang sama” (Peribadi, 2018; Peribadi, dkk., 2022). Pasalnya, perampokan agraris yang lazimnya menggunakan istilah ”tambang illegal” tampak menggelejar di mana-mana dan ke mana-mana. Sungguh terasa amat sangat pedih ketika menyoal rentetan perampasan tanah rakyat dan tanah adat serta kebun-kebun rakyat di sekitar wilayah pertambangan.

Pertama, ada sekitar 301 kasus perampasan tanah adat terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Kasus perampasan tanah adat tersebut kebanyakan dilakukan oleh perusahaan tambang nikel yang terus

berlangsung di sekitar wilayah Flores, Halmahera dan paling banyak terjadi di wilayah Kalimantan dan pulau Sulawesi, termasuk di Sulawesi Tenggara. Adapun total luas lahan tanah adat yang dirampas mencapai sekitar 8,5 juta hectare dan terdapat sebanyak 672 masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi karena mempertahankan haknya¹.

Kedua, betapa cita-cita konstitusionalisme agraria telah dikhianati oleh pemerintah Orde Baru hingga pada kurun waktu pemerintahan di bawah panji-panji reformasi kini. Akibatnya, konflik agraria semakin menggurita di seluruh pelosok negeri. Dalam kurun waktu 17 tahun terakhir, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat konflik agraria struktural mencapai sebanyak 4.009 konflik dan seluas **11,4** juta hektar, serta berdampak pada **2,4** juta orang (KPA, 2022). Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menampilkan bahwa wilayah Adat seluas 3,1 juta hektar yang dirampas oleh Pemerintah dan Perusahaan melalui berbagai perizinan berupa izin HTI, HA, Tambang dan Perkebunan (AMAN, 2021). Padahal, penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural ini merupakan salah satu tahapan penting Reforma Agraria. Akibat dari penyelesaian konflik agraria yang represif yang melibatkan peralatan di lapangan, maka kekerasan agraria sering terjadi. Sedikitnya 2.964 petani, masyarakat adat dan aktivis agraria dikriminalisasi karena mempertahankan konstitusionalitasnya atas tanah. Sementara itu, korupsi agraria juga semakin menjamur di Indonesia dan pemerintah terkesan membiarkan adanya tumpang tindih perkebunan. Karena itu, klaim kawasan hutan dan pertambangan dalam satu lokasi, merupakan indikasi kuat terjadinya korupsi agraria di kawasan bisnis perkebunan dan tukar-guling kawasan hutan².

Ketiga, konflik agraria di Indonesia tahun 2023 telah menyebabkan 241 letusan konflik, sehingga merampas seluas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608 KK. Sebanyak 110 letusan konflik

telah mengorbankan 608 pejuang hak atas tanah sebagai akibat dari pendekatan represif di wilayah konflik agraria. Angka ini berada pada urutan teratas dari enam negara Asia lainnya, yakni India, Kamboja, Filipina, Bangladesh dan Nepal. Sedangkan angka di Indonesia mencapai 74% dari total insiden, 94% dari total korban individu dan 84% dari total rumah tangga yang terdampak. Dalam konteks ini, Marianne mengingatkan bahwa banyak konflik agraria yang tidak terdokumentasi atau dilaporkan, sehingga datanya lebih bersifat indikatif. Angka ini belum mencakup penderitaan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak sebagai dampak lanjutan dari pelanggaran yang terjadi, seperti penggusuran, pengrusakan terhadap rumah, pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tingginya konflik agraria Indonesia di enam negara tersebut juga linier dengan tingginya aduan masyarakat tentang konflik pertanahan yang masuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terima sepanjang tahun lalu³.

Keempat, tampaknya oligarki merupakan sekelompok orang yang mempunyai kuasa untuk mengendalikan negara dengan cara memproduksi aturan hukum yang hanya mengakomodir kepentingan kelompoknya sendiri dan mengorbankan hak-hak rakyat. Oligarki sudah masuk ke dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan dan bahkan dapat dibuktikan dengan produk-produk hukum yang diproduksi oleh negara yang begitu amat terasa menguntungkan segelintir orang. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang mendapatkan banyak penolakan dari kaum buruh, petani, perempuan, dan masyarakat adat justru dikebut oleh Pemerintah. Tampaknya, bukan hanya UU Cipta Kerja, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional juga menjadi peraturan yang mengancam hak-hak dasar warga negara yang melalui PP No. 42 Tahun 2021, sehingga Proyek Strategis

Nasional yang mempunyai tujuan untuk penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, justru berbalik Haluan menjadi 360 derajat. Salah satu contoh kasus dalam konteks ini adalah perampasan lahan yang terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Masyarakat Wadas yang menolak pertambangan batuan andesit untuk suplai material batuan Bendungan Bener justru dipaksa oleh negara dengan dalih Proyek Strategis Nasional yang menurut pandangan pemerintah akan melahirkan kesejahteraan⁴.

Kelima, sumber kredibel Amnesty di LBH Pekanbaru dan Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang mengungkapkan bahwa masyarakat Pulau Rempang diintimidasi dan menjadi korban tindak kekerasan oleh belasan orang berpakaian preman dan berdasarkan keterangan yang dihimpun oleh Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang dari warga, intimidasi dan kekerasan yang dialami warga Pulau Rempang terjadi di administrasi Kampung Sungai Bulu, tepatnya di jalan arah masuk ke kawasan Goba. Kejadian bermula saat para warga tengah berjaga di masjid di jalan masuk ke Goba. Di sana mereka didatangi oleh belasan orang berpakaian preman dan kelompok orang berpakaian preman itu kemudian memaksa masuk ke wilayah yang dijaga warga dan mengklaim bahwa kawasan tersebut adalah wilayah kerja mereka. Namun warga tetap bertahan dan berjaga, sehingga akhirnya mengalami intimidasi dan kekerasan. Sebelum insiden di Rempang tersebut, Amnesty International Indonesia mencatat, dari Januari 2019 hingga Maret 2024, setidaknya ada delapan kasus serangan terhadap masyarakat adat dengan sedikitnya 90 korban, termasuk kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan fisik⁵.

Kelaparan Di Tengah Kekenyanan. Betapa mudahnya hidup dan kehidupan di masa lalu ketika dewa material belum tampil menguasai benak dan nurani anak manusia. Suasana kehidupan yang merata tanpa perbedaan

kelas, dan apalagi tanpa kesenjangan yang menganga lebar. Dan tanpa lilitan setan masyarakat kontemporer, sehingga tak ada beban materil dan moril dengan orang lain yang hidup di sekitarnya. Kecuali mungkin satu hal, yakni kita malu jika tidak berbuat baik, kita mungkin juga malu kalau tidak shalat dan lebih malu lagi jika menunjukkan perilaku brutal. Sementara kini, kita seolah ”malu memiliki rasa malu”. Dalam konteks ini, salah satu status Fb penulis yang pernah terposting: “potret masyarakat dunia pada gelombang peradaban ketiga, hampir saja semuanya Alvin Toffler sudah meramalkannya. Mulai dari gaya khas manusia paranoid, sensitif, marah, berang, dungu, kehilangan akal sehat dan gampang terprovokasi dan mengamuk.

Akan tetapi, satu hal yg mungkin saja tak sempat dibayangkan oleh Toffler adalah potret koruptor yang malu memiliki rasa malu kawan”. Kalau pola pikir seperti ini yang terbayangkan, maka akan terasa sekali betapa pedisnya kehidupan kini dan betapa indahnya kehidupan masa lalu. Ketika kita coba membayangkan kehidupan masa lalu, rasanya kebahagiaan penghuninya seolah mampir sejenak di benak dan di hati orang yang membayangkannya. Karena itu, betapa salahnya orang-orang yang berpikir dan berkata bahwa kehidupan masa lalu adalah susah serta penuh penderitaan. Mungkin saja benar, namun kehidupan kini adalah puncak dari segala penderitaan dan kemalaratan. Betap tidak, kita miskin di atas ibu pertiwi yang kaya raya potensi SDA. Lebih celaka lagi, karena banyak orang lapar di tengah perilaku perampokan harta karun negara dan uang rakyat. Lapar dalam suasana banyak orang lapar atau lapar kolektif, tentu sakit juga. Akan tetapi, pasti jauh berbeda jika seseorang lapar di tengah banyak orang kenyang (Peribadi, 2018; Peribadi, dkk., 2022).

Adalah kian marak, ketika analogi drama dan teater dari Goffman sang ahli sosiologi kontemporer kita coba pinjam pisaunya untuk membedah proses interaksi sosial yang mampu

menghipnotis penonton. Kian menakjubkan jika sang aktor dan aktris perampokan tersebut dibedah dari sudut pandang Tri Tunggal dimaksud Ali Shariaty. Dan mungkin saja kepala kita kian kencang tergeleng-geleng ketika kerangka konseptual ini direfleksikan ke arena birokrasi dan parlement, dll. Pasti dech..., di balik interaksi itu akan ditemukan segumpal kesadaran virtual di lorong-lorong psedou-liberalis, psedou-demokrasi, dan psedou welfare, dll (Peribadi, 2023).

Epilog. Paling tidak, ada dua kesulitan dalam menguraikan keberadaan kaum papa di bangsa ini. Pertama, aneka macam potret anak-anak bangsa yang seringkali tampil menyimbolkan diri sebagai bagian integral dari orang-orang yang bertubuh miskin. Kedua, sinyalemen keserakahan orang papa, agakny sedikit mengherankan, karena biasanya yang terlanjur diklaim orang serakah adalah orang-orang yang empunya (*the have*). Namun tak apalah kita merujuk saja pada asumsi umum bahwa kaum papa adalah kumpulan orang marjinal yang butuh uluran tangan yang secara formal layak memperoleh bantuan sejenis IDT dan JPS di kurun waktu Orba serta sejenis Bantuan langsung Tunai (BLT), beras miskin (Raskin), kompensasi BBM, dan bantuan eksodus di zaman reformasi kini. Oleh karena selama ini, bantuan yang disuguhkan tidak bersifat antibiotik, sehingga pada gilirannya tercipta ketergantungan, dan boleh jadi juga membuahakan keserakahan bagi orang-orang yang cekatan menggunakan “kesempatan dalam kesempitan”.

Karena itu, berilah mereka pancing dan kampak untuk digunakan mengait ikan dan memotong kayu bakar. Bagi pekerja informal misalnya, maka beri dan siapkanlah tempat, legalitas, modal dan sarana pasar yang strategis. Bagi petani, siapkan lahan paling kurang 5 Ha masing-masing perorang dan berilah kemudahan memperoleh bibit unggul, pupuk, dan termasuk bantuan pemasaran dan jaminan stabilitas harga. Jika memungkinkan, maka perlu dibebaskan dari pajak dan beban

biaya pendidikan wajib belajar 9 tahun serta biaya pengobatan. Persoalannya, jika sebatas hanya menyenangkan sesaat, maka bukan saja kita khawatir akan muncul keserakahan khas bagi kaum papa (*the have not*) sebagaimana yang pada umumnya menandai karakter kaum empunya (*the have*). Akan tetapi, kita pun kian cemas akan menambah keserakahan orang-orang yang memang sudah serakah, sehingga menjelmah menjadi keserakahan plus. Betapa tidak, sudah menjadi pemandangan biasa dan bahkan hampir terkesan tidak haram lagi mengambil keuntungan dari berbagai jenis bantuan orang sekarat yang pernah berjejal. Ironisnya, bukan hanya pengurus lembaga yang concern dengan bantuan kemanusiaan yang kemudian menjadi terkerangkeng di balik terali besi.

Akhirnya, beberapa messages singkat yang tersenandung serta kepingin dilayangkan kepada publik. Pertama, Ibu Pertiwi yang mengandung intan dan berlian (Baca: SDA) yang segudang adalah tidak mungkin penghuninya berkubang kemiskinan seperti saat ini. Kedua, jika ada bangsa dan negara yang aneka ragam kekayaan alam terkandung di dalamnya, tetapi sekonyong konyong penghuninya menjadi miskin. Maka berarti, ada yang tidak beres dalam prosesing dan manajemen harta karung negara. Paling tidak, salah urus atau kelewat banyak menetes di lembah siluman. Ketiga, patut dicamkan bahwa perlindungan dari segala bentuk penjajahan manusia atas manusia merupakan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, UUD 1945 menjamin hak-hak konstitusional rakyat Indonesia atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan bukan hanya untuk segelintir orang atau kelompok.

BIBLIOGRAFI

- Peribadi, (2018). Kapita Selekta: Dinamika Sosial, Mitra Cendikia Media, Sumatera Barat.
- Peribadi, dkk., (2022). Pemiskinan dan Kemiskinan: Sebuah Perspektif Fenomenologi, CV. Literasi Indonesia, Kendari.
- Peribadi, 2023. Resolusi Pemiskinan Berbasis IESQ Power, CV. Sketsa Media Anggota IKAPI, Purbalingga, Jawa Tengah

Sumber Internet-

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6867939/perampasan-tanah-adat-masih-marak-301-kasus-mayoritas-di-sulawesi-kalimantan>
2. <https://www.walhi.or.id/tegakkan-konstitusionalisme-agraria-untuk-kedaulatan-dan-keselamatan-rakyat-hentikan-perampasan-tanah-jalankan-reforma-agraria-sejati>
3. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perampasan-tanah-rakyat-melalui-peraturan-hukum-yang-timpang-lt6257861f6e0fd/>
4. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perampasan-tanah-rakyat-melalui-peraturan-hukum-yang-timpang-lt6257861f6e0fd/>
5. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-intimidasi-masyarakat-rempang-dan-stop-psn-rempang-eco-city/09/2024/>

BAGIAN KEDUA:

POTRET FENOMENAL

DEGENERASI MANUSIA TANI

Peribadi dan Ratna Supiyah

Revolusi pertanian sebagai gelombang pertama telah berlangsung selama ribuan tahun lamanya dan gelombang kedua sebagai fase peradaban industri berlangsung dalam kurun waktu 300 tahun lamanya. Sedangkan gelombang ketiga yang tampak sukses gemilang menyapu bersih peradaban-peradaban sebelumnya, telah berkembang pesat dan kini telah melahirkan sebuah peradaban populer yang benar-benar baru dan kini dinikmati penuh manja oleh kaum milenial dan masyarakat kontemporer (Alvin Toffler, 1992).

Kajian ini dimaksudkan untuk mengkaji persepsi dan perspektif kelompok sosial ekonomi petani terhadap masa depan generasinya. Meskipun mengalami proses involusi pertanian dimaksud Geertz (1983) serta hubungan sosial yang tidak seimbang antara petani pekerja dengan petani berdasar dimaksud Marx. Akan tetapi, Pemerintah Orde Baru telah berhasil menjawab spirit zaman kaum agraris, sehingga sukses menyandang predikat swasembada pangan. Namun kini, betapa banyak petani di pedesaan Jawa beralih status menjadi *petani gurem* dan bahkan banyak yang hijrah menjadi buruh-buruh industri.

Potret pembangunan pertanian yang terus menuai badai di era orde reformasi ini, adalah dikaji melalui pendekatan kualitatif yang berintikan pada studi komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potret fenomenal degenerasi manusia tani tersebut tampak signifikan dengan ketidakpedulian Pemerintah

untuk menjawab spirit zaman kaum agraris, terutama dari sudut pandang paradigma *post-strukturalisme*. Jika terus terjadi pembiaran, maka dapat dipastikan kondisi pertanian kita ke depan akan mengalami proses degenerasi yang kini mulai menggeliat demikian tampak fenomenal. Tak pelak lagi, berbagai implikasi sosial lainnya berupa kelumpuhan *indigenous institutions* serta proses dekonstruksi sistem sosial pedesaan. Semua ini, pada gilirannya menyebabkan terjadinya arus degenerasi manusia tani yang kini kian sulit terbendung.

Betapa sulit terbantahkan ketika orang mengatakan bahwa berladang, bercocok tanam, memburuh binatang-bintang liar, menangkap ikan di rawa-rawa dan sungai, hingga bergeser ke pantai dan di tengah lautan merupakan aktivitas awal yang menandai kehidupan anak manusia. Boleh jadi atas dasar itu, sehingga orang pun mengatakan bahwa pertanian adalah peradaban vital manusia yang pertama dan utama di muka bumi ini. Tak pelak lagi, bagi bumi persada Indonesia yang terbentang bagai zamrud katulistiwa, adalah terhampar sepanjang wilayah agraris yang mengarabiru dari Sabang hingga ke Marauke dengan aneka potensi sumber daya yang terkandung di dalamnya.

Sepanjang masa, manusia Indonesia dengan etos kerja dan pandangan hidupnya yang terintegral dengan alam sekitarnya, telah memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Meskipun pada awalnya, SDA tersebut dikelola secara subsisten dengan penggunaan peralatan tradisional yang amat sederhana, sehingga tingkat produksinya pun sangat terbatas untuk sekedar memenuhi kebutuhan anggota rumah tangganya pada hari itu. Tentu saja upaya orang-orang terdahulu untuk memenuhi kebutuhannya di hari esok, maka mereka pun kembali ke alam untuk mengambil secukupnya.

Dinamika kehidupan manusia yang terus berkembang, terutama ketika memasuki dunia industrialisasi, maka proses

pemanfaatan SDA kita mulai berlangsung pesat dengan penggunaan teknologi pertanian yang modern dan tepat guna, sehingga tingkat produksi yang dicapai tidak lagi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan primer anggota rumah tangga sehari-hari. Akan tetapi, mulai dipertukarkan dan bahkan sebagian besar sudah mulai dipasarkan. Dalam konteks ini, mulai terjadi pergeseran orientasi dari upaya produksi berbasis pemenuhan kebutuhan anggota rumah tangga kepada upaya produktivitas yang berorientasi marketing.

Sejak tahun 70-an Bangsa Indonesia di masa Pemerintahan Orde Baru mulai melangsungkan proses industrialisasi pertanian secara besar-besaran. Pada gilirannya, program industrialisasi pertanian tersebut membuahkan sebuah prestasi “swasembada pangan” yang sangat spektakuler ketika itu. Namun dalam konteks ini berbagai pandangan ahli yang mengemuka ketika mulai menyoal implikasi sosial ekonomi atas keberadaan program Revolusi Hijau dengan berbagai perangkat keras dan lunaknya. Namun ketika itu, proses degenerasi manusia tani yang kini mulai tampak fenomenal, belum sempat dipikirkan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Kini telah menjadi sebuah kenyataan pahit sebagaimana didendangkan oleh Rubrik Editorial Media Indonesia pada hari Kamis, 7 September 2017 bahwa:

“IRONI memang akrab dengan Indonesia. Salah satu contoh yang paling nyata terjadi di sektor pertanian. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris kini sedang risau karena gagal melakukan regenerasi petani. Penyegaran petani mandek.

Petani di Republik ini didominasi struktur usia tua dan lanjut lantaran anak-anak muda kini tak punya minat terjun ke sektor pertanian. Survei yang dilakukan seorang peneliti LIPI di sejumlah desa di Jawa Tengah pada awal tahun ini mungkin bisa menggambarkan

betapa tua dan merananya nasib pertanian di masa mendatang.

Hasil survei tersebut menyatakan hampir tidak ada anak petani yang ingin menjadi petani. Hanya terdapat sekitar 4% pemuda usia 15-35 tahun yang bekerja dan berminat untuk menjadi petani. Sisanya sebagian besar tergiring industrialisasi.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman bulan lalu juga sempat memaparkan data bahwa setiap tahun negeri ini kehilangan rumah tangga petani sekitar 2% karena beralih profesi ke sektor lain. Lebih rumit lagi, dari jumlah petani yang ada, sekitar 65% sudah berusia di atas 45 tahun.

Langkah rentanya pertanian kita. Jika kondisi ini terus dibiarkan, barangkali umur pertanian kita tinggal 20-25 tahun lagi. Target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045 boleh jadi hanya akan menjadi mimpi kosong bila kerentanan terus dibiarkan.

Yang terjadi mungkin justru sebaliknya, pada tahun itu Indonesia bakal mengalami krisis pangan. Ironi itu juga yang kini tengah membuat resah Presiden Joko Widodo. Sindiran yang ia lemparkan pada Sidang Terbuka Dies Natalis Ke-54 IPB di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), kemarin, pun tak lepas dari kegelisahannya melihat masa depan pertanian di Indonesia.

Ia menyindir mengapa perguruan tinggi berbasis ilmu pertanian yang paling top di negeri ini justru banyak menghasilkan lulusan yang bekerja di perbankan dan

bidang lain nonpertanian. "Lantas yang ingin jadi petani siapa?" tanya Jokowi dengan nada retorik.

Sindiran dan pertanyaan Presiden itu mewakili kegundahan masyarakat pada umumnya yang memang sudah sangat gamblang melihat begitu memprihatinkannya sektor pertanian kita karena ditinggalkan pelaku-pelaku mudanya.

Kampus sebetulnya diharapkan mampu membuat sektor pertanian punya daya tarik lagi, terutama bagi anak muda. Kampuslah yang mestinya menjadi lokomotif perubahan paradigma bahwa pertanian sejatinya merupakan sektor yang menjanjikan jika dikelola dengan sungguh-sungguh dan strategi yang tepat.

Dari kampus juga diharapkan berkembang riset-riset berkualitas untuk menghasilkan teknologi pertanian modern yang bisa meningkatkan produktivitas serta nilai tambah sektor agraris ini. Akan tetapi, pada saat yang sama, pemerintah juga perlu introspeksi bahwa pihaknya telah melalaikan sektor itu terlalu lama.

Krisis petani muda mungkin hanya satu dari banyak masalah di bidang pertanian. Lahan pertanian yang semakin tergerus oleh gelombang konversi lahan, terlalu berkutatnya pertanian kita di sektor budi daya dan melupakan proses agrobisnis, minimnya riset, serta panjangnya rantai distribusi, semuanya berkorelasi menciptakan krisis sektor pertanian.

Saatnya pemerintah segera menyetop itu semua. Jangan sampai kelambanan respons kita akan membuat Indonesia terperosok menjadi consumer country dalam

memenuhi pangan penduduknya. Itu ialah seburuk-buruknya ironi.

Perspektif Teoritis dan Konseptual

Apakah dan akankah bangsa Indonesia yang terkenal dengan simbolisasi negeri “zamrud khatulistiwa” ini kelak mengalami proses degenerasi manusia tani ke depan? Bagaimana hal ini bisa terjadi dan strategi apa yang harus ditempuh untuk mengantisipasinya, sehingga estafet regenerasi SDM sektor pertanian terus dan tetap berjalan menuju terwujudnya pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing? memang sulit dipungkiri bahwa potret krisis regenerasi petani muda di Indonesia merupakan permasalahan yang serius.

Betapa sektor pertanian berperan penting terhadap perekonomian Indonesia dengan kontribusinya terhadap kesediaan pasokan pangan nasional, bahan baku industri, sumber cadangan devisa negara, penyedia lapangan kerja, dan masih banyak lagi. Kemudian pada tahun 2022 tampil dengan kontribusi PDB nasional sebesar 11,8 persen, sehingga masuk dalam empat besar pada perekonomian Indonesia. Sedangkan dalam proses penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 28,6 persen dari total tenaga kerja Indonesia sebanyak 38,7 juta penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Akan tetapi, peran sektor pertanian sebagai tempat penampungan terakhir adalah menyebabkan tingkat kualitas dan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian rendah, karena rata-rata hanya memiliki tingkat pendidikan sekitar 74,07 persen yang kategori berpendidikan SD ke bawah, 15,58 persen berpendidikan SLP, sebesar 9,54 persen berpendidikan SLA, dan hanya sebesar 0,81 persen atau sebanyak 0,28 juta orang berpendidikan perguruan tinggi, serta sebanyak 88 persen merupakan pekerja di sektor informal. Sementara itu, paradigma

pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan sistem pembangunan melalui pengelolaan seluruh sumber daya (SDA, SDM, kelembagaan, dan teknologi) secara optimal untuk menjaga agar suatu upaya terus berlangsung dan tidak mengalami stagnasi. Karena itu, upaya penyediaan SDM yang berkualitas, produktif, inovatif, berdaya saing, dan berkomitmen tinggi dalam sektor pertanian menjadi kunci tercapainya pembangunan pertanian berkelanjutan¹.

Sementara itu, problematika regenerasi petani di Indonesia menjadi isu yang mendesak, terutama karena semakin sedikitnya generasi muda yang tertarik pada profesi sebagai petani. Betapa tidak, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa mayoritas petani Indonesia berusia di atas 45 tahun. Sedangkan proporsi petani muda terus menurun setiap tahun, sehingga menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional di masa depan. Tentu saja demikian, karena tanpa regenerasi yang memadai, maka sektor pertanian dapat kehilangan daya saing dan produktivitasnya. Dan salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya persepsi sejahtera terhadap pekerjaan sebagai petani, sehingga banyak anak muda menganggap profesi ini tidak menjanjikan. Sementara itu, fenomena sulitnya regenerasi petani muda adalah bukan semata-mata terkait dengan keengganan anak-anak petani, melainkan juga dibentuk oleh nilai-nilai stereotip bahwa dunia pertanian dekat dengan dunia laki-laki, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tingginya tingkat putus sekolah².

Seiring dengan itu, perubahan demografi petani di berbagai daerah di Indonesia menjadi masalah yang semakin mendesak, terutama karena regenerasi petani muda. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata usia petani di Indonesia telah mencapai 55 tahun. Hal ini mengindikasikan para petani telah berada pada usia tidak produktif lagi. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian yang diklaim kurang menjanjikan.

Akibatnya, banyak lahan pertanian yang terbengkalai atau kurang terkelola dengan baik dan tentu saja berdampak negatif terhadap produksi pangan nasional. Dalam menanggapi tantangan ini, maka Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa regenerasi petani merupakan salah satu fokus utama Kementerian Pertanian (Kementan) menuju pembangunan pertanian. Kementan telah mengembangkan enam strategi utama untuk mendorong regenerasi petani di Indonesia. *Pertama*, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan pertanian bagi generasi muda melalui program-program vokasi dan magang. *Kedua*, pemberian insentif finansial dan subsidi untuk menarik minat anak muda pada sektor pertanian. *Ketiga*, pengembangan infrastruktur pertanian modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja petani. *Keempat*, memfasilitasi akses terhadap teknologi pertanian terbaru, termasuk penggunaan alat-alat pertanian canggih dan metode pertanian berkelanjutan. *Kelima*, penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi dan kelompok tani yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. *Keenam*, promosi dan kampanye untuk meningkatkan citra positif profesi petani di mata generasi muda. Besar harapan agar implementasi strategi keenam ini dapat menciptakan ekosistem pertanian yang lebih menarik dan berkelanjutan bagi generasi muda ke depan. Tentu saja melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat, akses terhadap teknologi dan sumber daya finansial, serta dukungan kelembagaan yang kuat, maka sektor pertanian dapat kembali menjadi pilihan karir yang menarik bagi anak muda Indonesia³.

Menurut Harari, Noah, Yuval (2018) dalam bukunya yang berjudul “Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia” yang diterjemahkan oleh Yanto Musthofa bahwa kebanyakan peneliti percaya atas kemampuan berfikir dan berkomunikasi kaum sapiens itu mulai terjadi di sekitar antara 30.000 tahun dan atau sekitar 70.000 tahun silam. Sementara potensi dan kemampuan dimaksud menjelmah sebagai akibat atau dampak dari “revolusi

kognitif” yang kemudian tidak hanya sukses gemilang menguburkan Peradaban Purba, tetapi juga dengan gilang gemilang membuahkan revolusi pertanian, revolusi sains dan hingga tamatnya riwayat keberadaan homo sapiens. Dalam buku Homo Deus ini, Prof. Harari menerawang ke masa depan sembari mengeksplorasi pola kekuatan global bergeser ketika digantikan oleh teknologi baru tingkat dewa berupa kecerdasan buatan dan rekayasa genetika.

Tampaknya, kini, para ahli berbeda pandangan dalam sebuah dialektika pemikiran yang cenderung beraroma argumentatif pro kontra. Sesungguhnya, perdebatan intelektual adalah bermula dari pandangan Geertz seputar masuknya program revolusi hijau ke wilayah pedesaan. Atas dasar itu, sebagian ahli menohok persebaran teknologi pertanian modern ke daerah pedesaan menyebabkan kaum buruh tani kelaparan tanah, sehingga tercipta polarisasi. Namun sebagian pula ahli mengklaim persebaran teknologi modern justru membuahkan pemerataan ekonomi yang tidak terpolarisasi, melainkan justru mendorong pelipatgandaan lapisan petani dalam struktur berspektrum kontinum atau stratifikasi.

Pandangan mana yang dianggap lebih empirik terjadi di Sulawesi Tenggara ? Tentu saja harus melewati penelitian mendalam untuk menemukan jawaban valid. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketika pemerintah Orde Baru meluncurkan revolusi hijau, tampaknya pandangan Geertz ini mendapat tanggapan dari banyak ahli. Diantaranya Collier dkk (1974) bahwa revolusi hijau tersebut telah menciptakan proses evolusi, sehingga sistem kelembagaan egaliter masyarakat desa menjadi tertutup yang pada gilirannya menimbulkan kesenjangan dan polarisasi sosial. Hal ini terjadi, karena ada kesempatan bagi petani barlahan luas untuk sukses menjadi kelas komersial yang dapat mengabaikan loyalitas kepada petani yang sebelumnya sama-sama miskin.

Pandangan Collier dkk-nya yang sejalan dengan penganut teori ekonomi radikal Marxis ini, cenderung melihat ekonomi berskala dalam teknologi modern sebagai penyebab utama terciptanya polarisasi. Akan tetapi, para ahli kemudian berpaling lagi kepada pandangan Geertz, sebab tidak terdapat banyak bukti bagi pandangan pertama. Bagi Hayami dan Kikuchi (1987), kesenjangan di pedesaan bukan disebabkan oleh teknologi, karena teknologi yang kurang maju sehingga kurang cepat mengejar pertumbuhan penduduk yang terjadi. Disyaratkan pula oleh beberapa penantang kaum struktural bahwa dinamika ekonomi sosial desa, bukan hanya sekedar dipicu oleh revolusi teknologi biologi dan kimiawi, tetapi juga dikondisikan oleh lonjakan penduduk serta penyusupan sistem kapitalis.

Sehubungan dengan itu, Trijono (1994) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa terjadinya polarisasi di pedesaan Jawa adalah bukan polarisasi yang ditentukan oleh konsentrasi pemilikan tanah sebagaimana sering dikemukakan oleh penganut ekonomi politik radikal. Tetapi lebih merupakan polarisasi yang terjadi sebagai konsekuensi semakin tergantungnya ekonomi desa kepada ekonomi luar desa atau perekonomian nasional. Dalam hal ini polarisasi akan berkembang jika kesempatan hidup di luar pertanian semakin terbatas menampung mereka yang tergeser dari pertanian. Dengan kata lain, polarisasi yang berkembang bukan konflik kelas antara pemilik tanah dengan buruh tani sebagai akibat kontradiksi internal dalam organisasi produksi pertanian. Tetapi lebih merupakan konflik yang terjadi karena semakin sempitnya katub penyelamat dan terbatasnya peluang untuk memperoleh sumber ekonomi dari luar pertanian. Tentu saja fenomena tersebut agak sulit dipisahkan atau dibedakan, karena banyak orang dari luar desa (petani berdasi) yang memiliki tanah yang kemudian dipekerjakan kepada penduduk setempat. Hal ini berarti merupakan polarisasi sebagai akibat dari konsentrasi

pemilikan tanah antara orang-orang kota dengan penduduk setempat.

Potensi homogenitas sosial yang merupakan mutiara komunitas pedesaan terkubur di tengah gegap gempitanya alam modernisasi. Dan hal ini berakibat fatal bagi regenerasi bagi kaum tani di tengah komunitas petani yang kini mulai kehilangan *power of bargaining position*, sebagai akibat dari berbagai faktor yang berkelindang, diantaranya adalah akibat dari proses marjinalisasi struktur dan kelembagaan sosial. Akan tetapi, menurut Geertz bahwa budaya komunitas pedesaan mengandung potensi homogenitas sosial yang egaliter dan simetris, sehingga mampu mengeliminir gejala polarisasi (Wahono, 1994). Ikhwal seperti itulah dimaksudkan Scott (1985) bahwa tindakan petani tradisional didasarkan pada prinsip-prinsip moral, sehingga segala keputusan penting dalam kegiatan sosial-ekonomi bertumpuh pada moral subsistensi, bukan atas dasar prinsip rasional sebagaimana dimaksud kaum ekonom klasik dan neo-klasik. Akhirnya, menurut hasil penelitian Amalauddin (1987) bahwa struktur dan kelembagaan sosial masyarakat memang masih cukup memiliki kekuatan untuk membendung kecenderungan terjadinya polarisasi.

Menurut Foucault (dalam Peribadi, 2015) bahwa penggunaan utama dalam teori post-modernisme merupakan analisis diskursus untuk memahami kekuasaan yang tersembunyi di balik pengetahuan sejenis eksploitasi, dominasi dan subjektif dengan cara membangkitkan kekuatan lokal (*local sentres*) dan kekuatan pengetahuan (*power knowledge*). Karena dengan *power knowledge*, maka semua jenis penyebab ketimpangan dapat dibongkar secara transparan mulai dari negara, kelas elit, birokrat, akademisi dan hingga pada oknum rakyat jelata yang tidak beradab. Hal ini penting, karena bekerjanya kekuasaan (*power*) pada pengetahuan sangat membantu para teoritis dan praktisi perubahan sosial untuk melakukan pembongkaran terhadap teori dan praktek

pembangunan, terutama pada strategi pembangunan pertanian yang gagal memenuhi spirit zaman kaum agraris.

Eksistensi kaum agraris sebagai komunitas petani, menurut Salman dalam buku: “Gagasan, Pikiran dan Harapan Alumni Fakultas Pertanian, Unhas (2012) Bahwa selama ini pembangunan pertanian di negara berkembang hanya mengacu pada paradigma liberal yang berfokus pada upaya mentransformasikan pertanian dari formasi *tradisional-substansial* menjadi *modern-kapitalistik* melalui kemajuan teknologi (penggunaan bibit unggul, pemupukan kimiawi, aplikasi pestisida, perbaikan teknik tanam irigasi teknis dan mekanisasi pertanian), *reakumulasi modal* (kredit usaha tani dan pemasaran hasil pertanian), *modernisasi kelembagaan* (kelompok tani, koperasi unit desa, dan perkumpulan petani pemakai air). Sementara kini, paradigma pembangunan semakin kompleks yang mencakup paradigma *Liberal*, *Marxis* dan *Post-struktural* sebagai multiparadigmatik.

Bagi paradigma Liberal, perubahan sebuah tatanan seyogyanya berbasis pada pembebasan pasar untuk mendorong pertumbuhan melalui kapitalisme. Paradigma Marxis berpandangan bahwa perubahan tatanan seyogyanya berbasis pada dialektika kekuatan produksi dan perbaikan relasi sosial untuk mewujudkan keadilan sosial. Sedangkan pandangan mendasar paradigma Post-strukturalisme, maka perubahan sebuah tatanan seyogyanya berbasis pada pengembangan diskursus dan kontestasi pengetahuan agar setiap entitas dapat merepresentasikan dirinya. Kalau pada dua paradigma pertama perhatiannya pada struktur untuk perubahan, maka pada paradigma terakhir perhatiannya pada non struktural seperti pengetahuan, makna dan wacana untuk representasi diri. Dalam konteks kajian yang terakhir itulah manusia tani membayangkan keberadaan generasinya di masa mendatang dalam sebuah fiksi dan narasi-narasi kecil yang mendebarkan.

Sehubungan dengan itu, proses industrialisasi pertanian cenderung berlangsung secara formalistis dan simbolistis. Dalam perspektif modernisasi, maka akibat dari upaya maksimal memordenisasi *tradisionalitas* dan *feodalitas* serta mengidustrikan masyarakat agraris secara fundamental. Maka yang terjadi kemudian, tradisionalitas kita tidak didorong untuk berkembang menuju tradisionalitas murni/canggih atas dorongan sendiri dari dalam, tetapi dipaksa melompat menuju modernisme. Demikian pula gejolak feodalitas Indonesia tidak didorong atas kemampuan sendiri untuk berubah menjadi feodalitas yang egaliter, tetapi yang terjadi adalah pemaksaan (terpaksa) menjadi modernitas politik semisal “politisi dadakan/karbitan. Tentu saja ketika itu terjadi, tanpa dorongan akumulasi dari dalam dan apalagi terjadi pemaksaan untuk melompat, maka sudah pasti yang lahir adalah sebuah kesadaran semu dan kepalsuan perilaku dengan penuh pemolesan. Selain itu, juga muncul semacam gelagat “*neo-tradisionalisme*” dan “*neo-feodalisme*”.

Potret Fenomenal Degenerasi Petani

Orang tua merupakan pendidikan utama yang memiliki tanggungjawab yang sangat besar untuk menentukan masa depan sang generasi. Karena itu, upaya mendidik anak orang tua harus mengetahui karakter dan potensi yang dimiliki anak untuk dikembangkan, sehingga pihak orang tua akan lebih mudah dalam membimbing dan mengarahkan masa depan sang anak. Dalam konteks inilah, maka ketika kita mencoba mengajukan pertanyaan kepada orang-orang desa yang selama ini urat nadi kehidupannya berjibaku dan terus bergumul dengan upaya pemanfaatan lahan pertanian: “Mengapa anak-anaknya tidak lagi membantu Bapak dan Ibunya dalam mengelolah lahan pertaniannya dan apa tujuan utama Bapak dan Ibu menyekolahkan anak-anaknya ?” Pekerjaan apa yang menjadi harapan utama sebagai orang tua yang setiap hari banting tulang

mengolah sawah dan menantang arus ombak terhadap masa depan generasinya. Hampir saja kita mendengar jawaban yang sama dari penuturan mereka yang menggambarkan dan sekaligus menandakan keinginannya atas keberadaan anak-anaknya.

Pertama, menurut seorang petani Jambu Mente yang berdomisili di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konsel bahwa

“Kami tidak ingin anak-anak kami bodoh dan miskin seperti kami orang tuanya sekarang. Meskipun saya setiap hari mulai di pagi hari setelah sarapan langsung angkat kaki menuju ke kebun untuk membersihkan tanaman-tanaman yang tumbuh di bawah pohon jambu yang sudah besar dan menyiram tanaman yang masih kecil. Itulah yang setiap hari saya kerjakan dengan tetesan keringat memacul di bawah terik matahari. Yang penting anak-anak bisa sekolah sampai dan sarjana. Makanya setiap saat pula sebagai orang tua terus berdoa semoga anak-anak kami sukses menjadi sarjana dan kelak mendapatkan pekerjaan yang baik di pemerintahan, sehingga tidak lagi menjadi petani seperti kami ini hanya bisa hidup untuk makan secukupnya” (Samsu, wawancara, 13 Juni 2018).

Kedua, menurut seorang Kepala Rumah Tangga nelayan yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan yang memiliki anak 4 bersama istrinya yang bernama sumarlin 35 tahun bahwa:

“Harapannya jika mereka (orangtua) pegang pacul setidaknya anak bisa memegang bolpoin. Dalam artian, mereka harus lebih baik lagi dari kami (orangtua). Begitu pula dengan Sukardin akan berupaya banting tulang agar anaknya tidak seperti bapaknya berprofesi sebagai nelayan. Saya menginginkan anak saya menjadi tentara,

makanya mereka harus dikuliahkan terlebih dahulu supaya kalau ada masalah hukum, maka anak-anak saya bisa membantu keluarga dalam menyelesaikan semuanya. Meskipun demikian, saya tidak semata-mata mengikuti keinginan saya, tapi saya serahkan tanggung jawabnya kepada mereka. Saya tidak memaksakan jika tidak menjadi seorang PNS, tapi setidaknya mempunyai pekerjaan yang baik dan bisa membantu orang tuanya di kemudian hari. Saya tidak ingin dia menjadi seorang nelayan karena resikonya tinggi sebagaimana musibah yang pernah saya rasakan ketika kapal yang saya tumpangi terbalik saat mencari ikan. Demikian pula penghasilan yang di dapat dari usaha menangkap ikan juga tidak mencukupi serta pendapatan tidak menentu. Begitu pula pemasaran juga tidak sesuai dengan biaya peralatan yang dibutuhkan seperti perawatan katiting ketika rusak memerlukan biaya banyak dan itu berbanding terbalik dengan hasil yang diperoleh. Atas dasar itulah kami menginginkan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan sampai sarjana agar lebih layak kehidupannya (Jalil dan Ibu sumarlin, wawancara 03 agustus 2018).

Ketiga, menurut seorang kepala rumah tangga nelayan yang berumur 34 tahun dan mempunyai 3 orang anak serta berdomisili di di Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan bahwa:

“Kami sebagai nelayan sangat berharap agar anak-anak tidak mengikuti jejak orangtuanmya yang bekerja sebagai nelayan. Kami ingin agar anak-anak harus sekolah, sudah cukup orangtua saja yang merasakan tidak sekolah. Semoga anak kami dapat melanjutkan pendidikan sampai kuliah, dan jika ada rezeki dan umur panjang Inshaallah kami mendukung selama mereka

masih mampu sekolah, maka kami dukung sepenuhnya. Kami ingin pemikiran mereka lebih maju dibandingkan kami sebagai orang tuanya. Sedangkan masalah pekerjaan setelah selesai pendidikan apa yang diharapkan tergantung pada anak-anak saja. Kalau bisa dia sekolah lebih baik dia sekolah daripada jadi nelayan. Pokoknya mereka harus sekolah sampai selesai. Soal pekerjaan untuk menjadi pegawai itu nomor 2, yang penting adalah sekolah dulu sampai tamat. Keinginan kami cuma satu saya ingin anak-anak lebih maju dari pada kami. Sebab saya tidak menginginkan anak saya jadi nelayan lagi, karena hal itu berarti tidak ada peningkatan. Masalahnya dari kakek sampai bapaknya semuanya nelayan secara turun menurun. Sementara zaman sekarang sudah canggih maka yang terpenting adalah pendidikan, supaya anak kami tidak lagi menjadi seorang nelayan yang hanya bergantung kehidupannya pada melaut” (Nurlan yang istrinya bernama Wahyuni, wawancara 03 agustus 2018).

Keempat, menurut seorang Kepala Rumah Tangga Petani yang berdomisili di Desa Eewa Kecamatan Palangga Kabupaten Knsel Wawancara petani bahwa:

Saya tidak bisa memaksakan anak saya harus jadi petani ataupun jadi pegawai. Saya hanya ingin anak saya bersekolah setinggi mungkin sesuai kemampuan dan kesanggupannya. Saya ingin anak-anak mempunyai pengetahuan yang melebihi orang tuanya agar mereka mengerti hidup. Meskipun tidak mesti harus jadi pegawai, yang terpenting mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan pendidikan, sehingga tidak lagi menjadi petani seperti orang tuanya (Jahar dan Nurtia, wawancara 14 Agustus 2018).

Secara empirik, pandangan warga masyarakat di Desa Kiaea Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan yang bersumber dari hasil wawancara sebanyak 22 informan yang anak-anaknya memiliki tingkat pendidikan yang cukup heterogen, yakni mulai dari pendidikan taman Kanak-kanak (TK) hingga sampai pada Perguruan Tinggi. Tampaknya, harapan orang tua terhadap masa depan anak-anaknya semuanya sangat mengharapkan agar anak-anaknya selalu berada di jalan yang baik dan benar sehingga sukses mencapai apa yang diinginkan dan dicita-citakan, termasuk dapat membahagiakan orang tuanya. Hampir semua orang tua menyatakan dan menandakan bahwa mereka ingin menyekolahkan anaknya karena ia tidak ingin melihat anaknya mempunyai pendidikan yang sama seperti kedua orang tuanya yang pada umumnya berpendidikan rendah dan bahkan banyak di antaranya yang tidak pernah sekolah.

Kelima, tampaknya, semua informan yang berhasil ditemui menyatakan harapannya terhadap anak-anaknya sangat beragam. Ada orang tua yang berharap agar anaknya dapat menjadi seorang polwan, guru, pegawai, dll. Demikian pula, beberapa informan yang menyerahkan sepenuhnya kepada keinginan anaknya sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tuanya, termasuk bagi orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, namun tetap berharap agar masa depannya tidak seperti pekerjaan orang tuanya sebagai seorang petani. Salah satu contoh pertanyaan yang diajukan kepada seorang informan bahwa:

“Apakah Bapak/Ibu ingin tetap menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi? Ya, kami akan menyekolhkannya sampai dia sukses (Sutarman, 48)”. Demikian pula, informan lain menandakan ingin menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi, agar supaya sukses dan tidak seperti kedua orang tuannya (Rustam Yoyo, wawancara 17 Juli 2018)”.

Keenam, harapan orang tua terhadap anak-anaknya tampak sangat beragam. Ada orang tua yang berharap agar anaknya dapat menjadi seorang polwan, guru, pegawai, dll. Demikian pula, beberapa informan yang menyerahkan sepenuhnya kepada keinginan anaknya sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tuanya, termasuk bagi orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, namun tetap berharap agar masa depannya tidak seperti pekerjaan orang tuanya sebagai seorang petani. Contoh kasus:

“Apakah Bapak/Ibu berniat untuk menjadikan anaknya sebagai seorang petani/ternak/pedagang ? Tidak, karena pekerjaan petani sudah menjadi pekerjaan orang tuanya oleh karena itu dia harus mendapat pekerjaan yang bagus” (Sunaria, wawancara 19 Juli 2018). “Apakah Bapak/Ibu berniat untuk menjadikan anaknya sebagai seorang petani/ternak/pedagang ? Tergantung anaknya ,tapi harapan orang tua pasti ingin menyekolahkan anaknya sampai sukses (Marwan, wawancara 20 Juli 2018). “Apa harapan Bapak/Ibu untuk pekerjaan anaknya kedepan ? menjadi pegawai, supaya bisa membantu orang tua(Rustam Yoyo, wawancara 21 Juli 2018). “Apa harapan Bapak/Ibu untuk anaknya ke depan? Adalah membahagiakan orang tuanya dan semoga cita-citanya bisa tercapai” (Hamka, wawancara 21 Juli 2018).

Ketujuh, menurut beberapa informan yang berdomisili di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Pertama, Enar yang berusia 35 tahun dan memiliki 4 orang anak yang masih sekolah dibangku SMP menyatakan begitu tinggi harapannya kepada anak-anaknya agar kelak dapat bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau menjadi seorang pengusaha. Kedua, Thalib yang memiliki 1 orang anak perempuan dan 2 orang laki-laki menginginkan anaknya menjadi seorang polisi wanita. Karena itu, kami berupaya keras

menyekolahkan anak-anak supaya bisa dapat pekerjaan yang lebih dari pekerjaan bapaknya sebagai seorang petani. Ketiga, menurut Aco yang mempunyai seorang anak perempuan dan lelaki berusaha keras menyekolahkan anak-anaknya agar kelak dapat menjadi seorang menejer atau menjadi guru bahasa inggris. Akan tetapi, ternyata masih ditemukan seorang informan yang bernama Aswan bersama anak sematawayangnya menginginkan anaknya menjadi petani nilam yang sukses di desanya dan di daerahnya (Wawancara, 25 Agustus 2018).

Kedelapan, menurut beberapa informan yang berdomisili di Desa Eewa Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan bahwa keinginan saya agar anak-anak terus melanjutkan pendidikannya sampai sarjana, sehingga mereka bisa menjadi pegawai. Saya ingin mereka sekolah terus supaya tidak menjadi petani lagi seperti orang tuanyaa. Sudah cukup kami saja yang menderita kerja keras selama ini (Jusran, wawancara 25 Agustus 2018). Searah dengan itu, menurut seorang informan menandakan bahwa saya ingin anak saya menjadi pegawai dan tidak ingin mereka menjadi petani. Karena itu, sepanjang anaak saya masih ingin sekolah dan bercita-cita menjadi pegawai, maka saya terus membiayai sampai sukses (Ibu Nenesri, wawancara, 27 Agustus 2018). Demikian pula seorang petani nilam yang memiliki empat orang anak yang masih sekolah di SD dan di SMP menyatakan bahwa tidak bisa kami pastikan bagaimana nanti, tetapi jika tetap sehat dan masih bisa kami bertani, maka saya usakan anak-anak kuliah sampai sukses (Dikman, wawancara 26 Agustus 2018).

Kesembilan, menurut seorang informan ketika diajukan pertanyaan yang sama tentang keinginan terhadap masa depan anak-anaknya menyatakan bahwa kami ingin anak-anak tetap melanjutkan pendidikan, tetapi itu juga tergantung pada kemauan anak serta kemampuan ekonomi orang tuanya (La Sani dan Ibu Hasina, wawancara 27 Agustus 2018). Demikian pula seorang informan menyatakan bahwa saya selaku orang tua

inginnya anak-anak saya dapat melanjutkan pendidikan. Jika berumur panjang dan sehat-sehat saja Insya Allah anak saya akan melanjutkan pendidikan yg lebih tinggi lagi, apalagi anak saya juga ingin seperti itu jadi saya rasa semua tergantung dari umur dan kesehatan saya sehingga dapat mencari rezeki untuk mereka (Minggu, 26 Agustus 2018). Sedangkan menurut keluarga Alm. Mular dan Ibu Sarita bahwa saya mempunyai lima orang anak dan dua di antaranya yang sudah menikah, namun harapan saya anak yang ke 3, 4 dan 5 supaya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak seperti saya sebagai orang tuanya (28 Agustus 2018). Adapun menurut keluarga Nur Alang dan Ibu Lili bahwa saya berharap agar anak saya dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, sepanjang ada biaya, kenapa tidak! Saya hanya akan berusaha dan terus berusaha untuk pendidikan anak-anak saya (29 Agustus 2018).

Epiolog. Pertanian Indonesia sedang mengalami krisis dengan jumlah talenta muda yang terus menyusut. Pandangan dan stigma yang tidak menarik dari praktik pertanian saat ini telah berkontribusi pada rendahnya minat generasi muda. Adalah sebuah ironi di tengah-tengah bonus demografi yang dirasakan seiring dengan berlangsungnya sensus pertanian yang tengah diselenggarakan sebagai momentum reflektif atas kebijakan yang kini harus difokuskan pada penciptaan ekosistem tani yang dapat mendukung dan mengembangkan potensi petani muda di masa depan. Karena itu, sensus pertanian yang sedang berlangsung itu adalah sudah saatnya untuk merefleksikan kembali kebijakan pertanian Indonesia untuk meniadakan dampak jangka panjang dari krisis regenerasi.

Dalam perspektif teori generasi, maka menurut William Strauss dan Neil Howe dalam buku *Generations: The History of America's Future* bahwa generasi sekarang dibagi menjadi 5 golongan yaitu Generasi *Baby Boomer* yang lahir 1946-1964), Generasi X yang lahir 1965-1980), Generasi Y yang lahir 1981 -

1994), Generasi Z yang lahir 1995-2010), dan Generasi Alpha yang lahir 2011-2025). Dengan demikian, berarti pelajar saat ini didominasi oleh Generasi Z atau bisa disebut juga Generasi-Net, atau Generasi Internet yang tumbuh di era digital dengan berbagai macam teknologi canggih yang dapat mempengaruhi perkembangan perilaku dan kepribadiannya secara langsung maupun tidak langsung.

Teknologi dan internet sudah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Namun, generasi ini cenderung individualis dan tidak sabaran karena teknologi canggih menawarkan segala sesuatu yang serba instan dan cepat. Mereka sangat fasih dengan komputer tapi kemampuan teknis di lahannya cenderung kurang. Lalu, dengan berbagai karakter yang dimilikinya, bagaimana jika generasi Z ini dihadapkan pada sektor pertanian Indonesia ketika tiba masanya tongkat estafet tanggung jawab itu sampai pada generasi tersebut. Karena notabene Indonesia merupakan negara berkembang dan sektor pertanian masih pada taraf padat karya bukan padat modal atau teknologi meskipun kita semua selalu berharap kemajuan yang merata di seluruh wilayah dan bidang dapat tercapai⁴.

Sementara itu, menurut Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya (Unsri) Ahmad Muslim bahwa kondisi pangan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, khususnya beras karena produksi beras di Indonesia sangat rendah dan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Betapa tidak, luas panen untuk padi hanya sekitar 10,2 juta hektar. Padahal idealnya adalah seharusnya luas lahan padi tersebut 500 meter per kapita. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan strategi yang sistematis baik untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek ini mau tidak mau untuk suatu keniscayaan harus impor, tetapi jangka panjang dengan potensi lahan, potensi tenaga kerja, kemudian dengan potensi teknologi yang sudah ada itu sudah harus kita lakukan.

Jadi political will pemerintah yang sustainable harus benar-benar ditunjukkan⁵.

Ironisnya, meski Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi besar di sektor pertanian, namun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tampak sangat memprihatinkan. Potret regenerasi petani muda yang berkualitas masih sangat minim, terutama karena minat generasi muda untuk menjadi petani rendah. Padahal, dengan pengelolaan yang baik dan pemanfaatan teknologi modern, maka menjadi petani dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan. Karena itu, maka untuk mencapai kesuksesan di bidang pertanian adalah sangat dibutuhkan penerapan teknologi. Misalnya, inovasi pertanian dan bibit unggul dapat meningkatkan hasil panen kelapa dari 40 butir menjadi 100 butir per pohon setiap tahunnya⁶.

Pada akhirnya, semua masalah ini menciptakan persepsi bahwa menjadi petani tidak layak untuk diinvestasikan karena selalu menghadapi ketidakpastian dan tidak ada jaminan kesejahteraan dibandingkan dengan profesi lain. Sifatnya yang padat modal, baik secara fisik seperti yang telah disebutkan sebelumnya maupun secara finansial, tidak selalu membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Tak pelak lagi, tantangan iklim dan cuaca, seperti gelombang panas El Nino yang melanda Indonesia saat ini dan kenaikan suhu yang tidak biasa adalah seringkali menyebabkan hasil panen sulit untuk diperkirakan. Belum lagi menyusutnya lahan pertanian karena perubahan tata guna lahan dan peran maladaptif tengkulak, terutama yang diperankan oleh sang aktor dan aktris industri pertambangan yang terus berlangsung dengan nafsu angkara murkahnya.

BIBLIOGRAFI

- Geertz, Clifford, 1983, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta.
- Hayami, Yujiro dan Kikuchi, 1987, *Asian Village Economic at The Crossroads: An Economic Approach to Institutional Change* (Balitimore): The JohnHopkinsUniversity Press.
- Harari, Noah, Yuval, 2018. *Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia*, diterjemahkan oleh Yanto Musthofa, PT Pustaka Alvabet, Jakarta.
- Peribadi, 2015. *Reconstruction of Participatory Paradigm Based on ESQ Power, A Strategy of Power Overcoming in Kendari City, South East Sulawesi*, Lambert Academic Publishing (LAP), Germany.
- Salman, Darmawan, 2012, *Pertanyaan Kaum Agraris Bagi Pembangunan Pertanian: Perlunya Pendasaran Multi Paradigmatik*, dalam Buku *Gagasan, Pikiran dan Harapan Alumni Fakultas Pertanian, UNHAS Terhadap Pembangunan Pertanian Indonesia*, PT. Kalola Printing, Makassar.
- Scott, John, 2012, *Teori-teori Sosial: Masalah-Masalah Pokok dalam Sosiologi*, diterjemahkan dari buku “*Social Theory*”, *Central Issues in Sosciology*, oleh Ahmad Lintang Lazuardi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Trijono, Lambang, *Pembangunan dalam Perspektif Ilmu Sosial Kritis*, Eksplorasi Teoritis Pembangunanisme, LP3ES, Prisma No. 9 September 1995.
- Wahono, Prancis, 1994, *Dinamika Ekonomi Sosial Desa Sesudah 25 Tahun Revolusi Hijauh*, Prisma 3 Maret 1994, Jakarta.

Sumber Internet=

1. <https://fem.ipb.ac.id/akankah-indonesia-kehilangan-petaninya-di-masa-depan/>

2. <https://www.antaranews.com/berita/4478045/regenerasi-petani-untuk-masa-depan-kemandirian-pangan-indonesia>.
3. <https://upland.psp.pertanian.go.id/artikel/1717259240/kenali-6-strategi-kementan-dalam-regenerasi-petani>
4. <https://pertanian.polbangtanyoma.ac.id/generasi-z-dan-pertanian-masa-depan/>
5. <https://mediaindonesia.com/nusantara/656351/kondisi-pangan-indonesia-sangat-memprihatinkan-sampai-impor-beras>
6. <https://www.balpos.com/ekonomi/1795120395/kualitas-sdm-pertanian-indonesia-memprihatinkan-rata-rata-usia-45-tahun-dan-mayoritas-tak-lulus-sd>

BAGIAN KETIGA: ANTARA KEBUTUHAN EKONOMI DAN PILIHAN POLITIK DI ARENA PEMILUKADA

Asriani

Tulisan ini adalah bersumber dari salah satu artikel penulis yang diterbitkan oleh Harian Kendari Post pada hari kamis, tanggal 28 November 2024. Kajian ini merupakan refleksi dari pergumulan politik di gelanggang Pemilukada yang menunjukkan aneka bentuk perilaku penyimpangan terhadap proses demokratisasi yang tampak nyata dicenderai oleh virus materialisme, hedonisme, uangisme dan amplovisme.

Fenomena politik uang, atau yang sering disebut sebagai "serangan fajar," telah menjadi praktik umum dalam setiap pesta demokrasi, termasuk Pilkada serentak. Kondisi ini terjadi karena dua faktor utama: lemahnya regulasi dan tingginya ketimpangan ekonomi. Kandidat yang ingin menang dengan mudah sering kali memilih jalur pragmatis, yaitu memberikan uang kepada pemilih, dengan harapan dapat membeli suara tanpa perlu bersusah payah meyakinkan mereka melalui visi dan program kerja.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum turut memperburuk keadaan. Meski regulasi seperti Undang-Undang Pemilu sudah melarang praktik politik uang, tetapi penerapan sanksi yang tidak konsisten membuat pelaku merasa aman. Akibatnya, budaya politik transaksional ini terus tumbuh subur, khususnya di daerah dengan tingkat literasi politik rendah. Fenomena ini mencerminkan demokrasi yang terdistorsi, di

mana suara rakyat tidak lagi murni, tetapi dikendalikan oleh uang.

Pratikno (2004) menjelaskan bahwa praktik money politic terjadi pada dua level. Pertama, praktik money politic yang banyak terjadi pada level individu menjelang pemilu yang melibatkan individu sebagai aktor politik. Tujuannya adalah untuk menduduki atau mempertahankan jabatan strategis dalam pemerintahan. Kedua, adalah terjadi pada level institusi dan praktik ini terlegitimasi di lingkungan partai politik. Misalnya, bagaimana partai menggalang sumber dana melalui praktik yang dicampuradukkan dengan kampanye atau kepentingan internal. Akibatnya, politik uang menjadi bagian dari strategi institusi untuk mempertahankan eksistensi dan pengaruhnya.

Karena itu, praktik politik uang tidak terjadi secara spontan, tetapi dirancang melalui strategi tertentu. Dalam konteks ini, Glueck dan Jauch (1994) mendefinisikan strategi sebagai rencana yang menghubungkan keunggulan strategis dengan tantangan lingkungan untuk mencapai tujuan utama. Pertama, serangan fajar yang dilakukan menjelang hari pemungutan suara. Praktik ini menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah, di mana kandidat memberikan uang atau barang untuk membeli suara pemilih. Kedua, strategi mobilisasi massa yang terjadi selama masa kampanye. Partai politik atau kandidat memberikan biaya transportasi, uang makan, atau insentif lainnya kepada massa supaya hadir dalam acara kampanye dan sekaligus memilih kandidat tersebut.

Praktik money politic memiliki dampak yang signifikan terhadap prospek demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Tohadi dan Zaenal Abidin (2012) membagi dampaknya menjadi dua tingkat: (1) pada tingkat internal partai politik adalah pada dasarnya menghilangkan elemen penting dari fungsi partai politik sebagai pengawal aspirasi rakyat. Menjadikan partai milik segelintir individu yang memiliki akses terhadap dana besar, sehingga kebijakan partai lebih mencerminkan

kepentingan elit penyandang dana. Mendorong konflik internal partai akibat persaingan tidak sehat di antara pengurus partai yang berlomba mendapatkan pengaruh melalui uang; dan (2) pada tingkat makro politik tampak demikian subur praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasalnya, penyandang dana politik menganggap kontribusi mereka sebagai investasi yang harus dibalas melalui kebijakan menguntungkan ketika partai atau kandidat yang mereka dukung berkuasa. Akibatnya adalah tergerusnya legitimasi pemerintahan sebagai dampak dari praktik balas jasa yang merugikan rakyat, sehingga menyebabkan agenda-agenda pemerintahan semakin jauh dari aspirasi masyarakat.

Tampaknya, praktik money politic tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga berdampak jangka panjang pada demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Betapa tidak, tanpa pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, maka fenomena ini akan terus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Karena itulah, maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk memberantas money politic, baik pada tingkat individu maupun institusi, agar demokrasi yang sehat dapat terwujud.

Serangan Fajar: Sebuah Cermin Ketimpangan Sosial. Serangan fajar yang identik dengan praktik politik uang menjelang hari pemilihan, mencerminkan ketimpangan sosial yang masih mengakar di banyak daerah. Ketimpangan ini terlihat dari bagaimana uang tunai menjadi daya tarik utama bagi sebagian besar pemilih, terutama di daerah pedesaan atau kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Kandidat yang memiliki modal besar memanfaatkan situasi ini untuk meraih simpati pemilih dengan memberikan uang tunai sebagai bentuk “bantuan”. Di sisi lain, pemilih menganggap uang tersebut sebagai keuntungan langsung, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan di masa depan. Bagi banyak warga, uang yang diberikan oleh kandidat dianggap

sebagai bantuan instan yang dapat memenuhi kebutuhan mendesak, seperti membeli sembako atau membayar utang. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, penolakan terhadap politik uang menjadi hal yang nyaris mustahil, meskipun mereka tahu bahwa itu melanggar hukum.

Praktik ini juga mengindikasikan lemahnya fungsi demokrasi dalam menciptakan ruang diskusi yang sehat antara kandidat dan masyarakat. Ketimbang menawarkan visi dan program yang konkret, sehingga banyak kandidat memilih untuk memanfaatkan celah ketimpangan ini. Mereka melihat bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendesak lebih mudah diubah menjadi alat transaksional, sehingga menghilangkan esensi politik sebagai proses pencarian solusi atas masalah-masalah publik. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa tidak memiliki pilihan lain selain menerima uang dari kandidat. Mereka terjebak dalam logika pragmatis bahwa uang tersebut adalah bentuk “kompensasi” atas suara mereka. Pemahaman ini mempertegas betapa kurangnya literasi politik di tingkat akar rumput. Ketimpangan sosial yang menjadi dasar praktik ini tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga memperkuat ketergantungan masyarakat pada praktik transaksional yang berulang di setiap pemilu.

Dampak Politik Uang terhadap Pemilih. Politik uang berdampak besar pada perilaku pemilih dan kualitas demokrasi lokal. Dalam sistem politik transaksional ini, suara pemilih tidak lagi mencerminkan aspirasi atau preferensi mereka terhadap kandidat yang dianggap kompeten. Sebaliknya, keputusan memilih lebih banyak dipengaruhi oleh keuntungan finansial sesaat yang diterima sebelum hari pemungutan suara, sehingga kompetisi tidak lagi adil bagi kandidat yang jujur dan berintegritas. Akibatnya, proses demokrasi kehilangan esensi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat.

Pemilih yang terlibat dalam praktik ini cenderung mengabaikan visi dan misi kandidat. Fokus mereka hanya pada nominal uang yang diterima, tanpa mempertimbangkan kemampuan kandidat untuk memimpin atau mengelola pemerintahan. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak buruk bagi tata kelola pemerintahan merusak moralitas politik karena kandidat yang terpilih sering kali merasa tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Sebaliknya, mereka merasa berkewajiban untuk mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan selama kampanye. Pola ini memicu siklus korupsi, mulai dari penyalahgunaan anggaran hingga kolusi dengan pihak-pihak yang mendukung kemenangan mereka.

Konsekuensi lain dari politik uang adalah terjerbaknya pemilih dalam lingkaran setan korupsi. Pemimpin yang terpilih dari proses ini cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak berorientasi pada pemerataan pembangunan atau pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, politik uang bukan hanya merusak proses pemilu, tetapi juga memperdalam krisis kepercayaan terhadap demokrasi.

Kebutuhan Ekonomi vs Kesadaran Politik. Tingginya angka kemiskinan menjadi alasan utama di balik penerimaan masyarakat terhadap politik uang. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, uang tunai yang diberikan oleh kandidat dianggap sebagai “angin segar” yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun hanya sementara, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Realitas ini membuat banyak pemilih merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima uang tersebut. Namun, di balik penerimaan ini, terdapat konsekuensi besar yang sering kali diabaikan oleh masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa, di satu sisi, masyarakat adalah korban dari sistem yang tidak adil, tetapi di

sisi lain, mereka juga menjadi bagian dari masalah dengan mengabaikan pentingnya integritas dalam proses pemilu.

Akibat rendahnya kesadaran politik juga menjadi akar masalah bahkan memperparah situasi ini. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa menerima uang dari kandidat adalah bentuk pelanggaran etika politik yang merusak demokrasi serta sama saja dengan menjual masa depan mereka. Mereka mungkin mendapatkan keuntungan sementara, namun mereka sering kali tidak menyadari bahwa uang tersebut adalah investasi buruk yang akan dibayar mahal melalui kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, korupsi, atau pembangunan yang stagnan. Pada akhirnya masyarakat harus menanggung konsekuensi buruk dari pemimpin yang tidak kompeten atau tidak peduli pada kepentingan publik. Meningkatkan literasi politik menjadi salah satu langkah penting untuk mengubah pola pikir ini, guna menciptakan pemilu yang sehat.

Perlu dipahami bahwa masyarakat juga adalah korban dari sistem yang tidak adil. Ketika kebutuhan ekonomi menjadi prioritas utama, sulit bagi mereka untuk menolak iming-iming uang, meskipun mereka tahu itu salah. Oleh karena itu, solusi untuk masalah ini tidak hanya bergantung pada membangun kesadaran politik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan politik perlu diintegrasikan dengan program-program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat memiliki daya tawar lebih dalam proses politik.

Sehubungan dengan itu, maka sebagai perbandingan dapat dilihat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya money politic pada Pemilu Legislatif: kasus Kelurahan Wamelai tahun 1999. *Pertama*, faktor kebiasaan yang telah membudaya di tengah masyarakat adalah seolah menjadikan pemilu sebagai sebuah ajang berbagi antara elit politik dan masyarakat. Praktik ini telah menjadi bagian dari budaya politik di mana money politic bukan lagi sesuatu yang baru, melainkan sudah menjadi cara yang dianggap wajar dalam proses pemilu. Masyarakat

melihat uang sebagai alat untuk mempengaruhi pilihan mereka, dengan harapan memperoleh imbalan sebagai balasannya.

Kedua, masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah seringkali terpaksa menerima uang atau pemberian dari calon legislatif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang pada umumnya bekerja sebagai petani dan pendapatan yang tidak tetap. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, maka masyarakat lebih memilih menerima uang tunai atau sembako daripada memikirkan calon yang memiliki kapasitas, visi, atau misi yang jelas. Hal ini sesuai dengan pendekatan rasional dalam teori perilaku, di mana pemilih cenderung memilih berdasarkan timbal balik yang mereka terima, yaitu uang atau barang, tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti kapasitas calon.

Ketiga, kurangnya pemahaman tentang politik dan proses pemilu membuat masyarakat acuh terhadap tujuan dan makna dari pemilu itu sendiri. Banyak dari mereka yang tidak mengenal partai politik, bahkan tidak peduli dengan calon legislatif yang bertarung. Akibatnya, banyak masyarakat yang bersikap golput atau memilih berdasarkan imbalan yang diberikan oleh calon, seperti uang tunai atau sembako. Hal ini memperburuk kualitas partisipasi dalam pemilu dan mencederai prinsip demokrasi. Selain itu, masyarakat juga tidak memandang praktik money politic sebagai suatu pelanggaran hukum. Bagi mereka, pemberian uang atau barang dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan sah, dalam proses pemilu, meskipun tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Peran Elite Politik. Elite politik memainkan peran besar dan memiliki tanggung jawab besar dalam melanggengkan praktik politik uang. Banyak kandidat yang seharusnya menjadi contoh demokrasi yang bersih justru terjebak dalam praktik transaksional. Kandidat lebih memilih jalan pintas dengan menggunakan uang daripada melakukan pendekatan berbasis ide

dan program. Mereka memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat untuk memenangkan suara dengan cara yang tidak etis. Strategi ini tidak hanya menunjukkan lemahnya komitmen mereka terhadap demokrasi, tetapi juga memperburuk kualitas politik di tingkat lokal.

Dalam banyak kasus, tim sukses kandidat merancang sistem distribusi uang yang terstruktur dan masif, bahkan melibatkan jaringan yang luas untuk menjangkau pemilih di berbagai wilayah untuk mendapatkan suara maksimal. Uang disebarkan secara diam-diam, terutama pada malam sebelum pemungutan suara, dengan tujuan meminimalkan risiko pengawasan. Praktik ini menciptakan ketidakadilan bagi kandidat lain yang mencoba berkompetisi secara jujur. Selain itu, politik uang juga mendorong kandidat untuk lebih fokus pada akumulasi kekayaan daripada membangun komunikasi politik yang sehat dengan rakyat.

Peran elite tidak hanya terbatas pada praktik politik uang, tetapi juga pada pembentukan opini bahwa uang adalah alat utama dalam politik. Mereka cenderung mengabaikan pentingnya membangun program yang berbasis kebutuhan masyarakat dan malah menjadikan uang sebagai “komoditas” utama dalam meraih dukungan. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka demokrasi akan kehilangan kepercayaan dari rakyat dan hanya menjadi panggung bagi mereka yang memiliki kekuatan finansial besar.

Upaya Memberantas Politik Uang. Memberantas politik uang membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak. Pengawasan yang lebih ketat dari Bawaslu dan penegakan hukum yang tegas harus menjadi prioritas. Tidak hanya kandidat, pemilih yang menerima uang juga perlu diberi pemahaman bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Sosialisasi regulasi yang lebih masif dan sanksi yang konsisten dapat menjadi langkah awal untuk memutus rantai praktik ini.

Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat perlu ditingkatkan. Media, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya politik uang. Dengan cara ini, pemilih tidak hanya memilih berdasarkan uang, tetapi juga berdasarkan kesadaran politik yang matang.

Pemberdayaan Ekonomi sebagai Solusi Jangka Panjang. Untuk memutus rantai politik uang, Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi solusi jangka panjang yang paling relevan. Kemiskinan adalah akar utama dari penerimaan politik uang, sehingga upaya untuk mengentaskan kemiskinan harus menjadi prioritas pemerintah. Program-program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan akses terhadap kredit usaha rakyat dapat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara finansial, sehingga mereka tidak lagi tergantung pada bantuan instan saat Pilkada.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan merata, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap politik uang. Pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan perlu digalakkan. Ketika masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan dasar, mereka akan lebih mampu memahami pentingnya memilih pemimpin berdasarkan integritas dan kompetensi, bukan uang. Peningkatan kesejahteraan ekonomi ini tidak hanya mengurangi godaan politik uang, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Pemberdayaan ekonomi juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi politik. Kombinasi antara kesadaran politik dan kemandirian ekonomi akan menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan rasional dalam memilih pemimpin. Dengan demikian, politik uang tidak lagi menjadi strategi yang efektif, karena masyarakat telah memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam proses politik.

Epilog. Menuju demokrasi yang berintegritas sebagai upaya membangun demokrasi yang berintegritas membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat. Kesadaran kolektif untuk menolak politik uang harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan berbagai elemen, termasuk tokoh agama, media, dan organisasi masyarakat sipil.

Pilkada seharusnya menjadi ajang kompetisi gagasan, bukan transaksi uang. Jika budaya politik uang terus dibiarkan, masa depan demokrasi Indonesia akan semakin suram. Oleh karena itu, langkah nyata untuk memberantas politik uang harus dimulai sekarang, demi memastikan bahwa demokrasi benar-benar menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar alat untuk meraih kekuasaan.

Sumber: Harian Kendari Pos, Kamis, 28 Nov 2024

BAGIAN KEEMPAT: PERAN PEKERJA PEREMPUAN DALAM MEMENUHI EKONOMI KELUARGA: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik

Darmin Tuwu

Tulisan ini adalah bersumber dari salah satu hasil penelitian penulis yang telah dipublikasikan dalam jurnal *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* pada Volume 13, Nomor 1, Mei, 2018.

Kajian ini adalah berupaya mengelaborasi peran perempuan pekerja sektor informal dalam memenuhi ekonomi keluarga di kawasan wisata Bahari Pantai Batu Gong di Kabupaten Konawe.

Hasil penelitian melalui studi kasus ini adalah menunjukkan bahwa peran perempuan desa yang bekerja di kawasan pariwisata pantai Batu Gong sangat besar dalam mendukung pemenuhan ekonomi rumah tangganya.

Prolog. Aktivitas domestik sudah sejak lama dilekatkan pada perempuan. Asosiasi dua hal tersebut bahkan sudah ada jauh sebelum kebanyakan perempuan lahir. Hal itu kemudian menjadi budaya dan adat istiadat. Perempuan selalu dikonotasikan sebagai manusia pekerja domestik (*homemaker*) yang dinilai tidak dapat berkontribusi secara aktif di luar rumah, sehingga perannya tidak lebih dari sekadar aktivitas dalam rumah.

Di kemudian hari, terutama di dunia kerja, banyak posisi strategis yang aksesnya tertutup bagi perempuan. Perempuan dianggap tidak pantas memimpin dalam pekerjaan karena dinilai sebagai makhluk yang terlalu menggunakan perasaan dan sulit mengambil keputusan dengan bijak. Pelekatan pembagian

pekerjaan antara perempuan dan laki-laki sudah sejak lama diyakini kebenarannya. Perempuan selalu dikaitkan dengan beberapa kata, “sumur, dapur, kasur” yang hingga kini digugat eksistensinya. Wacana tersebut dinilai sebagai wacana usang yang tidak dapat dibuktikan secara nyata karena banyak perempuan yang juga mengambil bagian penting di ranah produktif. Walaupun pada tataran kenyataan, secara mendalam perempuan masih terus dilekatkan dengan “sumur, dapur dan kasur” dan belum mampu keluar secara utuh tanpa tendensi apapun.

Peran perempuan secara tradisional masih dialamatkan pada kegiatan non-ekonomi, yaitu peran perempuan sebagai pengasuh anak dan mengurus rumah tangga, namun kenyataannya tidaklah demikian. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, maka peran perempuan pun turun bergeser. Zaman dahulu kaum lelaki berperan sebagai pencari nafkah (publik), sementara kaum perempuan tinggal di rumah mengurus urusan domestik. Tetapi dewasa ini zaman telah berubah. Tidak hanya kaum lelaki yang berkiprah di ranah publik, namun kaum perempuan juga telah berperan dalam kegiatan ekonomi dan publik. Peran serta kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi rumah tangga merupakan fenomena umum yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan menjangkau seluruh sistem sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan serta dalam sektor domestik rumah tangga, tetapi juga berperan dalam sektor ekonomi dan publik.

Studi Bibliografi. Betapa banyak dalam literatur dijumpai bahwa perempuan yang bekerja di sektor publik selalu dikaitkan dengan keadaan ekonomi rumah tangga pekerja perempuan. Salah satu alasannya adalah alasan ekonomi dan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan persoalan global. Sayogyo (1993) mengatakan bahwa persoalan kemiskinan sudah berlangsung sejak zaman penjajahan sampai

zaman pembangunan. Persoalan tersebut hingga kini belum tuntas dan bahkan semakin sengit diperbincangkan. Tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga sampai ke desa-desa. Di perdesaan, bidang pertanian merupakan bidang di mana kaum perempuan dapat terlibat secara intensif dan berperan penting di dalam keseluruhan proses transformasi dan perkembangan masyarakat perdesaan.

Menurut Suratiyah, dkk., (1006) bahwa kaum perempuan perdesaan bukan saja merupakan penentu tradisi bercocok tanam, tetapi fakta menunjukkan bahwa pada saat suami tidak ada di rumah, maka perempuanlah yang mengelola berbagai kegiatan ekonomi keluarga. Dewasa ini telah terjadi pergeseran peran serta kaum perempuan perdesaan di bidang ekonomi, terutama perubahan kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh proses pembangunan pertanian. Masuknya program revolusi hijau dan komersialisasi pertanian merupakan tekanan penting yang dapat mengubah institusi sosial (social institution) yang terdapat pada masyarakat perdesaan, dari penggunaan alat-alat tradisional berubah menjadi penggunaan alat-alat modern atau yang lebih dikenal dengan sebutan modernisasi pertanian. Sebagai contoh misalnya ani-ani yang telah digantikan oleh sabit atau arit untuk memanen padi, lesung yang telah digantikan fungsinya oleh mesin penggiling padi. Transformasi tersebut telah mengurangi kesempatan kerja dan membatasi peran serta perempuan dalam kegiatan pertanian.

Berkurangnya kesempatan kerja kaum perempuan yang berstatus sebagai isteri atau ibu rumah tangga di sektor pertanian tidak secara langsung menyebabkan perempuan kehilangan lapangan pekerjaan, namun peluang kerja perempuan masih banyak terdapat pilihan-pilihan pekerjaan lain di luar sektor pertanian. Aneka peluang kerja perempuan di luar sektor pertanian dapat memberikan kemandirian dan produktivitas ekonomi yang lebih besar, seperti pada bidang perdagangan, kerajinan, sektor jasa, perikanan, bidang pariwisata, dan

sebagainya. Beragamnya lapangan pekerjaan yang dapat memberikan peluang, kesempatan, dan kemandirian kaum perempuan dalam bekerja adalah salah satu dampak dari komersialisasi di bidang pertanian yang memunculkan bentuk-bentuk lapangan pekerjaan baru yang pada masa lalu tidak ditemukan di wilayah perdesaan (Pudjiwati, 1983).

Dekade terakhir, kiprah perempuan di ranah produktif mulai menunjukkan eksistensinya. Bisa kita lihat bagaimana perempuan dilibatkan secara aktif bekerja di semua lini. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik hingga agama. Semua lini telah dapat mengandalkan perempuan sebagai sumber daya manusia yang produktif dan andal. Meski demikian, toh, banyak hal yang masih membelenggu perempuan dalam kiprahnya di ranah produktif. Perempuan masih saja terbelenggu dengan budaya, mitos dan jauh dari kata kompetensi yang sehat di ranah produktif. Banyak anggapan perempuan yang bekerja di ranah produktif akan lebih kesulitan mengambil kebijakan ketimbang laki-laki, sekalipun kompetensinya melampaui laki-laki. Begitu pula dari sisi agama, perempuan pemimpin hingga saat ini masih dianggap tabu dan menyalahi kodrat.

Sementara itu, kaum perempuan desa yang tinggal di kawasan pariwisata Kabupaten Konawe, telah lama menekuni pekerjaan, mereka tidak hanya bekerja di sektor pertanian tetapi juga bekerja di luar sektor ekonomi produktif dengan bekerja pada sektor informal sebagai penjual makanan dan minuman serta memberikan pelayanan jasa terhadap para wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata Pantai Bahari Batu Gong. Dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Bondoala, Desa Lalimbue merupakan salah satu desa yang memiliki angkatan kerja wanita yang cukup banyak. Jumlah angkatan kerja wanita Lalimbue terus bertambah dari tahun ke tahun.

Menurut Data Kantor Desa Lalimbue Tahun 2017, terdapat 297 orang angkatan kerja wanita atau sepertiga dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki. Mereka umumnya

bekerja atau mengelola usaha ekonomi kecil seperti perdagangan, rumah makan, penginapan, perikanan, dan sektor jasa lainnya. Peluang-peluang pengembangan usaha ekonomi kecil perempuan ibu rumah tangga tersebut, dapat memberikan nilai tambah serta dapat menambah pendapatan ekonomi keluarga. Bekerjanya kaum perempuan di sektor publik yang berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, sebagai akibat dari isteri dan ibu rumah tangga yang bekerja, dari sisi sosial ekonomi merupakan faktor yang dapat mengurangi dominasi kaum lelaki terhadap kaum perempuan dalam kehidupan keluarga. Namun dalam perspektif sosial budaya, bekerjanya perempuan di sektor publik tidak secara serta merta merobohkan dominasi kaum lelaki terhadap kaum perempuan yang menganut sistem patriarki, karena masih ada hambatan-hambatan sosio-kultural yang harus dilewati.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa di lokasi ini banyak perempuan yang berstatus sebagai isteri dan ibu rumah tangga yang mengembangkan usaha ekonomi kecil seperti membuka warung-warung makanan dan minuman, penjual gogos dan pokea, dan menyediakan pelayanan jasa bagi pengunjung wisata pantai. Teknik penentuan informan berdasarkan snowball sampling yaitu teknik penentuan informan yang semula jumlahnya kecil, kemudian membesar (Sugiyono, 2007). Kriteria informan penelitian adalah perempuan yang berstatus sebagai isteri dan ibu rumah tangga serta bekerja atau mempunyai usaha ekonomi kecil seperti membuka warung-warung makanan dan minuman, penjual gogos dan pokea, serta penyedia layanan jasa bagi pengunjung wisata pantai.

Perempuan memberikan kesempatan yang lebih kepada laki-laki dalam melakukan kegiatan ekonomi. Laki-laki menjadi satu-satunya agen ekonomi tempat perempuan bergantung secara finansial. Ini menggambarkan bagaimana perempuan dalam rumah tangga bekerja dari pagi sampai malam tetapi tidak

dibayar. Bahkan segala status sosial dan ekonominya selalu mengikuti suaminya, bukan pencapaian sendiri.

Kesselmen, dkk., (1999) mengatakan bahwa pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan sangat menguras tenaga dan waktu. Pekerjaan rumah tangga bahkan dilakukan sebelum matahari terbit. Ketika anak-anak pergi ke sekolah dan suami bekerja, perempuan kembali dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tak kunjung usai. Anak dan suami pulang, mereka perlu disiapkan makanan. Bahkan ketika malam, perempuan masih harus mendampingi anaknya belajar kemudian melayani suaminya. Pekerjaan perempuan di ranah domestik menguras tenaga, waktu dan membutuhkan keterampilan. Sementara itu, keterlibatan peran laki-laki dalam kegiatan domestik masih sangat jarang, sebab kebanyakan laki-laki diasosiasikan dalam peran mencari nafkah saja.

Studi perempuan yang mengkaji relasi gender di berbagai masyarakat dunia, pada umumnya sependapat bahwa terjadi ketidakadilan dalam hubungan gender. Mansour Fakih (2007) menjelaskan bahwa ada enam ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan, yaitu (1) marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi pada perempuan; (2) subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik; (3) pembentukan stereotipe perempuan atau melalui pelabelan negatif; (4) kekerasan (*violence*) terhadap perempuan, (5) beban kerja tidak proporsional, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta (6) sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Saptari dan Holzner Brigitte (1997) mengatakan bahwa teori sosial telah digunakan untuk menjelaskan posisi subordinat perempuan dalam relasi gender tersebut, seperti teori materialisme historis Karl Marx dan Engel. Teori-teori materialisme historis Karl Marx menekankan adanya sifat-sifat universal dalam menjelaskan posisi subordinat kaum perempuan. Meskipun perempuan bekerja sepanjang hari dari

waktu subuh hingga malam hari dengan mengerjakan berbagai jenis pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, merawat dan mendidik anak, melayani suami, dll, namun tetap saja pekerjaan domestik kaum perempuan tidak dihitung karena tidak menghasilkan uang secara ekonomi. Padahal pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan tersebut sangat berat.

Karena itulah, maka teori-teori sosial ini mengalami kritikan karena menganggap bahwa posisi subordinat kaum perempuan berlaku untuk semua masyarakat dan kebudayaan di dunia. Pelekatan (*stereotyping*) perempuan dengan pekerjaan domestik masih menjadi cara yang paling ampuh untuk melanggengkan ideologi patriarki. Dalam konteks ini, Manneke Budiman (2013) menyebutkan bahwa pekerjaan domestik tidak pernah dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Pekerjaan domestik dianggap tidak menghasilkan uang dalam dimensi ekonomi, sehingga membuat pekerjaan domestik bukan menjadi bagian pekerjaan produktif. Karena itu perempuan yang berkarya di ranah publik terus saja dibebani dengan tanggung jawab domestik seperti mengasuh anak, mengurus rumah, memasak, menyiapkan kebutuhan keluarga, membayar tagihan-tagihan dan masih banyak pekerjaan domestik lainnya. Demikian pula harus mempertimbangkan berbagai persoalan keuangan, pendidikan, serta sosial maupun keharmonisan keluarga. Perempuan yang memilih bekerja harus melakukan dua hal sekaligus, yaitu menjadi produktif dengan bekerja di ranah publik dan tetap mengurus urusan domestik. Hal ini akhirnya menimbulkan masalah baru yaitu perempuan terus saja bekerja untuk mengaktualisasikan dirinya, namun impiannya terbatas hanya bekerja saja dan menghasilkan pundi-pundi ekonomi agar mendapat penghargaan dan perlakuan yang lebih baik dari suami serta tidak menggantungkan hidupnya kepada laki-laki. Sedangkan cita-cita perempuan harus terkubur mati bersama tumpukan beban yang terus saja membuatnya mati perlahan.

Candraningrum (2014) menegaskan bahwa bila perempuan pulang ke rumah sehabis pekerjaan formalnya, maka ia akan mengerjakan tugas pekerjaan shift kedua di rumah. Ia menegaskan ini adalah takdir yang sangat tragis bagi perempuan, bukan dikarenakan perlawanan atau ketidaksukaan akan pekerjaan domestik, melainkan perempuan membutuhkan waktu untuk beristirahat, berefleksi dan menenun diri.

Perempuan Pekerja. Pada era tahun 1900-an, Raden Ajeng Kartini seolah berdiri kokoh sendirian melawan tradisi yang membatasi perempuan Jawa dalam mengakses pendidikan. Dalam perjuangannya, ia terus berbicara tentang keterlibatan perempuan dalam sektor publik. Baginya perempuan harus setara dengan laki-laki dalam kesempatan memperoleh akses pendidikan. Kartini yakin bahwa pendidikan mampu mengubah cara pandang masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup perempuan. “Kartini memberontak terhadap feodalisme, poligami, dan adat istiadat yang mengukung perempuan. Dia yakin pemberian pendidikan yang lebih merata merupakan kunci kemajuan perempuan.” Perempuan dapat memilih pekerjaan dan meningkatkan kapasitasnya untuk meniti jenjang karier lebih tinggi. Perempuan juga dapat memilih semua potensi, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Kesempatan ini banyak digunakan oleh perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam ranah produktif. Perempuan telah resmi berkontribusi secara nyata dalam pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial dan politik. Namun, tidak sedikit pula perempuan bekerja karena terdesak tuntutan ekonomi dan bahkan menjadi tulang punggung keluarga.

Dewasa ini banyak perempuan yang bekerja, baik bekerja di luar rumah maupun bekerja dalam rumah. Perempuan banyak yang memimpikan bekerja dari rumah sembari tidak meninggalkan statusnya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dilakukan agar beban ganda yang melingkupi perempuan berkurang. Pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi idaman

sebagian perempuan seperti, berdagang di rumah membuka toko atau kios, menjadi pengrajin, penjahit dan bahkan menulis. Salah satu contoh kaum perempuan yang bekerja di luar rumah adalah perempuan yang bekerja sebagai pemecah batu suplit di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil penelitian Darmin Tuwu (2015) menemukan bahwa kondisi kaum perempuan yang bekerja sebagai pemecah batu suplit sangat memprihatinkan, disebabkan oleh upah kerja yang diterima sangat rendah, meskipun jam kerja relatif panjang dan penuh resiko. Kondisi tersebut membuat kaum perempuan pemecah batu suplit kesulitan untuk mengangkat harkat dan martabat, kesulitan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, sehingga mereka secara terus menerus berada dalam “kondisi kerentanan dari kemiskinan.” Berbeda dengan hasil penelitian Darmin Tuwu, Irwan Abdullah (2001) meneliti tentang perempuan yang bekerja di industri kerajinan dekat rumah. Ia menjelaskan bahwa ada empat keuntungan bekerja di industri kerajinan dekat rumah.

Pertama, pekerjaan industri kerajinan memberikan kemungkinan bagi perempuan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehingga tidak mengganggu tugas rumah. *Kedua*, pekerjaan industri kerajinan dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan kewajiban perempuan sebagai ibu karena pengasuhan anak tetap dapat dilakukan. *Ketiga*, industri kerajinan juga melibatkan anggota rumah tangga (terutama suami dan anak-anak) sehingga dapat meringankan beban perempuan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai pekerja. *Keempat*, penyelesaian tidak terikat pada waktu dan jam kerja sehingga dapat dikerjakan di sela-sela pekerjaan rumah tangga. Sayangnya usaha ini di dalam dimensi kultural ekonomi kita masih dianggap pekerjaan sampingan, bukan pekerjaan utama.

Tampaknya, pekerjaan yang dilakukan dalam rumah masih diidentikkan dengan pekerjaan yang tujuannya membantu ekonomi keluarga, bukan menjadi pilihan ekonomi utama keluarga. Walaupun pendapatan yang diterima oleh perempuan yang terlibat dalam industri menurut Irwan Abdullah (2001) adalah memiliki arti penting dalam penghasilan rumah tangga. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa pekerjaan kerajinan merupakan pekerjaan sampingan, justru kegiatan kerajinan memberikan upah yang lebih besar.

Perempuan dan Ekonomi Keluarga. Peran perempuan dalam memenuhi ekonomi keluarga yang bekerja di kawasan wisata Bahari Pantai Batu Gong di Kabupaten Konawe, telah mengarah kepada persamaan peran dengan kaum laki-laki. Persamaan ini tidak lagi terbentur oleh belenggu sistem nilai sosiokultural, yaitu tidak lagi mengikuti pandangan tradisional yang menempatkan perempuan pada sektor domestik saja. Peran perempuan telah mengalami perkembangan tidak hanya identik dengan “sumur, dapur, dan kasur” tetapi telah memasuki ranah publik.

Keberadaan wisata Bahari Pantai Batu Gong memberikan kesempatan kerja, peluang usaha, kemandirian, dan produktivitas ekonomi yang lebih besar bagi kaum perempuan yang tinggal di lokasi ini. Dari 297 orang perempuan yang masuk dalam angkatan kerja, sebagian besar mereka terlibat dalam sektor publik dengan cara membuka usaha, berdagang aneka makanan dan minuman dan penyediaan berbagai layanan jasa bagi wisatawan. Aktivitas kaum perempuan dalam bidang ekonomi mempunyai relevansi yang signifikan terhadap upaya emansipasi perempuan, bahwa perempuan yang bekerja telah memberi kontribusi yang besar pada perekonomian keluarga. Pendapatan yang diperoleh oleh kaum perempuan yang bekerja setiap bulan bervariasi antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 2.500.000. Perbedaan besaran pendapatan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya pengunjung yang datang dan jenis pekerjaan

yang mereka lakukan. Jam kerja mereka dari pagi hingga sore hari setiap hari. Namun pengunjung yang ramai adalah pada hari Sabtu, Minggu, dan hari-hari libur lainnya. Meskipun pekerjaan yang dilakoni oleh para perempuan pekerja tersebut masih tergolong sebagai pekerjaan sampingan karena status kerja mereka membantu suami bekerja, dan untuk menambah pendapatan suami, namun hasilnya cukup signifikan dalam membantu penghasilan keluarga dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga sehari-hari.

Suami-suami perempuan yang bekerja ini ada yang bekerja sebagai penjual, nelayan, petani, buruh tani, dan aneka pekerjaan serabutan lainnya yang mana penghasilannya juga pas-pasan. Melihat kondisi suami demikian, membuat para isteri bekerja memanfaatkan peluang yang ada di desa mereka tinggal, serta mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Peran perempuan dalam pemenuhan ekonomi keluarga yang bekerja di kawasan Pariwisata Bahari Pantai Batu Gong di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, terwujud setelah kaum perempuan yang berstatus sebagai isteri dan ibu rumah tangga tersebut membuka usaha, bekerja, dan mengelola pekerjaan secara mandiri dan mempunyai pendapatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh dari berusaha tersebut kemudian dimanfaatkan oleh perempuan yang bekerja tersebut untuk pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga. *Pertama*, menambah penghasilan suami dan pendapatan keluarga; *Kedua*, untuk keperluan belanja keluarga sehari-hari; *Ketiga*, untuk keperluan biaya sekolah anak-anak; dan Terakhir, sebagian ditabung untuk keperluan penting keluarga lainnya.

Menambah Penghasilan Suami. Usaha ekonomi sektor informal berupa penjualan makanan, minuman, dan pelayanan jasa yang dilakukan oleh kaum perempuan di kawasan Wisata Bahari Pantai Batu Gong adalah menguntungkan kaum Perempuan, sehingga pendapatan yang mereka peroleh dapat berperan menambah penghasilan suami dan juga menambah

penghasilan keluarga. Pernyataan tersebut sebagaimana dikatakan oleh informan penelitian yang bernama Nurma (32 tahun), pendidikan Sekolah Dasar, Agama Islam, dengan jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3 orang anak. Usaha ekonomi yang dilakukan adalah menyewakan ban dalam (pelampung untuk alat bantu berenang pengunjung), menjual makanan tradisional berupa sate pokea dan gogos, serta menjual aneka jenis minuman. Pendapatan sekitar Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Berikut kutipan wawancara dengan informan penelitian:

“Kami sangat bahagia dan senang karena dapat bekerja dan memperoleh uang, dan bagi saya usaha ini bisa menjadi tumpuan pemenuhan ekonomi, termasuk sebagian besar keluarga yang tinggal di desa ini”. Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kaum perempuan dalam menjual dan melayani berbagai kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke lokasi Wisata Bahari Pantai Batu Gong, merupakan sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pembangunan tempat wisata telah merubah kondisi tingkat pendapatan sebagian besar keluarga di Desa Lalimbue yang mana mereka mampu memanfaatkan peluang usaha untuk melakukan usaha ekonomi untuk memperoleh penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tanggapan suami dan atau keluarga dari perempuan yang bekerja cukup beragam, namun tanggapan mereka bersifat positif dalam artian mereka setuju, mendukung, dan tidak merasa keberatan jika isteri mereka bekerja.

Terkait dengan tanggapan pihak suami atau keluarga dari perempuan yang bekerja di kawasan wisata Bahari Pantai Batu Gong, dapat disimak dari kutipan wawancara dengan salah seorang informan penelitian berikut ini:

“Saya ada punya isteri yang bekerja di tempat ini. Yang sana itu pak, namanya Nurma. Dia sudah lima tahun bekerja di sini. Dia jual-jual macam-macam di sini. Dia jual makanan, minuman, menyewakan tikar, dan menyewakan ban dalam mobil untuk pengunjung, untuk alat bantu berenang. Jujur saya sangat senang dia bisa bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri. Lumayan pak, membantu saya. Penghasilan isteri saya satu hari berkisar antara Rp 20.000 sampai Rp. 50.000. Tergantung ramainya pengunjung. Ya dia bisa bantu-bantu saya juga. Kami berdua bekerja sama-sama cari uang. Tapi pendapatan saya sedikit pak, kadang tidak cukup untuk keperluan belanja keluarga, makanya dengan bekerjanya isteri saya, saya merasa ikut terbantu (Wawancara dengan Hendri, 37 tahun)”.

Berdasarkan pada hasil wawancara dapat diketahui bahwa tanggapan suami dan atau anggota keluarga dari perempuan yang bekerja sangat positif. Tidak ada penolakan atau perasaan keberatan dari seorang suami jika isteri mereka bekerja di luar rumah. Malah yang terjadi sebaliknya yaitu justru para suami dan atau anggota keluarga dari perempuan yang bekerja merasa senang. Isteri bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Tidak ada konflik dan atau pertengkaran antara suami dan isteri disebabkan oleh karena isteri yang bekerja. Pertengkaran suami isteri tidak terjadi, dan rumah tangga perempuan yang bekerja tetap terjaga dan harmonis. Hal ini disebabkan karena isteri yang bekerja dan mempunyai anak, masih bisa mengatur dan mengelola rumah tangganya, mengurus anak-anak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya.

Melalui aktivitas ekonomi kaum perempuan yang membuka usaha di lokasi wisata Bahari Pantai Gong, dari usaha ekonomi tersebut kemudian perempuan memperoleh

penghasilan sendiri, secara otomatis akan menambah penghasilan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Kondisi semacam ini akan melahirkan kemandirian kaum perempuan serta berakibat pada berkurangnya ketergantungan ekonomi kaum perempuan terhadap suami. Hal ini dapat merubah bentuk relasi suami-isteri dari pola hubungan yang semula bersifat relasi subordinat dan superordinat (hubungan yang bersifat vertikal-dominatif), berubah menjadi pola hubungan yang bersifat horizontal setara dan pola hubungan kemitraan.

Kebutuhan Keluarga Sehari-hari. Dalam sebuah rumah tangga, seorang suami dituntut untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup keluarga sehari-hari. Seorang suami yang telah berkeluarga (beristeri dan memiliki anak) mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok isteri dan anak-anaknya. Kebutuhan pokok utama sehari-hari dimaksud seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Namun terkadang, dalam kenyataan seorang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya disebabkan oleh faktor kurangnya penghasilan yang diperoleh suami, atau dapat juga disebabkan oleh karena jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seorang suami tidak dapat menghasilkan uang yang cukup banyak untuk membiayai belanja keluarga. Dalam keadaan kekurangan dan keterbatasan pendapatan tersebut, mendorong isteri untuk membantu suami bekerja untuk menambah pendapatan keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh informan yang bernama Sri Utami (27 tahun), pendidikan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, beragama Islam dan mempunyai 1 orang anak. Ia menekuni usaha menjual sate pakea dan gogos selama lima tahun dengan pendapatan sekitar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut ini:

“Saya pak dan teman-teman perempuan saya, kami banyak di sini ini semua mencari dan berusaha. Seperti saya pak, saya menjual sate dan gogos, ibu-ibu yang lain ada yang menjual makanan, minuman-minuman seperti kopi, teh; ada juga ibu-ibu yang menjual rokok, permen-permen, kacang goreng, kacang rebus; ada juga ibu-ibu yang menjual kue-kue, menyewakan ban, pokoknya banyak sekali macamnya pak, Bapak bisa lihat sendiri mereka. Sejak lokasi wisata pantai ini dibuka untuk umum, banyak pengunjung yang datang ke sini. Karena itu kami berinisiatif untuk menjual-jual. Pendapatan kami di sini macam-macam pak, tergantung dari banyak-ramainya pengunjung, dan banyaknya kami laku. Pendapatan saya satu bulan tidak menentu, tapi berkisar antara Rp 500.000-Rp 750.000 per bulan. Uang yang kami dapat tersebut digunakan untuk membantu suami, untuk keperluan belanja rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya senang bisa bekerja membantu suami dan memenuhi belanja keluarga sehari-hari.

Berdasarkan pada hasil wawancara dapat diketahui bahwa motivasi dan tujuan dari kaum perempuan ibu-ibu rumah tangga yang bekerja sebagai penjual sate pakea, gogos, air mineral, dan penyedia jasa (sewa ban dalam untuk alat bantu berenang dan sewa tikar) bagi para pengunjung di tempat wisata Bahari Pantai Batu Gong di Desa Lalimbue Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe adalah alasan utama mereka adalah kebanyakan alasan ekonomi. Dalam hal ini mereka bekerja di samping untuk membantu suami yang bekerja dimana penghasilan suami mereka pas-pasan, juga karena perempuan ibu-ibu rumah tangga tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan untuk memenuhi kebutuhan belanja keluarga sehari-hari lainnya.

Selain faktor kekurangan dan keterbatasan pendapatan yang diperoleh oleh suami, juga karena faktor tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari yang terus meningkat, keadaan inilah yang mendorong para perempuan ibu-ibu rumah tangga ini berinisiatif mandiri dan bekerja di sektor publik. Di tempat yang lain, kondisi serupa mendorong kaum perempuan bekerja, ada yang bekerja sebagai buruh tani dan nelayan, ada yang menanam sayur sebagai pekerjaan alternatif. Mereka menanam sayur, kunyit, jahe dan pisang. Hasilnya lumayan memuaskan, karena setiap bulan selalu ada sayur yang dipanen dan terkadang sebagian di jual di pasar. Paling tidak mereka tidak lagi membeli sayur untuk memasak, sebab tinggal memetik saja di pekarangan rumah. Semua upaya yang dilakukan oleh kaum perempuan tersebut di samping untuk membantu suami, memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup keluarga. Pada akhirnya tetap kokoh dan bertahannya sebuah rumah tangga keluarga bukan hanya tanggung jawab suami semata, tetapi juga isteri. Karena itu, peran dan tanggung jawab perempuan sebagai isteri dan ibu rumah tangga semakin besar, perempuan tidak hanya identik dengan kata “sumur, dapur, dan kasur” tetapi juga dapat berperan lebih besar di sektor publik.

Keperluan Biaya Sekolah Anak. Budaya dan adat istiadat perdesaan terkait perempuan selalu dikonotasikan sebagai manusia pekerja domestik (*homemaker*) yang dinilai tidak dapat berkontribusi secara aktif di luar rumah, sehingga perannya tidak lebih dari sekadar aktivitas dalam rumah. Perempuan dianggap tidak pantas memimpin dalam pekerjaan karena dinilai sebagai makhluk yang terlalu menggunakan perasaan dan sulit mengambil keputusan dengan bijak. Pendapat di atas tidak selamanya benar, karena faktanya kita dapat menjumpai di daerah perkotaan dan perdesaan, jamak ditemukan perempuan yang berjuang dan bekerja di sektor publik di luar rumah, utamanya di sektor informal, untuk

membantu perekonomian rumah tangga, termasuk perempuan bekerja untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan masyarakat, kaum perempuan telah terlibat penuh dan mempunyai peran yang sama penting dengan suami untuk memperbaiki kehidupan anak-anaknya, sehingga anak-anak mereka kelak memiliki kehidupan dan kemampuan ekonomi yang lebih baik. Salah satu faktor untuk mencapai kehidupan dan masa depan yang lebih baik tersebut adalah melalui pendidikan. Kesadaran dan peran perempuan terhadap pentingnya pendidikan anak-anaknya sebagaimana diutarakan oleh informan penelitian. Sebagai contoh kasus, misalnya ibu-ibu penjual sate pakea, lontong, gogos, mie siram, rokok, minuman, makanan ringan, snack, dan permen. Meskipun mereka hanya menjual dan menjajakan jualan kaki lima, tetapi mereka optimistik dengan masa depan anak-anaknya. Dengan penghasilan pas-pasan, yaitu sekitar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu) per bulan, tetapi dia berusaha menyisihkan sebagian pendapatannya untuk biaya sekolah anak-anaknya. “Saya suruh dan paksa anak-anak saya untuk bersekolah agar hidup mereka tidak susah dan lebih baik dari saya. Biar saya capek, saya rela kerja apa saja yang penting halal demi sekolah anak-anak saya. Kalau mereka mau belajar dan sekolah, berarti ada masa depan”.

Kutipan wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa kaum perempuan mempunyai kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan anak-anaknya. Meskipun hari-hari mereka capek bekerja dan bersusah payah menjajakan jualan mereka, bahkan berjalan kaki hingga puluhan kilo meter jauhnya, namun mereka “rela” melakukan semua pekerjaan itu demi sekolah, pendidikan, dan masa depan anak-anaknya. Kaum perempuan, ibu-ibu rumah tangga ini sadar betul bahwa pendidikan merupakan tangga, media, dan sarana paling logis dan realistis untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan mencapai masa depan yang cerah. Sebagaimana dikatakan oleh

Haryatmoko (2008) bahwa sekolah diandalkan sebagai tempat efektif untuk menaiki jenjang sosial (*social mobility*). Melalui sekolah orang berharap akan memperbaiki kehidupannya baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun posisi dalam hierarki sosial. Imajinasi republikan Perancis mengembangkan gambaran mobilitas sosial dalam tiga generasi: kakek petani, orangtua guru, anak menjadi intelektual (penulis), pemimpin perusahaan atau pejabat. Dengan demikian, sekolah juga merupakan media untuk meningkatkan status sosial ekonomi keluarga. Keberhasilan pendidikan anak di masa depan dapat membuka peluang terjadinya mobilitas sosial vertikal (*vertical social mobility*) bagi anak dan keluarga.

Investasi masa depan Keluarga Lainnya. Penghasilan perempuan ibu rumah tangga yang bekerja, di samping menambah penghasilan suami dan keluarga, keperluan belanja kebutuhan keluarga sehari-hari, keperluan biaya sekolah anak, juga dapat digunakan untuk biaya kesehatan, membeli perhiasan, dan ditabung. “Kalau saya tidak menabung, kasian kalau ada keperluan mendesak, ke mana lagi saya harus meminjam uang?” Pernyataan tersebut merupakan kutipan wawancara dari salah seorang informan penelitian. Ibu-ibu rumah tangga yang menjual di kawasan Wisata Bahari Pantai Batu Gong ini mempunyai kesadaran akan pentingnya dan keutamaan menabung atau menyimpan sebagian uang. Kepandaian perempuan dalam menyimpan uang ini sekaligus merupakan kepandaian dalam mengelola ekonomi rumah tangga. Bahwa suatu saat nanti akan tiba waktunya di mana kita sebagai keluarga rumah tangga akan mengalami yang namanya “masa krisis” atau masa kekurangan uang, baik kekurangan yang disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak yang membutuhkan pemenuhan segera seperti biaya musibah, biaya sakit untuk berobat (kesehatan), biaya sekolah, biaya sosial, dan biaya untuk kebutuhan-kebutuhan penting lainnya. Tabungan adalah simpanan uang yang sangat membantu keluarga rumah

tangga terutama ketika keluarga mengalami yang namanya krisis dan bencana.

Betapa banyak kasus, perempuan lebih “bisa” menyimpan uang ketimbang laki-laki. Dari sekian bukti yang bisa dirujuk antara lain misalnya Muhammad Yunus (2007), lebih percaya kepada ibu-ibu dan perempuan miskin untuk diberikan pinjaman sebagai modal usaha di India, sampai akhirnya Muhammad Yunus bersama ibu-ibu berhasil mendirikan Grameen Bank di India. Demikian pula Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial dalam program bantuan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) lebih percaya, sehingga memberikan kepada ibu-ibu yang menerima bantuan pencairan uang tunai PKH ketimbang laki-laki (Tuwu, 2018).

Tampaknya, spirit Nabi Yusuf AS ada pada diri kaum perempuan, bahwa Nabi Yusuf AS mampu menyelamatkan negeri Mesir dari krisis dan bencana besar berupa kekeringan dan kelaparan berkepanjangan. Berkat kepintaran dan kecerdasan Nabi Yusuf AS dalam menyimpan dan mengelola harta kekayaan negeri Mesir, maka ketika terjadi “masa krisis dan masa kekeringan yang berkepanjangan”, Nabi Yusuf AS mampu menyelamatkan rakyat Mesir dari bahaya kelaparan dan kemiskinan. Tulisan ini menegaskan bahwa peran perempuan yang bekerja di luar rumah sektor publik sangat besar. Para perempuan yang bekerja ini ingin merubah pemikiran masyarakat yang sudah terlanjur tertanam selama ini bahwa perempuan secara ekonomi tidak memberikan kontribusi bagi keluarga.

Epilog. Masalah ekonomi adalah tanggung jawab suami. Selama ini perempuan dilekatkan dengan “sumur, dapur dan kasur”, namun seiring dengan perkembangan zaman, stereotipe tersebut sudah mulai bergeser. Peran perempuan yang dahulu hanya berkaitan dengan sektor domestik, sekarang telah bergeser ke sektor publik. Hal ini sejak awal 1900-an sudah

disuarakan oleh RA Kartini bahwa kaum perempuan harus bangkit dari sektor domestik ke sektor publik.

Memerangi ketidakadilan sosial sepanjang sejarah kemanusiaan, selalu menjadi tema menarik dan tetap akan menjadi tema penting dalam setiap pemikiran dan konsepsi kemasyarakatan di masa mendatang, termasuk tema ketidakadilan terhadap perempuan. Perjuangan ketidakadilan terhadap kaum perempuan dimulai sejak era Kartini. Kartini telah berjuang untuk membebaskan kaum perempuan dari diskriminasi gender. Kaum perempuan tidak hanya bekerja mengurus anak di rumah, tetapi juga bisa bekerja di sektor publik. Aktivitas domestik sudah sejak lama dilekatkan pada perempuan dan ini telah membudaya. Perempuan selalu dikonotasikan sebagai manusia pekerja domestik (*homemaker*) yang dinilai tidak dapat berkontribusi secara aktif di luar rumah sehingga perannya tidak lebih dari sekadar aktivitas dalam rumah. Wacana tersebut dinilai sebagai wacana usang yang tidak dapat dibuktikan secara nyata, karena banyak perempuan telah mengambil bagian penting di ranah produktif.

Hasil penelitian ini paling tidak dapat menjadi bukti penting bahwa peran perempuan di ranah publik semakin mengemuka. Peran perempuan Desa Lalimbue semakin besar dengan berinisiatif membuka usaha ekonomi dengan memanfaatkan peluang bisnis di kawasan Wisata Bahari Pantai Batu Gong. Meskipun kiprah perempuan baru sebatas usaha ekonomi sektor informal, namun upaya tersebut patut diapresiasi karena perempuan mau berusaha dan bangkit bekerja di luar rumah untuk membantu ekonomi rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pada masa mendatang, peran perempuan di sektor publik agar lebih dikedepankan lagi dengan memasuki peluang usaha lebih banyak lagi, tidak hanya bekerja di sektor informal tetapi juga dapat bekerja di tempat strategis seperti di sektor formal pemerintahan. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga dapat diwujudkan.

BIBLIOGRAFI

- Sayogyo. “Pemikiran tentang Kemiskinan di Indonesia: Dari Masa Penjajahan Sampai Masa Pembangunan”. Prisma: Majalah Pemikiran Politik, Sosial dan Ekonomi. Nomor 3, (Tahun XII, 1993).
- Ken, Suratiyah, dkk. Dilema Wanita Antara Industri Rumah Tangga dan Aktivitas Domestik. Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- Sajogyo, Pudjiwati. Peranan Wanita Dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Kesselmen, Amy dkk. Women Images and Realities, A Multicultural Anthology, Second Edition. California: Mayfield Publishing Company, 1999.
- Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.
- Saptari, Ratna, dan Holzner Brigitte. Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial; Sebuah Pengantar Studi Perempuan. Jakarta:
- Kalyanitra, 1997. Budiman, Manneke. “Bapak Rumah Tangga: Menciptakan Kesetaraan atau Membangun Mitos Baru?”. Jurnal Perempuan. Volume 18 No. 1, (Maret, 2013): 79-92.
- Candraningrum, Dewi. “Superwoman Syndrome dan Devaluasi Usia: Perempuan dalam Karier dan Rumah Tangga”. Jurnal Perempuan. Volume 18 No. 1, (Maret, 2014).
- Tuwu, Darmin. “Studi Aspirasi Warga Komunitas Miskin Penambang Batu dan Pemecah Batu Suplit di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan”. Etnoreflika (Jurnal Sosial dan Budaya Jurusan Antropologi FIB UHO). Volume 4, Nomor 1. (Februari, 2015): 702-709.
- Irwan, Abdullah. Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan. Yogyakarta: Tarawang Press, 2001. Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain dan Metode, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008. 29.

- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007.
- Haryatmoko. Sekolah: Untuk Semua atau Alat Seleksi Sosial? Reproduksi Kesenjangan Sosial Lewat Sekolah Perspektif Pierre Bourdieu. Yogyakarta: Jurusan Sosiologi FISIPOL UGM, 2008. 75 Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN: 1978-9726 (p); 2541-0717 (e) Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018).
- Yunus, Muhammad. Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan. Depok: Marjin Kiri, 2007.
- Tuwu, Darmin. “Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Kendari”. Makalah Dipresentasikan Dalam “Konferensi Nasional dan Kongres Asosiasi Pendidikan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial Indonesia Ke-IX” Tanggal 12 – 13 April 2018 di STISIPOL Candradimuka Palembang.

BAGIAN KELIMA: PERSAUDARAAN MADANI DAN PRONANGKIS

Peribadi

Peradaban manusia dibangun pelan-pelan, tidak tiba-tiba langsung jadi canggih seperti sekarang. Dulu manusia hidup nomaden, alias berpindah-pindah. Manusia baru mulai hidup menetap dan memikirkan tempat tinggal setelah mereka menemukan cara bercocok tanam, sekitar 10 ribu tahun yang lalu. Inilah salah satu sejarah awal munculnya pertanian dan peternakan

Tulisan ini merupakan salah satu permasalahan yang tertuang dalam penelitian penulis tentang Kinerja Pengelolaan Zakat dan Transformasi Sosial Ekonomi (1999) di Kota Kendari. Dalam konteks ini adalah terfokus pada penggambaran keberadaan Persaudaraan Madani (PM) sebagai Program alternatif yang pernah dikedepankan oleh Pemerintah Kota Kendari dalam menanggulangi kemiskinan. Penelitian dikembangkan dengan pendekatan pembangunan partisipatif (*participatory development approach*) melalui proses *participatory action research*, *in depth interview*, dan *focus group discussion* serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan Persaudaraan Madani (PM) dalam mempersaudarakan antara orang kaya yang awalnya sebanyak 69,8 persen dengan orang miskin sebanyak 30,2 persen. Kini, tingkat kemiskinan di Kota Kendari telah menurun hingga mencapai sebanyak 7 persen. Namun patut disayangkan karena ketika terjadi pergantian kepemimpinan, maka program PM tersebut tidak berkelanjutan.

Berbagai strategi dan program pembangunan yang telah dikembangkan sehubungan dengan pengentasan kemiskinan mulai dari program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai pada program inovatif Pemerintah Kota Kendari. **Pertama**, Program Pemerintah Pusat terdiri atas pemberian bantuan dan perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (RASKIN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Demikian pula program Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), dan Pengembangan Daerah Tertinggal (PDT), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (P2MK) dan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akan tetapi, potret kemiskinan masih terus menjadi ontologi kajian yang dianggap menarik, sehingga terus menjadi proyek yang mendatangkan keuntungan bagi aktor dan aktrisnya.

Kedua, Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui program inovatif H. Nur Alam dan H. Saleh La Sata sebagai gubernur dan wakil gubernur yang terpilih menggantikan Ali Mazi, SH dalam bentuk Pengobatan Gratis di Rumah Sakit Daerah Provinsi sampai pada rawat inap kelas 3, Pembebasan Biaya Pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Pemberian Dana *Block Grant* sebesar 100 juta kepada seluruh wilayah kelurahan/pedesaan se-Sulawesi Tenggara. Akan tetapi, program tersebut juga dihentikan ketika terjadi pergantian kepemimpinan.

Ketiga, program inovatif yang demikian spektakuler sehingga mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, yakni pemberian kredit mikro kepada ina-ina (perempuan tua) pedagang kaki lima dalam bentuk Dana Bergulir dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Persaudaraan Madani yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Selain itu,

juga diberikan pelayanan kesehatan secara gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) kepada seluruh warga masyarakat Kota Kendari serta Pemberian Beasiswa secara khusus kepada siswa dari kalangan keluarga miskin yang berprestasi (Peribadi dan Bakri Yusuf, 1999). Tentu saja ketika kita mengacu dari beberapa program penanggulangan kemiskinan tersebut, maka mungkin saja ada orang yang berkata bahwa virus kemiskinan akan terkubur. Meskipun kenyataannya jauh panggang dari api, karena justru yang tampak adalah proses pemiskinan terus berlangsung dengan berbagai problematikanya.

Faktor Determinan Kemiskinan. Menurut Peribadi dan Bakri Yusuf (1999) bahwa paling kurang ada 5 (lima) dimensi yang menjadi penyebab menggeliatnya gejala kemiskinan di tengah kehidupan sosial ekonomi warga masyarakat sehari-hari, termasuk di Kota Kendari. **Pertama**, kemiskinan dalam konteks politik kerap kali menjelmah karena faktor keberadaan wadah organisasi yang belum mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka senantiasa berada pada posisi *inferiority* yang berdampak negatif pada proses *bargaining position*.

Kedua, selain faktor budaya yang seringkali diklaim sebagai penyebab utama terjadinya kemiskinan, juga gejala degradasi nilai budaya sebagai pilar *capital social* terus berlangsung (Soetrisno, 1997). Proses dekulturisasi sebagai implikasi sosial dari proses pembangunan berbasis idiologi pembangunanisme selama ini, membuahkan telaah kritis dari kalangan konstruksionisme interpretatif dan postmodernisme kritis. Pada gilirannya, Korten kemudian memunculkan teori pembangunan berpusat kepada rakyat (*people centered development*) yang menekankan kepada kesejahteraan manusia, keadilan dan kelestarian pembangunan serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup manusia (Baldacci, dkk., 2008; Peribadi, 2015).

Terkait dengan peningkatan kualitas hidup (*quality of life*) manusia, dan cara mengatasi masalah kemiskinan yang dialami masyarakat, Muhammad Yunus (2003) menawarkan konsep “kewirausahaan sosial” atau *social entrepreneurship* sebagai sebuah konsep yang sukses membawa perubahan besar secara multidimensional pada masyarakat miskin khususnya kaum perempuan di Bangladesh. Konsep ini adalah tidak hanya mampu membebaskan kaum perempuan Bangladesh dari kemiskinan, tetapi juga mampu membongkar belenggu diskriminasi “*Apartheid finansial*” terhadap orang miskin khususnya kaum perempuan melalui Grameen Bank.

Ketiga, kemiskinan dalam konteks sosial ekonomi yang pada umumnya mengedepan dan sangat terasa dampak negatifnya terhadap upaya kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini terjadi karena faktor rendahnya penghasilan di tengah melambungnya harga bahan-bahan sembako. Seiring dengan itu, dampak kemiskinan ekonomi tersebut terasa semakin pahit bagi warga masyarakat yang mengalaminya, karena di tengah penderitaan mereka terjadi kesenjangan yang menganga lebar dalam bentuk polarisasi kehidupan sosial ekonomi antara segelintir orang yang “*the have*” dan mayoritas orang yang “*the have not*”. Sementara itu, orang-orang yang kategori kaya terkesan belum banyak menyadari urgensi Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) sebagai warga negara dan sebagai hamba Tuhan yang harus memenuhi kewajibannya (Kamaluddin, 2014; Peribadi, 2015).

Keempat, kemiskinan yang mencuat ke permukaan, baik yang terjadi pada ruang lingkup sosial budaya maupun pada ruang lingkup fisik karena faktor lingkungan dalam bentuk sikap, perilaku dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Akibatnya, selain adanya kecenderungan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang tidak berbasis lingkungan, juga keberadaan

lingkungan sosial budaya cenderung terabaikan karena lebih mengutamakan lingkungan fisik (Sahoo, 2015).

Kelima, permasalahan kemiskinan karena faktor ketimpangan kepemilikan aset sebagai modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumber daya manusia (*human capital*), peralatan kerja, dana, hunian atau perumahan dan sebagainya. Dalam konteks ini, erat kaitannya dengan masalah ketimpangan struktural dan kultural yang telah cukup lama berlangsung di tengah bangsa dan negara tercinta ini (Yerimias, 1995; Kartasasmita, 1996; Baswir, 2003).

Makna Konseptual. Masyarakat Madani yang dalam bahasa Inggris disebut *civil society* merupakan potret masyarakat beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata *madani* sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya *civil* atau *civilized* (beradab). Demikian pula, istilah masyarakat madani merupakan terjemahan dari *civil* atau *civilized society* yang berarti potret masyarakat yang berperadaban. Konsep masyarakat madani merupakan konsep yang bersifat universal, sehingga perlu adaptasi dan disosialisasikan ketika konsep ini hendak diwujudkan di Indonesia. Pasalnya, karena konsep masyarakat madani lahir dari masyarakat asing. Artinya, apabila konsep ini akan diaktualisasikan dalam wacana masyarakat Indonesia, maka diperlukan suatu paradigma baru ¹.

Konsep terjemahan tersebut pertama kali dikenalkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim, melalui ceramahnya di Simposium Nasional pada tahun 1995. Konsep yang diciptakan oleh Anwar Ibrahim ini ingin menunjukkan bahwa masyarakat idealnya memiliki peradaban yang maju. Lebih tepatnya, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sebuah sistem sosial yang subur. Sedangkan ahli filsafat Petrus mengungkapkan bahwa masyarakat madani bisa diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam memaknai kehidupan².

Besar harapan agar menjelmah potret masyarakat yang damai, sejahtera, terbuka, maju, dan modern atau yang lebih dikenal dengan istilah Civil Society. Sebaliknya, bukan gambaran sebagai masyarakat totaliter yang menginjak-injak akan hak asasi manusia. Karen itu, masyarakat madani merupakan suatu kondisi yang senantiasa diidam-idamkan oleh semua lapisan masyarakat di negara Indonesia. Adapaun beberapa tantangan yang harus mampu dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk menggapai suasana kehidupan madani adalah:

1. mengembangkan sikap demokratis yang bukan hanya mengenai pembentukan individu untuk mempunyai harga diri dan berbudaya serta memiliki identitas sebagai bangsa Indonesia yang bhinneka. Akan tetapi juga dalam rangka menumbuhkan sikap demokratis, maka perlu didukung oleh suatu sistem yang juga mengembangkan sikap demokratis.
2. menumbuhkan sikap toleran sebagai potret budaya Indonesia yang bhinneka dan toleran dari setiap anggota masyarakat. Sikap toleransi tersebut harus dapat diwujudkan oleh semua anggota dan lapisan masyarakat, sehingga terbentuk suatu masyarakat yang kompak dan beragam serta kaya akan ide-ide baru.
3. memiliki sikap saling pengertian sebagai gambaran masyarakat demokratis yang menghargai perbedaan pendapat. Karena itulah, maka diperlukan pengetahuan dan penghayatan mengenai kebhinnekaan tersebut.
4. berrakhlak tinggi dan mulia karena beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun masyarakat Indonesia yang bhinneka dengan beragam nilai-nilai budayanya, tetapi menunjukkan ciri khas sebagai refleksi masyarakat Indonesia yang beriman.

Semua agama yang hidup dan berkembang di Indonesia adalah mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi.

5. menggambarkan manusia dan masyarakat yang berwawasan global di Tengah gelombang kehidupan baru dalam melenium ketiga sebagai masyarakat global yang ditandai oleh kemajuan teknologi serta perdagangan bebas. Kehidupan global tersebut memberikan kesempatan dan peluang yang baru tetapi juga tantangan-tantangan yang semakin sulit dan kompleks, sehingga meminta kualitas sumber daya manusia Indonesia yang bukan saja menguasai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Akan tetapi juga terampil dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul akibat gelombang globalisasi tersebut. Kini, hampir semua masyarakat diseluruh dunia menginginkan kehidupan demokrasi partisipatoris sebagai potret masyarakat yang menghendaki rakyatnya supaya berkemampuan untuk ikut serta dalam membangun masyarakatnya sendiri³.

Sementara itu, Program Penanggulangan Kemiskinan yang terkenal dengan istilah “Pronangkis” tampak dan terdengar dalam berbagai bentuk yang telah dicanangkan oleh pemerintah nasional dan daerah. Apakah itu Pronangkis dalam bentuk klaster satu seperti: 1. Program Keluarga Harapan (PKH) 2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) 4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) C. Demikian pula, Pronangkis dalam bentuk klaster dua berupa: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam konteks PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Perdesaan, R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruks Pulau Nias, PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness

Development Initiative), PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas, PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP), Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP), PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) khusus bagi Masyarakat Papua, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK), PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP), PNPM-Mandiri Pariwisata, PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim). Sedangkan Pronangkis klaster tiga seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama (KUBE).

Strategi Persaudaraan Madani. Menurut Nuhung yang dikutip Peribadi (2015) dalam buku: “Gagasan, Pikiran dan Harapan Alumni Fakultas Pertanian, Unhas (2012) bahwa beberapa model pengentasan kemiskinan secara partisipatif yang pernah berkembang di beberapa negara, yakni: (1) *Grameen Bank* di Bangladesh yang didirikan oleh Muhammad Yunus pada tahun 1983; (2) *Gerakan Sravodaya Sramadana* di Srilangka yang didirikan oleh A.T. Ariyaratna seorang pendeta Budha; (3) *4-H. Organisasi perdesaan* di Amerika Serikat sebagai sebuah organisasi pemuda yang bertujuan hidup mandiri; (4) *Saemual Undong* di Korea Selatan yang diperkenalkan pada tahun 1970 oleh Presiden Park Chung Loo sebagai salah satu program pembangunan pedesaan di Korea Selatan; dan (5) *DOI MOI Vietnam* sebagai kebijakan yang diletakkan oleh Ho Chi Minh pendiri Partai Komunis Vietnam untuk mencapai iklim yang mendukung dunia usaha. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Kendari membentuk lembaga kredit mikro yang disebut BLUD, karena diilhami oleh *Grameen*

Bank sebagai sebuah lembaga keuangan yang didirikan oleh Muhammad Yunus.

Ada dua Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) sebagai program lokal yang pernah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Kendari di bawah kepemimpinan Asrun-Musaddar yang kini telah memasuki periode kedua (periode pertama tahun 2007-2012 dan periode kedua tahun 2012-2017). Kedua program yang dianggap spektakuler dan mendapat apresiasi dari banyak kalangan ini, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan Kota Kendari secara signifikan. Betapa tidak, proses penurunan angka kemiskinan menurut versi Bappeda Kota Kendari (2012) terlihat sejak tahun 2006 dari sebanyak 30.500 (12,51%) jiwa turun menjadi 27.500 (10,15%) pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 dari sebanyak 23.600 (8,53) turun lagi hingga mencapai 23,203 orang (8,2%). Demikian pula pada tahun 2011 terus mengalami penurunan hingga mencapai sebesar 22.125 jiwa atau sebanyak 7,40 persen. Penurunan angka kemiskinan tersebut adalah signifikan dengan keberadaan wadah BLUD dan Persaudaraan Madani.

Persaudaraan Madani merupakan program spesifik Pemerintah Kota Kendari yang berniat suci untuk mempersaudarakan warga miskin sebanyak 30,2 persen dengan orang mampu sebanyak 69,8 persen. Sehingga dari sebanyak 30,2 persen Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kota Kendari pada Tahun 2008 diharapkan turun hingga mencapai sebanyak 16 persen RTS pada tahun 2012. Hal itu diakui sudah tercapai, sehingga menurut Wakil Wali Kota Kendari dan sekaligus sebagai Ketua TKPKD Kota Kendari bahwa:

“Kesenjangan sosial ekonomi yang menganga lebar antar kaum elite politik/birokrat dengan rakyat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dimaksud oleh Prof. Masihu Kamaluddin (2014) tidak terjadi di wilayah Kota Kendari. Karena keberadaan program Persaudaraan

Madani (Permadani) tersebut telah berhasil mengeliminir kesenjangan sosial ekonomi itu” (Peribadi, 2015)

Secara kualitatif, memang tidak bisa dipungkiri bahwa masih sebagian besar penghuni bangsa ini belum menikmati kue pembangunan secara adil. Akan tetapi, secara kuantitatif tingkat kemiskinan telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meskipun tingkat persentase diskursus kemiskinan produksi cenderung menurun, dan secara tidak langsung mengabaikan potret ketimpangan sosial. Akan tetapi, konstruksi berpikir kita sudah seperti itu adanya, sehingga harus diakui bahwa penduduk miskin di Kota Kendari pada beberapa tahun terakhir tampak mengalami penurunan, dan bahkan pada tahun 2011 terus mengalami penurunan hingga mencapai sebesar 22.125 jiwa atau sebanyak 7,40 persen (Bappeda Kota Kendari, 2012)

Pembuatan program persaudaraan madani diinspirasi dari QS. Al Maa’un ayat 1-3 ini bahwa “kita semua adalah tergolong sebagai pendusta agama, ketika kita tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin” adalah dijalankan dengan konsep operasional dan metode “*One Help One*” yang berarti bahwa satu keluarga mampu (*muzakki*) dapat membantu satu keluarga tidak mampu (*mustahiq*) yang kemudian disepakati melalui penandatanganan Akta Persaudaraan Madani oleh keduanya.

Paling tidak, ada 2 (dua) pertimbangan mendasar atas keberadaan program Persaudaraan Madani di Kota Kendari. **Pertama**, dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan serta membangun kesadaran “ibadah sosial” antar sesama masyarakat kota, maka antara lain diperlukan sebuah pola pemberdayaan alternatif kepada warga masyarakat untuk membelajarkan diri dalam konteks saling asah-asih dan asuh.

Kedua, pola pemberdayaan dimaksud adalah didasarkan pada konsep tata kehidupan sosial yang paripurnah yang bersumber dari penjabaran nilai-nilai agama yang secara sosiologis bahwa manusia senantiasa hidup berkelompok dan

saling membutuhkan antara satu sama lain, sehingga tercipta tata kehidupan sosial yang integral, independen dan harmonis serta melembaga dalam sebuah Program Persaudaraan Madani yang kelak mengkristal menjadi sebuah budaya (Dielaborasi dari Peraturan Wali Kota Kendari, No. 17 Tahun 2008).

Sungguh-sungguh mengagumkan, karena sejak tahun 2008 sudah sebanyak 156 warga masyarakat Kota Kendari yang tergolong mampu dan tidak mampu telah sukses gemilang dipersaudarakan oleh program Persaudaraan Madani pada tahun 2008. Menurut informasi yang berhasil diperoleh dari Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPM-PK) Kota Kendari bahwa hingga kini jumlah warga Kota Kendari yang telah dipersaudarakan terus meningkat hingga telah mencapai ribuan orang yang telah dipersaudarakan antara orang yang mampu (*muzakki*) dengan orang yang tidak mampu (*mustahiq*) di Kota Kendari.

Besar harapan yang terdengar dalam beberapa pandangan informan bahwa apabila program Permadani tersebut benar-benar mengkristal dan dikelola dengan baik, maka dalam waktu sesingkat-singkatnya jumlah warga masyarakat miskin di Kota Kendari akan terus berkurang. Tampaknya, ikhwal inilah yang memang terkesan mengobsesi pemikiran pucuk pimpinan Pemerintah Kota Kendari di bawah kepemimpinan Asrun-Musaddar.

Meskipun sebaliknya, disayangkan pula oleh beberapa informan dari kalangan dewan pimpinan Pemerintah Kota Kendari itu sendiri bahwa selain program penanggulangan kemiskinan belum terpadu dalam bentuk Program Keterpaduan (PAKET) di antara berbagai program yang ada, juga diakui bahwa dalam proses persaudaraan dimaksud dirasakan adanya nuansa doktrinasi oleh pihak pimpinan terhadap bawahan. Dalam konteks ini, menurut Ir. Musaddar Wakil Wali Kota Kendari bahwa tampaknya program Persaudaraan Madani hanya berkutat di seputar arena birokrasi pemerintahan Kota Kendari.

Seharusnya gerakan tersebut mengkristal kepada seluruh warga, sehingga tercipta keikhlasan dan ketulusan di antara warga masyarakat yang telah dipersaudarakan (Peribadi dan Bakri Yusuf, 2009).

Secara fenomenal, meskipun program ini juga ada sebagian informan yang mengklaim semu, karena ketika seseorang tidak lagi menjadi pejabat dan apalagi telah dilengserkan dari jabatannya. Maka ketika itulah "saudara madaninya" langsung terabaikan dan hubungan persaudaraan menjadi terputus. Dari sudut pandang teori dramaturgis, maka berarti "persaudaraan semu" seperti itu dapat diklaim sebagai tindakan sosial yang cenderung "hipokrit". Meskipun demikian, keberadaan program keagamaan tersebut telah menggambarkan sebuah kecerdasan spiritual dari seorang pemimpin yang berniatan suci untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Hanya saja, menurut salah seorang mantan Korkot PNPM MP Kota Kendari dan kini sudah berada di tingkat KMW Sultra, bahwa salah satu kelemahan program ini adalah bersifat *top-down* dalam bentuk penunjukan kepada Kepala Dinas untuk mencari saudara madani masing-masing. Selain itu, aspek yang menjadi sasaran utama bagi program Persaudaraan Madani telah termaktub dalam konsep Tri Daya PNPM MP.

Sebaliknya, beberapa sasaran aspek perhatian PNPM MP tidak ditemukan dalam program Persaudaraan Madani. Karena itu, kelebihan dan kelemahan pada semua jenis bentuk penanggulangan kemiskinan di Kota Kendari harus diintegrasikan di bawah payung TKPKD. Namun amat disayangkan, karena sepertinya hal itu sulit untuk terwujud, karena faktor lemahnya *political will*" (Peribadi, 2015).

Selain itu, pandangan dari tokoh-tokoh agama juga berkembang dan terkesan sependapat bahwa "keberadaan Program Persaudaraan Madani yang sejatinya untuk memberdayakan golongan sosial kaum *mustahiq*, adalah

sesungguhnya merupakan tugas keagamaan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat selama ini”. Dalam konteks ini, berarti secara tidak langsung keberadaan Persaudaraan Madani telah mengambil alih tugas kemuliaan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah. Meskipun demikian, tidak ada salahnya jika berkembang asesoris kemanusiaan yang dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi, tidak boleh dilupakan bahwa upaya penguatan kapasitas kelembagaan terhadap Lembaga Amil Zakat, tidak boleh terabaikan dan bahkan juga sangat penting ditumbuhkembangkan” (Peribadi, 2015).

Besar harapan agar kehadiran program Persaudaraan Madani dapat memenuhi target tingkat penurunan kemiskinan sebanyak 5 persen setiap tahun sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Kendari. Namun disayangkan, karena program inovatif tersebut tidak terintegral dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya, sehingga masing-masing program terkesan jalan sendiri-sendiri. Hal ini terjadi, karena TKPKD tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara pada konteks internal dalam program Persaudaraan Madani itu sendiri adalah dibutuhkan sebuah payung hukum dalam kerangka penataan program Persaudaraan, sehingga di antara mereka yang telah dipersaudarakan itu dapat memahami masing-masing hubungan sosial yang tercipta sebagai saudara madaninya (Peribadi dan Bakri Yusuf, 2009).

Persaudaraan Madani sebagai bagian integral dari implementasi penerapan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) yang apabila berfungsi maksimal sebagaimana mestinya, maka besar dugaan dapat menjadi program penanggulangan kemiskinan yang demikian familiar dan spektakuler dan berhasil untuk menanggulangi kemiskinan umat Islam di Kota Kendari dan sekitarnya. Karena itulah, secepatnya diperlukan studi evaluasi untuk mempelajari harmonisasi persaudaraan madani

antara kaum *muzzakki* dan kaum *mustahiq*, terutama manfaat positif yang telah dirasakan oleh masing-masing kelompok sosial dengan mengkaji indikator-indikator perubahan dalam bentuk kemajuan sosial ekonomi yang telah dialami atau dirasakan oleh saudara madani yang tergolong tidak mampu, termasuk perubahan dalam konteks amalan ibadah. Misalnya, jika pada awalnya sebelum dipersaudarakan secara madani masih ada yang belum melaksanakan shalat 5 waktu, maka ketika mereka sudah dipersaudarakan telah melaksanakan shalat dan ibadah-ibadah lainnya. Dengan demikian, manfaat positif yang diperoleh kaum *mustahiq* yang sudah berubah menjadi kaum *mezzakki* tidak hanya dalam bidang sosial dan ekonomi saja, tetapi juga tampak dalam perilaku ketaatan dan keshalehan pribadi dalam menjalankan ajaran agama.

Meskipun memang ada saja sinyalemen yang terdengar kurang sejuk. Akan tetapi, pada umumnya mereka mengakui bahwa Persaudaraan Madani merupakan wadah kekeluargaan antara keluarga mampu dengan keluarga yang tidak mampu yang dilakukan atas kesadaran sosial yang tinggi untuk mengangkat derajat kehidupan saudaranya yang tidak mampu melalui pola pemberdayaan dan pembinaan yang tidak terbatas dengan penuh keikhlasan, sehingga terwujud tatanan kehidupan sosial yang harmonis dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirnya, informasi belakangan atas keberadaan Persaudaraan Madani dapat disimak dari pernyataan seorang staf pengajar Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang melakukan penelitian disertasi tentang Persaudaraan Madani di Kota Kendari. Menurutny bahwa:

“Seiring dengan perkembangan waktu, hingga awal tahun 2016, program Persaudaraan Madani telah berkembang pesat, tidak hanya dari segi jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program Persaudaraan Madani, tetapi juga dalam aspek cakupan dan jangkauan program persaudaraan madani. Pada

tahun 2008, ketika program Persaudaraan Madani pertama kali digulirkan di periode pertama pemerintahan Asrun-Musadar (2007-2012), pendekatan program Persaudaraan Madani lebih bersifat *top down* karena sasaran yang dipersaudarakan adalah masyarakat miskin yang dipersaudarakan dengan para pejabat eselon II dan eselon III serta pegawai negeri sipil (PNS) dalam lingkup pemerintah Kota Kendari. Namun pada periode kedua pemerintahan Asrun-Musadar (2012-2017), jangkauan dan sasaran program Persaudaraan Madani bukan hanya berasal dari pejabat dan PNS Pemkot Kendari tetapi juga telah menjangkau kalangan dunia usaha, bisnis dan masyarakat luas. Pada periode kedua ini pendekatan program lebih bersifat *bottom-up* karena iniatif persaudaraan sepenuhnya berasal dari dunia usaha, bisnis, dan masyarakat. Disamping itu pula, peserta Persaudaraan Madani pada periode kedua pemerintahan Asrun-Musadar sudah bersifat lintas sektoral, lintas agama, lintas etnis, lintas budaya, dan lintas profesi. Bahkan sejak tahun 2013, Pemkot Kendari telah memperluas jangkauan program Persaudaraan Madani dengan menysasar pelajar sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) melalui “Program Persahabatan Madani”, yakni program yang mempersaudarakan siswa mampu dengan siswa tidak mampu. Salah satu kewajiban siswa mampu dalam program persahabatan madani adalah membantu memenuhi kebutuhan siswa tidak mampu yang telah menjadi saudaranya agar sekolahnya berhasil, misalnya dengan membantu memberikan buku tulis, pakaian seragam sekolah, sepatu, tas, dan lain-lain (Darmin Tuwu, Wawancara Kamis, 25 Februari 2024).

Hal yang sangat mengejutkan dan sekaligus menggembirakan bahwa setelah program Persaudaraan Madani Pemkot Kendari berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun (2008-2016), maka tanggal 23 Februari 2016 Pemerintah Kota Bandung melalui walikotanya Bapak Ridwan Kamil mencetuskan program “*Family Help Family*”. Program ini secara substansial hampir sama dengan program Persaudaraan Madani. Intinya adalah membantu sesama mengatasi kemiskinan, yaitu “satu keluarga kaya membantu satu keluarga miskin”. Bentuk bantuan yang diberikannya bisa berupa bantuan modal usaha, bantuan untuk biaya pendidikan, bantuan untuk biaya kesehatan, dan lain-lain.

Epilog. Sungguh besar harapan bagi Pemerintah Kota Kendari untuk dapat menanggulangi kemiskinan di wilayahnya, karena semakin banyaknya peluang program yang dapat diakses oleh masyarakat miskin yang masih terdapat pada 10 wilayah kecamatan serta 64 wilayah kelurahan. Tak pelak lagi, jika dana ZIS dapat dikelola secara maksimal, baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kota Kendari dan sekitarnya.

Program inovatif bagi Pemerintah Kota Kendari yang dimaksudkan untuk memberi pinjaman modal usaha kepada masyarakat bawah, adalah dilatari oleh tingginya angka kemiskinan serta sulitnya pedagang kecil dan menengah untuk mengakses modal usaha. Atas dasar itu, maka Pemerintah Kota Kendari membentuk lembaga kredit mikro yang diilhami oleh *Grameen Bank* sebagai sebuah lembaga keuangan yang didirikan oleh Muhammad Yunus sang Penerima Nobel dari Bangladesh itu.

Demikian pula, program Persaudaraan Madani merupakan program spesifik Pemerintah Kota Kendari yang berniat suci untuk mempersaudarakan warga miskin sebanyak 30,2 persen dengan orang mampu sebanyak 69,8 persen. Sehingga dari sebanyak 30,2 persen RTS Kota Kendari pada

Tahun 2008 diharapkan turun hingga mencapai sebanyak 16 persen RTS pada tahun 2012. Hal itu diakui sudah tercapai oleh pihak Pemerintah Kota Kendari.

Pola pemberdayaan dimaksud adalah didasarkan pada konsep tata kehidupan sosial yang paripurna dan bersumber dari penjabaran nilai-nilai agama. Secara sosiologis bahwa manusia senantiasa hidup berkelompok dan saling membutuhkan antara satu sama lain, sehingga tercipta tata kehidupan sosial yang integral, interdependen dan harmonis serta melembaga dalam sebuah Program Persaudaraan Madani yang kelak mengkristal menjadi sebuah budaya”. Demikianlah substansi makna konsep pemberdayaan: *“help people to help them selves”*.

BIBLIOGRAFI

- Baldacci, Emanuele, dkk., Social Spending, Human Capital and Growth In Developing Countries, World Development Vol. 36, No. 8, pp. 1317–1341, 2008.
- Bappeda Kota Kendari, 2012.
- Baswir, Revrisond, dkk., 2003, Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Kamaluddin, Masihu, 2014, Dengan Persatuan Kita Membangun Kesejahteraan Sulawesi Tenggara, Orasi Ilmiah Pada Acara Silaturahmi Akbar, KAHMI Se Sulawesi Tenggara, 3 September 2014, Hotel Clarion Kendari.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES, Jakarta.
- P2KP Kota Kendari, Laporan Progres Kegiatan P2KP Kota Kendari, Agustus Tahun 2008.
- Peribadi dan Bakri Yusuf, 1999. Kinerja Pengelolaan Zakat dan Transformasi Sosial Ekonomi (1999) di Kota Kendari, Sebuah Rancangan Siklus Perencanaan Partisipatif Menuju Cita-Cita Masyarakat Madani Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Peribadi, 2015. Reconstruction of Participatory Paradigm Based on ESQ Power, A Strategy of Power Overcoming in Kendari City, South East Sulawesi, Lambert Academic Publishing (LAP), Germany.
- Sahoo, Bappaditya, 2015. Social Forestry - A Case Study Of The District Of North 24-Parganas In West Bengal” International Journal of Research – Granthaalayah, Vol. 3, No. 6 (2015).
- Soetrisno Loekman, 1997, Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan,. Kanisius. Yogyakarta.

Yerimias, T. Kaban, Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, Prisma No. 10 1995, LP3ES, Jakarta.

Yunus, Muhammad, 2003. *Banker to the Poor: Micro-lending and the Battle against World Poverty*. PublicAffairsTM.

Internet

1. <https://www.mendeley.com/catalogue/ddd6a0c0-be25-3029-b326-8ef35084fc11/>
2. <https://www.gramedia.com/literasi/masyarakat-madani/>
3. <https://media.neliti.com/media/publications/121296-ID-konsep-masyarakat-madani-dii-indonesia-d.pdf>

BAGIAN KEENAM: REVITALISASI PRANATA SOSIAL DAN KEMISKINAN PETANI

Peribadi

Jika bagi Weber tindakan merupakan perilaku yang bermakna dan diarahkan kepada orang lain. Maka bagi Schutz tindakan merupakan durasi transenden dalam perbuatan anak manusia.

Kajian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah formulasi strategis dengan cara mengintegrasikan serta mensitesiskan antara pola perencanaan khas tradisional yang disebut *Meobu-Obu* dengan Musrenbang sebagai pola perencanaan pembangunan partisipatif yang selama ini berlangsung di wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan. Upaya rekonstruksi dan refungsionalisasi pranata sosial perdesaan tersebut dikembangkan melalui studi komunitas, studi partisipatif dan studi kasus secara eklektik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan Musrenbang cenderung berlangsung formalistis untuk sekedar menggugurkan aspek proseduralnya. Sementara pranata Kalosara masih terus berkuat di ranah ritualistik *un sich*, sehingga sakralisasi budaya Kalosara belum masuk ke wilayah pembangunan. Dalam konteks inilah, maka tulisan ini menawarkan sebuah formulasi Musrenbang berbasis nilai budaya Kalosara untuk digunakan ke depan dalam rangka membangun wilayah perdesaan serta mensejahterakan masyarakat perdesaan, khususnya bagi mereka yang menempati wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengembangan potensi wilayah perdesaan melalui berbagai strategi, terutama pembenahan pertanian moderen yang

berlandaskan pada pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), harus bertitik tolak dari upaya revitalisasi kelembagaan dan pranata sosial perdesaan. Betapa tidak, potensi sosial kapital petani kita yang pernah dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat di waktu silam, namun saat ini telah terjadi perubahan sosial budaya dengan berbagai problematikanya. Betapa beragam dampak sosial dan asosial yang mencuat di balik kemajuan dan lompatan yang digapai secara kuantitatif selama modernisasi pembangunan nasional. Hal itu kemudian diperparah pada saat revolusi hijau diimplementasikan ke seluruh wilayah nusantara hingga ke pelosok negeri. Ironisnya, polarisasi serta kesenjangan sosial ekonomi mencuat beriringan dengan kian menipisnya lapisan kohesivitas masyarakat perdesaan.

Berbagai cetak biru pembangunan wilayah perdesaan yang terus direnovasi, termasuk dalam konteks program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) melalui berbagai jenis bantuan dana pemberdayaan, namun masih terkesan belum memperhatikan dan masih kurang memperhitungkan urgensi fungsi dan peran pranata sosial dan kelembagaan masyarakat perdesaan. Hal ini kemudian berakibat dan bahkan berujung pada bergesernya keberadaan lembaga adat (*indigeneous institution*) dan implikasinya pada sikap dan tindakan petani yang cenderung kontroversial. Pada akhirnya pula, perilaku orang-orang desa cenderung tidak lagi dipusingkan dengan keberadaan nilai pranata sosial sebagai mutiara kehidupan masyarakat perdesaan di masa lampau. Tentu saja hal ini, adalah bukan saja semata-mata berhasrat untuk mendekonstruksi sistem sosial perdesaan, tetapi juga memberi kesempatan bangkitnya tunas-tunas masa depan yang kelak menunjukkan perilaku penyimpangan di tengah warga masyarakat perdesaan (Peribadi, 2013).

Makna Konseptual. Revitalisasi sebagai upaya untuk menghidupkan kembali kawasan mati yang pada masa silam

hidup. Dalam artian, upaya mengendalikan dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota baik dari segi sosio-kultural, sosio-ekonomi, segi alam fisik lingkungan, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas lingkungan kota yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup dari penghuninya.

Revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal sebagai berikut. *Petama*, intervensi fisik Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung. Intervensi fisik ini perlu dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda atau reklame dan ruang terbuka kawasan (urban realm). Isu lingkungan (environmental sustainability) pun menjadi penting sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

Kedua, rehabilitasi ekonomi perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (local economic development) sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota. Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung rehabilitasi kegiatan ekonomi. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru).

Ketiga, revitalisasi sosial/institusional dan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*), bukan sekedar membuat *beautiful place*. Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial

masyarakat/warga (*public realms*). Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjiwa diri (*place making*) dan selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik (Saraswati dan Buchori, 2017).

Revitalisasi bertujuan untuk mengembalikan vitalitas ataupun daya hidup. Dalam konteks menyoal keberadaan kawasan kota dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembalikan vitalitas kawasan. Pada umumnya, revitalisasi kawasan kota dikaitkan dengan proses peremajaan kawasan, sehingga intervensi yang dilakukan dapat mencakup aspek fisik dan non-fisik, seperti ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Revitalisasi juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan baru yang produktif serta mampu memberikan kontribusi positif pada kehidupan sosial budaya dan terutama kehidupan ekonomi (kawasan) kota (Martokusumo, dalam Affif, 2020). Salah satu model revitalisasi pada kawasan perkotaan adalah retrofitting. *Retrofitting* adalah pendekatan revitalisasi yang berbasis *sustainable development*. Retrofitting bertujuan untuk memanfaatkan kembali secara tepat suatu objek sebagai salah satu cara untuk mengembangkan objek atau tapak perancangan (Dunham-Jones & Williamson, dalam Affif, 2020). Tampaknya, terdapat tiga prinsip strategi retrofitting, yaitu: (1) *Re inhabitation*, yaitu penggunaan ulang bangunan dengan konsep *adaptive reuse* pada bangunan yang ada untuk dapat menampung kegiatan masyarakat; (2) *Redevelopment*, yaitu pengembangan dan pembangunan berbagai macam bangunan dengan fungsi campuran, fasilitas transportasi yang bertujuan mengurangi ketergantungan kepada kendaraan bermotor dan kehidupan sosial yang lebih baik; (3) *Regreening*, yaitu penghijauan dalam bentuk ruang terbuka publik, taman dan dapat berupa berbagai perbaikan lingkungan.

Revitalisasi fisik tidak hanya perlu menyelesaikan keindahan fisik, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan

ekonomi komunitas dan pengakuan budaya yang ada. Karena itu, dalam konteks keberadaan sebuah pasar untuk menyelesaikan semua masalah perihal konvensional, adalah sangat dibutuhkan program revitalisasi pasar tradisional,. Hal ini penting, karena pasar konvensional dikelola tanpa inovasi, pasar tradisional belum dapat bersaing dengan pasar modern. Menurut Paskarina (dalam Mangeswuri & Purwanto, 2010) bahwa salah satu alasan untuk mempertimbangkan kerja sama untuk merevitalisasi pasar tradisional adalah pergeseran perspektif pasar dari tempat interaksi ekonomi ke ruang publik dengan penekanan utama pada upaya memperbaiki jalur distribusi komoditas yang diperjualbelikan.

Sementara itu, pranata sosial mengandung kepentingan sosial, ekonomi dan budaya. Dari segi sosial, dapat menjaga dan meningkatkan ikatan atau hubungan antar kerabat, teman dan tetangga dan dari segi ekonomi dapat mengurangi biaya produksi. Sedangkan dari segi budaya terkait dengan sistem nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Bentuk kerjasama ini mempunyai arti penting dalam kehidupan petani, terutama yang masih dicirikan oleh sifat-sifat tradisional. Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat petani, terutama yang dicirikan oleh sifat-sifat tradisional adalah selain tidak selalu kurang menguntungkan, juga terdapat nilai-nilai yang dapat menunjang pembangunan. Makanya, kebijakan-kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat, pasti mendapat respon dan apresiasi karena menunjang program-program pembangunan terlanjutkan (Suwartapradja, 2010).

Seiring dengan itu, menurut Sholeh, dkk., (2022) bahwa *tradisi mangkal luagh* merupakan pranata sosial yang tergolong ke dalam kinship atau domestic institutions yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal berupaya jiwa sosial yang tinggi, tolong menolong antar kerabat, kebersamaan, serta gotong royong. Memang tradisi mangkal luagh saat ini telah mengalami beberapa perubahan dalam konteks perubahan pada jumlah

pelaksana mangkal luagh, isyarat permintaan untuk melaksanakan mangkal luagh, dan perubahan bentuk pelaksanaan mangkal luagh yang terjadi di beberapa desa. Akan tetapi, tradisi ini pada masyarakat suku Pasemah di Bengkulu tidak bisa hilang karena bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga atau orang yang sedang melaksanakan resepsi pernikahan. selain itu mangkal luagh memiliki fungsi sebagai sarana dalam berinteraksi untuk menjalin silaturahmi antar kekeluargaan. Karena itulah, maka tradisi ini harus dijaga agar tidak hilang begitu saja seiring berjalannya waktu. Meskipun telah terjadi perubahan-perubahan karena faktor penyesuaian terhadap kemajuan zaman.

Sedangkan menurut Satria (dalam Zamzami, 2016) bahwa secara sosiologis, karakteristik komunitas nelayan adalah berbeda dengan komunitas-komunitas sosial lainnya sebagai akibat dari faktor perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi masing-masing. Dalam konteks ini, kaum nelayan menghadapi akses sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat *open access*, sehingga menyebabkan nelayan harus berpindah pindah untuk memperoleh hasil maksimal. Selain itu, kondisi sumber daya yang berisiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka. Maka pada gilirannya, memunculkan dinamika pranata sosial yang sangat mempengaruhi kearifan lokal sebagai strategi adaptasi yang memang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri untuk mengantisipasi masalah-masalah sosialnya. Karena itulah, maka pengembangan masyarakat nelayan melalui penguatan pranata sosial merupakan upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama nelayan untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan.

Tampaknya, sejumlah pandangan ahli terkemuka menyoal konsep kelembagaan dan organisasi, namun seluruhnya menitikberatkan bahwa kelembagaan dan organisasi berintikan

pada objek yang sama sebagai bentuk social form. Sebaliknya, kedua konsep ini berbeda sebagaimana ditegaskan Wiradi (2000) bahwa institusi dan organisasi itu berbeda karena faktor pola-pola kelakuan, norma-norma, fungsi dari tata kelakuan dan kebutuhan apa saja yang menjadi orientasi pada aspek institusi tersebut. Sedangkan pada aspek organisasi, di dalamnya terkandung unsur seperti struktur umum, struktur kewenangan/kekuasaan, alokasi sumber daya, aspek-aspek solidaritas, hubungan kegiatan dengan tujuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Pakpahan (1989) berargumen bahwa kedua konsep ini tidak bisa dipisahkan karena yang satunya disebut institusi berfungsi sebagai perangkat lunak (software) dan lainnya yang disebut organisasi berfungsi sebagai perangkat keras (hardware) dalam suatu bangunan grup sosial. Hal itu kemudian dipertegas oleh Nataatmadja (dalam syahyuti, 2002) bahwa kelembagaan dan organisasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab organisasi adalah perangkat keras dan kelembagaan ialah perangkat lunaknya. Pada dasarnya, ketiga pandangan tersebut, terkandung substansi makna yang sama dalam menyoal keberadaan kelembagaan dan organisasi, sehingga kita dapat menangkap kesamaan dan keberbedaan kedua konsep tersebut secara jelimet.

Tanpa menyoal persamaan dan perbedaan konseptual tersebut, maka Poerwanto (2008) menandaskan bahwa kunci utama persaingan produk pertanian Indonesia di masa akan datang adalah perlunya penyempurnaan kelembagaan petani dengan cara melakukan rekayasa sosial, penguatan kelembagaan, dan pendampingan dewan pakar agar dapat terus berkibar kerhidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Karena itu, betapa pentingnya pemanfaatan segala jenis dana pembangunan desa untuk memberdayakan masyarakat perdesaan serta sekaligus melakukan rekonstruksi pranata dan kelembagaan sosial dan pengembangan potensi sumber daya lainnya yang ada di sebuah wilayah perdesaan. Atas latar

pijakan itulah, maka tulisan ini dimaksudkan untuk mengusulkan suatu proses rekonstruksi terhadap pranata sosial perdesaan, sehingga pengadaan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi warga masyarakat perdesaan yang dananya bersumber dari Dana Desa serta dana kemanusiaan lainnya dapat terlaksana secara maksimal dan berdampak positif ke depan. Ikhwal ini sangat penting, karena dalam pandangan Collier, dkk., (1996) gegap gempita proyek modernisasi di zaman Orde Baru telah memuncratkan sejuta kekecewaan. Hal itu terjadi, karena sistem kelembagaan egaliter di wilayah perdesaan mengalami pergeseran, sehingga kemudian cenderung tertutup dan pada gilirannya bermuara kepada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat perdesaan.

Karena itulah, maka strategi pembangunan yang seyogyanya harus dikedepankan adalah pembangunan yang berorientasi kepada upaya penguatan kapasitas. Bagi Friedman (1992) kita harus berupaya mengembangkan proses pemberdayaan dalam konteks dimensi kekuasaan atau kekuatan sosial (*social power*), kapasitas politik (*political power/bargaining position*), dan potensi psikologis (*psychological power*). Sejalan dengan itu, Sugandhi (2008) berpendapat pendekatan partisipatoris itu merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan membangun dan potensi kelembagaan terhadap warga komunitas setempat dengan cara membelajarkan diri secara empirik dengan jalan melibatkan partisipasi warga masyarakat lokal dalam berbagai aspek kehidupan sosialnya. Atas dasar itulah, maka urgensi upaya revitalisasi atas pranata sosial dan formulasi khas proses penyelenggaraan Musrenbang harus mulai dikedepankan.

Musrenbang Berbasis Budaya Kalosara. Upaya refungsionalisasi budaya sebagai bagian dari proses rekonstruksi tergolong sebagai gebrakan sosial yang strategis agar dapat memperoleh jalan keluar terhadap penyelenggaraan program pembangunan di era sekarang maupun dan terutama di masa

depan. Tentu saja hal itu memungkinkan tercapai, karena nilai budaya itu sesungguhnya dapat menjadi pendorong dalam bentuk motivasi internal dan eksternal serta bahkan nilai budaya sangat berpengaruh untuk tampil sebagai pendorong dan penggebrak dalam mempercepat pergerakan individu dan pergerakan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun secara fenomenal, kini tampak sangat jelas terlihat nilai budaya itu tengah dijangkiti virus dekonstruksi sosial berupa proses degradasi, proses dekulturasi, proses despiritualisasi, demoralisasi, dehumanisasi, deforestasi, dan berbagai bentuk asosial dan inflasi moral lainnya. Dengan demikian, harus diantaskan kembali dalam sebuah formulasi strategis untuk difungsikan sebagai pilar-pilar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Arsyad, dkk., (2022) bahwa wacana tentang fungsionalisasi nilai-nilai budaya lokal Kalosara yang begitu sakral dalam pikiran dan hati nurani etnis Tolaki/Mekongga ke dalam program pembangunan, secara luas diduga berbagai program pembangunan yang diselenggarakan dengan melibatkan lembaga osara dan kelembagaan software dapat berlangsung dengan lancar, aman dan aspirasi. Alasan keberadaan Kalosara sebagai benda suci yang dikemas dalam bentuk upacara adat di tengah pembukaan musyawarah perencanaan pengembangan bukanlah semangat dan etos kerja masyarakat. Namun pada saat yang sama, mencegah perilaku penyimpangan aparaturnya dan mengantisipasi kebohongan publik seperti yang biasa ditunjukkan oleh aparaturnya pemerintah selama ini. Oleh karena itu, perlu diberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk bernegosiasi di ranah pembuatan politik terkait pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan melalui strategi pembangunan pedesaan dengan cara peningkatan kapasitas lokal dan melakukan hubungan eksternal (Hidle, 2019; Sénit, 2020).

Upaya perumusan strategis antara Musrenbang selaku demokrasi deliberatif yang perencanaannya berintikan pada

paradigma pembangunan partisipatif modern telah dipadukan dengan *Meobu-Obu* sebagai strategi perencanaan konvensional yang melembaga di dalam pranata sosial *Onapo/Okambo* di bawah kendali oleh *Toono Motua* sebagai seorang yang dituakan. Demikian halnya, di tingkat kecamatan (*Otobu*) dipandu oleh *Puu' tobu*, serta di tingkat Kabupaten oleh *Sapati* dan *Mokole* ataupun *Sangia* di tingkat Provinsi, sehingga proses penyelenggaraan Musrenbang dapat berlangsung sebagaimana yang didamba-dambakan oleh masyarakat. Karena itu, bertolak dari prinsip “Kultural Weberian” dan Spiritual Khaldunian, maka besar harapan agar upaya penyuntikan kekuatan nilai budaya *Kalosara* ke dalam pelaksanaan acara Musrenbang dapat membuahkan proses pertemuan dan pembicaraan serta perdebatan yang rasional, indah, damai, kondusif dan humanis rasional sebagaimana dikehendaki oleh Habermas sebagai penganut teori kritis dari kalangan *Mashaf Frankfurt*. Selain itu, juga besar harapan agar mampu menggerakkan dan membangkitkan kesadaran spiritualitas untuk memfungsikan Dana Desa secara efektif, jujur dan adil. Maka pada akhirnya, musyawarah untuk merencanakan berbagai program yang mendesak dan urgent adalah tidak lagi berlangsung secara rutinitas belaka dalam bentuk serimonial dan transaksional yang hanya menepiskan proses regulasinya. Akan tetapi, benar-benar dapat menjadi forum penanpungan aspirasi yang obyektif dan representatif serta konsisten.

Peralihlah teori perencanaan dari pola instrumental rasionalitas ke strategi komunikasi rasional, maka sudah saatnya kearifan lokal seperti nilai budaya *Kalosara* harus mulai dilibatkan pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Karena teori perencanaan sebagai perspektif khusus yang telah mengiringi pelibatan masyarakat dalam perencanaan melalui konsep dan praktek yang di antaranya disebut *advocacy planning*, *transactive*, *pluralism*, *communicative*, *collaborative*, dan lain-lain (Peribadi, dkk., 2019). Maka berarti secara

langsung dan tidak langsung serta suka atau tidak suka, local wisdom dan local knowledge lainnya harus disertakan secara partisipatif dan konstruktif.

Epilog. Proses penyelenggaraan Musrenbang adalah selain cenderung berlangsung secara formalistis dengan maksud untuk menggugurkan aspek proseduralnya, juga proses komunikasi yang berlangsung di dalam forum Musrenbang adalah cenderung tidak seimbang atau didominasi oleh pihak pemerintahan. Artinya, proses komunikasi rasional dimaksud Habermas cenderung tidak berlangsung sebagaimana mestinya atau seharusnya. Sementara pranata Kalosara yang masih sakral bagi warga komunitas Tolaki serta Mekongga di daerah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara, nampak masih terus terletak di ranah ritualistik. Artinya, hingga saat ini Kalosara belum dimanfaatkan dalam konteks pembangunan daerah, terutama dalam konteks pembangunan wilayah perdesaan.

Upaya memfungsikan nilai dan norma Kalosara ke ruang perencanaan pembangunan wilayah perdesaan, maka di akhir tulisan ini menawarkan suatu diskursus perumusan penyelenggaraan Musrenbang secara khas kultural di tingkatan *Onapo/Okambo* di daerah pedesaan, *Otobu/Puu' tobu* di daerah kecamatan serta *Sapati* di tingkatan kabupaten-kota dan *Mokole* ataupun *Sangia* pada tingkatan Provinsi. Hasil perumusan tersebut adalah tidak hanya merupakan proses sintetis yang bernuansa simbolistis, namun bisa menjadi kekuatan penggerak (*driving force*) dalam rangka membangkitkan enersi partisipatif serta energi keswadayaan warga di tengah kehidupan komunitas Tolaki/ Mekongga Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ikhwal terpenting disarankan dalam tulisan ini bahwa sebaiknya mulai saat ini warga masyarakat yang menempati atau menghuni wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara agar mulai mencoba menggunakan formulasi penyelenggaraan Musrenbang sebagai hasil rancangan sitentis

antara paradigma pembangunan konvensional dengan paradigma pembangunan moderen. Betapa kita yakini dan sangat percaya bahwa Kalosara yang sangat sakral pada pemikiran dan penghayatan batin bagi warga komunitas Tolaki/ Mekongga, dapat menjadi pengendali diri dan pengendalian sosial serta menjadi kekuatan penggerak (*driving force*) dalam menyelenggarakan serta melangsungkan kehidupan sosialnya.

BIBLIOGRAFI

- Affif, Aulia, Malik Revitalisasi koridor komersial bersejarah Jalan Surabaya dengan konsep retrofitting di Kota Medan, EMARA: Indonesian Journal of Architecture, Vol 6, No 1, 2020.
- Arsyad, M., Peribadi, & Monto, L. O. (2022). Structural And Cultural Strategies In Building Social, Economic, And Ecological Resilience Towards An Independent Society. *Pedagogia Social*, 2022(41).
- Buchori, Imam, 2017. Konsep Revitalisasi Pelabuhan Juwana Kabupaten Pati Indah Saraswati1, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Biro Penerbit Planologi Undip Volume 13 (1): 83-99 Maret 2017.
- Collier I. William, dkk. (1996). Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan: Kajian Pedesaan Selama Dua Puluh Lima Tahun. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Friedman. (1992). *Empowerment, The Politics Of Alternative Development*, Cambridge and Oxford: Blackwell.
- Mangeswuri, Dewi Restu dan Purwanto, Niken Paramita, 2020. REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 2 No. 1, Desember 2010.
- Pakpahan, Agus. 1989. Kerangka Analitik untuk Penelitian Rekayasa Sosial: Perspektif Ekonomi Institusi. Prosiding Patanas: Evolusi Kelembagaan Pedesaan di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian. Bogor: Pusat Penelitain Agro Ekonomi.
- Peribadi, dkk. (2021). Strategi Community Development Berbasis Kalosara, Sebuah Tinjaun Teoritis dan Praktikal, Edisi Revisi, (Anggota IKAPI), Mitra Cendikia Media, Sumatra Barat.
- Poerwanto, Roedhy. (2008). Membangun Pertanian Masa Depan: Meraih Keunggulan Pertanian Indonesia, dalam buku Pemikiran Guru Besar Institut Pertanian Bogor:

- Perspektif Ilmu-ilmu Pertanian dalam Pembangunan Nasional. Bogor: Penebar Swadaya (Anggota Ikapi).
- Sholeh, Muhammad, dkk., 2022. Kearifan Lokal Dalam Pranata Sosial Mangkal Luagh Pada Masyarakat Pasemah Di Bengkulu, Jurnal Ilmiah Korpus Vol. 6 No. 1, 2022, doi: <https://doi.org/10.33369/jik.v6i1.19737>.
- Suwartapradja, Opan S., 2010. Pranata Sosial Dalam Pertanian: Studi Tentang Pengetahuan Lokal Pada Masyarakat Petani Di Jawa Barat, Sosiohumaniora, Vol. 12, No. 1, Maret 2010 : 86 – 98.
- Syahyuti. 2002. Penelitian kelembagaan dan organisasi pertanian: konsep, metodologi, dan acuan kerja. <https://kelebagaandas.wordpress.com/penelitian-kelebagaan/syahyuti-2/>. Diakses tanggal 11 September 2019 pada pukul 19.30 WIT
- Sugandhi, Ayi. (2008). Pedoman Teknis Perencanaan Partisipatif PJM Pronangkis, PMU/Proyek,P2KP.www.p2kp.org/pustaka/files/modul_pelatihan08/D/1/e/Modul-Pembangunan-Partisipatif.pdf).
- Wiradi, Gunawan. (2000). Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan KPA dan Pustaka Pelajar.
- Zamzami, Lucky, 2016. Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Melestarikan Wisata Bahari, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Juni 2016 Vol. 18 (1): 57-67.

BAGIAN KETUJUH: URGENSI PENYELAMATAN EKOSISTEM DAN LINGKUNGAN SOSIAL: Sebuah Epilog

Muhammad Arsyad

Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan pelajaran preventif dan produktif tentang pemeliharaan lingkungan pada salah satu sabdanya: “Seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya“ (HR. Imam Bukhori).

Prolog. Menurut Peribadi (2023), dkk yang tertuang dalam buku Eksploitasi Kapitalisme Agraris Dan Urgensi Social Responsibility: Sebuah Diskursus Sosiologi Profetik bahwa proses eksploitasi yang berlangsung di berbagai ruang kehidupan sosial dan alam ini ada yang tampak terang-terangan, samar-samar, terselubung dan bahkan ada yang berlangsung secara kasar dan bengis. Lebih dari itu, ada yang berlangsung secara taktis dan strategis, sehingga orang-orang yang sebetulnya menjadi korban dari perlakuan itu, tetapi tidak merasa dikorbankan dan bahkan justru dianggap baik-baik saja sebagai sebuah permainan yang menghibur, dan apalagi jika membuahkan seenggok materi. Karena itu, tak terkecuali, para Kepala Daerah dan aparat pun diduga terperangkap ke dalam ruang eksploitasi kapitalisme agraris yang didendangkan oleh aktor dan aktris korporasi pertambangan dan sekaligus sebagai “cukong-cukong politiknya”.

Karena itulah, maka tidak mengherankan ketika menjelang abad ke XX hampir seluruh penduduk dunia dihadapkan pada kenyataan munculnya kerusakan lingkungan secara global. Kerusakan lingkungan yang dirasakan secara global misalnya adalah perubahan iklim yang dampaknya menyebabkan munculnya kerentanan lingkungan fisik (seperti pemanasan global, banjir, kekeringan, badai, penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan) dan juga kerentanan sosial-ekonomi masyarakat yang terdampak (seperti kemiskinan, kesulitan akses terhadap sumberdaya, kesehatan, peningkatan penyakit akut, dan kelangkaan pangan). Tampaknya, kerusakan tersebut telah mencapai batas-batas toleransi dan kemampuan adaptasi lingkungan dengan dampaknya yang tidak lagi sebatas lokal, tetapi juga telah menyentuh ranah global dan mondial.

Betapa kini, kita tidak hanya kehilangan satwa atau punahnya keindahan jenis lainnya nan mempesona itu. Akan tetapi, yang lebih fundementil adalah kita juga kehilangan rasa bersatu dengan alam semesta itu. Semua komponen masyarakat, terutama dari kaum elite daerah dan lokal seakan tidak peduli lagi dengan kesunyian dan satwa-satwa tersebut. Semuanya seakan terlena dan terhipnotis dengan seonggok materi yang berpacu seperti balapan mobil yang mendering dengan kecepatan tinggi, sehingga penghancuran hutan belantara terus berlangsung dengan tempo tinggi. Pada gilirannya, sudah pasti bencana kebakaran dan asap tebal akan menjadi titik kulminasi dari penghancuran tersebut. Inikah potret suram yang terus kita abaikan dan tidak peduli dengan apa yang akan terjadi nanti. Apakah kita akan terus mengejar kulit, gaya dan penampilan ketimbang isi, makna dan kedalaman. Apakah kita akan terus membiarkan kawula masa depan menjadi calon pasien rumah sakit jiwa ke depan ?

Dialektika Pemikiran. Gerakan penyelamatan lingkungan hidup di desa sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.

Penilaian jasa ekosistem di Zona Demonstrasi Hijau Terintegrasi Delta Sungai Yangtze menekankan pentingnya menyelamatkan lingkungan dan menyeimbangkan ekosistem untuk pengelolaan kawasan tepi air yang berkelanjutan (Cai et al., 2023). Efisiensi energi di gedung publik penting untuk penyelamatan lingkungan dan keseimbangan ekosistem, dengan memanfaatkan ICT untuk mengoptimalkan sistem HVAC guna menghemat energi tanpa mengorbankan kenyamanan dan kesehatan penghuni (Franco, 2020). Gerakan lingkungan berfokus pada keberlanjutan sumber daya alam dengan mengintegrasikan perlindungan lingkungan dalam kebijakan nasional, meskipun tantangan global seperti pemanasan global dan fenomena atmosfer abnormal tetap ada (Kumaresan et al., 2023). Pemantauan perubahan spasial-temporal akuakultur di Asia Tenggara mengungkapkan ekspansi awal yang cepat diikuti penurunan, dengan pola distribusi berubah, mendukung gerakan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam (Zhang et al., 2023). Dampak migrasi terhadap interaksi alam-masyarakat, kesenjangan sosial, dan adaptasi budaya dalam keberlanjutan, menunjukkan bahwa migrasi dapat mendukung gerakan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam (Adger et al., 2024).

Pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal memainkan peran kunci dengan memanfaatkan pengetahuan dan praktik tradisional yang telah terbukti efektif dalam menjaga alam. Pentingnya pengelolaan lingkungan dan pengetahuan masyarakat lokal dalam mengembangkan ekowisata berkelanjutan di Bur Telege melalui regulasi Qanun dan keterlibatan masyarakat setempat (Zainal et al., 2024). Penelitian sosio-ekologis di Nepal menunjukkan pentingnya pengetahuan lokal dalam pengelolaan lingkungan untuk mendukung adaptasi komunitas pada perubahan ketergantungan terhadap hutan dan agroforestry (Bardsley et al., 2024). Program layanan masyarakat memanfaatkan praktik tradisional dan lingkungan berkelanjutan untuk mengolah limbah anorganik

menjadi blok inovatif, mengurangi limbah, dan mendukung pembangunan komunitas berkelanjutan (Wulandari et al., 2023). Penelitian menginvestigasi kerajinan perak tradisional Melayu yang telah ada selama dua abad, mencerminkan budaya dan warisan komunitas dengan memanfaatkan praktik berkelanjutan yang terkait dengan lingkungan (Syed Ahmad et al., 2023). Studi mengevaluasi intensitas pengembangan dan pemanfaatan zona pantai Liaoning dengan mempertimbangkan karakteristik alami, penting untuk manajemen zona pesisir yang terpadu (G. Yu et al., 2024).

Menghormati budaya setempat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi, karena masyarakat desa memiliki ikatan emosional dan sosial yang kuat dengan lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi alam menjadi kunci utama dalam pengembangan pariwisata lokal yang berkelanjutan di Desa Tapulaga (Arsyad et al., 2024). Partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi di Bangka Belitung menunjukkan potensi integrasi hukum lokal untuk mengatasi masalah pertambangan timah ilegal (Rahayu et al., 2024). Ikatan emosional dan sosial yang kuat dengan lingkungan dipengaruhi oleh kondisi fisik dan sosial yang baik, terutama di Guangzhou, China, di mana perubahan cepat di pasar telah mengubah fundamental lingkungan perkotaan (Chang et al., 2023). Hubungan emosional dan sosial yang kuat di media sosial sering kali memberikan dukungan informasional dan emosional, mengkontraskan anggapan umum tentang pentingnya ikatan yang lemah dalam mendorong partisipasi (Krämer et al., 2014). Permainan daring memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial dan emosional serta membentuk ikatan emosional yang kokoh dengan lingkungan sosial (Akin, 2023).

Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti pertanian organik dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa.

Pilar-pilar sumber daya alam, inovasi, globalisasi, dan pertumbuhan hijau saling terkait, membentuk dasar bagi kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara BRICS (Huang, 2024). Penelitian mengkaji lanskap ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, dengan fokus pada sektor-sektor potensial untuk dikembangkan demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan Masyarakat (Simbolon et al., 2024). Pemanfaatan sumber daya alam kritis di Afrika untuk manufaktur yang berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan rantai pasok global dan kesejahteraan ekonomi global (Tochukwu Chinwuba Nwankwo et al., 2024). Studi tentang Dinamika spasial dan temporal transformasi sumber daya lahan pertanian di wilayah perbatasan Sino-Vietnam guna memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan terkait keamanan pangan dan kesejahteraan ekonomi (Pang et al., 2024). Meskipun Algeria kaya akan sumber daya alam, peningkatan produktivitas kerja di sektor pertanian menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan yang lebih baik (Khetib & Zemri, 2024)

Mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Manajemen proyek dalam implementasi program sosial dan lingkungan di Zona Arktik Rusia, berfokus pada pelestarian lingkungan, dan menimbulkan peningkatan kualitas hidup penduduk (Zaretsky & Kozyrev, 2024). Kontaminasi arsenik yang berasal dari alam dan aktivitas manusia memiliki dampak serius pada kualitas lingkungan dan kesehatan manusia, memerlukan penelitian mendalam untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup global (van Genuchten et al., 2024). Pengembangan sub-sipilisasi di Rusia bagian utara berhubungan erat dengan modernisasi ekonomi dan teknologi untuk pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup di wilayah tersebut (Zhukov et al., 2024). Penggunaan gel Aloe vera bersamaan dengan kitosan dalam pembuatan lapisan

makanan menunjukkan peningkatan signifikan dalam sifat fisikokimia, mekanik, dan antioksidan film edible, berpotensi menjaga kualitas dan umur simpan produk segar serta mendukung keberlanjutan lingkungan (Kaur et al., 2024). Bahwa pengelolaan padang rumput dengan metode aerasi dan pengendalian dapat mempertahankan keadaan alami serta meningkatkan kualitas lingkungan dan keberlanjutan ekonomi (Bajnok et al., 2024)

Namun realitas menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat setempat, menghambat gerakan penyelamatan lingkungan hidup di desa. Kenaikan harga energi yang signifikan sejak 2021 mendorong perubahan pandangan terhadap kemiskinan energi di Belanda, menunjukkan bahwa perumahan sosial dan kekurangan keuangan menjadi hambatan utama dalam partisipasi masyarakat pada transisi energi (Mulder et al., 2023). Bahwa hakim yang menangani kasus lingkungan tidak berorientasi pada perlindungan dan penyelamatan lingkungan, dengan hambatan utama berupa prinsip ultra-petita (Rochmani et al., 2023). Program Pengabdian Masyarakat di Desa Karangmalang Wetan bertujuan mengatasi hambatan dalam menjaga lingkungan hidup untuk menciptakan lingkungan sehat dan nyaman (Septiana et al., 2023). Perlu memahami hambatan-hambatan dalam menerapkan hukum adat di Indonesia dalam konteks penyelamatan lingkungan hidup yang diatur oleh hukum positif yang lebih kuat (Sembiring et al., 2022). Sistem energi hijau PV-FC dengan bantuan baterai diusulkan sebagai solusi untuk elektrifikasi pedesaan di Pakistan, mengatasi hambatan logistik bahan bakar dan harga diesel yang tidak stabil, serta menyelamatkan lingkungan dengan nol emisi (Khan et al., 2022).

Belum menerapkan secara optimal Pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal, terutama penggunaan tanaman endemik dan metode tradisional konservasi air.

Program Kotaku di Desa Penataban Giri Banyuwangi telah berhasil membangun fasilitas drainase dan sanitasi, mencerminkan upaya pengelolaan lingkungan tanpa kearifan lokal (Dedi, 2023). Pengelolaan lingkungan dengan menggunakan kearifan lokal, seperti yang terlihat di Banjarmasin, mengurangi penggunaan kantong plastik secara signifikan melalui regulasi dan pendekatan persuasive (Normalina et al., 2021). Perlu mengumpulkan dan melestarikan pengetahuan etnofarmasi berdasarkan penggunaan tanaman endemik oleh suku Tolaki-Mekongga dalam pengobatan tradisional mereka (Hadanu et al., 2022). Angola memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama pada famili Leguminosae, dengan banyak spesies endemik yang memiliki nilai ekonomi lokal, seperti untuk pengobatan tradisional, pakan ternak, dan bahan pangan (Catarino et al., 2022). Penggabungan perangkat kamera dan pemantauan akustik pasif untuk mengatasi kekurangan data signifikan terkait status perkembangbiakan dan karakter vokalisasi Flufftail Sayap-Putih, memperlihatkan keefektifan metode non-tradisional dalam konservasi (Colyn et al., 2020).

Pengabaian praktik pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya biodiversitas. Industri pemrosesan mineral krusial dalam ekstraksi sumber daya alam, berfokus pada ekonomi circular untuk mengurangi degradasi lingkungan dan memanfaatkan kembali limbah menjadi aset berharga (H. Yu et al., 2024). Green finance berperan penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi pedesaan dan keberlanjutan lingkungan dengan mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan mengurangi degradasi lingkungan (Liu, 2024). Bahwa strategi manajemen DAS terintegrasi untuk pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan di DAS Sungai Kalte, yang bertujuan mengurangi degradasi lahan melalui praktik pengelolaan terbaik seperti terasering (Moshe et al., 2024). Pertanian ekologis

dengan pendekatan kecerdasan buatan mendukung keberlanjutan sumber daya alam, mengurangi kerugian biodiversitas dan dampak lingkungan (Cheng, 2023). Perubahan iklim yang disebabkan aktivitas manusia dan siklus surya, serta hilangnya biodiversitas, mendorong perlunya praktik sumber daya alam berkelanjutan untuk memitigasi dampak-dampaknya (Badr & RI-Shazly, 2024).

Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya dapat menghambat upaya pelestarian yang efektif. Implementasi aliran lingkungan (e-flows) mendukung pelestarian sungai dengan mengatasi hambatan infrastruktur dan manajemen sumber daya air yang belum merata dan lambat (Arthington et al., 2023). Untuk mengeksplorasi kebijakan dan infrastruktur fisik yang mendukung aksesibilitas universal di lingkungan alam, yang mempertimbangkan tantangan keseimbangan dengan pelestarian lingkungan (Groulx et al., 2022). Ekspansi perkotaan di sepanjang Sungai Kuning di Zhengzhou menyebabkan kerusakan ekosistem, dengan rencana jaringan infrastruktur hijau diusulkan untuk mengatasi hambatan pelestarian lingkungan dan kebutuhan layanan ekosistem (Wang et al., 2022). Pemetaan korosivitas tanah membantu mengidentifikasi risiko kerusakan infrastruktur pagar, mendukung pelestarian lingkungan dengan mencegah migrasi hewan invasif, seperti dalam proyek rewilding Marna Banggara di Yorke Peninsula (Stiglingh et al., 2024). Peningkatan keanekaragaman hayati melalui infrastruktur hijau di kebun anggur di Waipara Valley, Selandia Baru, menghadapi hambatan seperti kurangnya apresiasi dan pengetahuan petani, serta biaya implementasi dan pengelolaan (Goodall et al., 2023).

Belum optimalnya sinergi antara pemerintah, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam program pelestarian lingkungan yang berkelanjutan di desa. Bahwa BIPVTGDPCM yang terintegrasi dengan PCM mengatasi kurangnya integrasi dalam pelestarian

lingkungan dengan efisiensi energi, pengurangan emisi CO₂, dan manfaat ekonomi jangka panjang di Rohtak, India (Sehrawat et al., 2023). Kurang integrasi dalam pelestarian lingkungan di DAS Ouricuri menyebabkan kondisi anoksik di beberapa titik dan risiko lingkungan tinggi, memerlukan intervensi segera untuk mengatasi tekanan dari sistem sanitasi dan pembangunan ilegal (de Sousa Junior et al., 2022). Bahwa penerapan Total Quality Management TQM dan Green Supply Chain Management GSCM di industri tekstil Pakistan meningkatkan kualitas produk, efisiensi operasional, dan pelestarian lingkungan, meski terkendala kurangnya integrasi dalam upaya pelestarian lingkungan (Manzoor, 2023). Sejak kemerdekaan 1962, meskipun konstitusi dan kebijakan Aljazair semakin menekankan pelestarian lingkungan, integrasi yang kurang efektif menghambat implementasi nyata dalam melindungi alam dari perubahan iklim (Tabti, 2024). Kurangnya integrasi dalam pelestarian lingkungan menyebabkan erosi ruang desa tradisional akibat urbanisasi, menghambat adaptasi dan kelangsungan tekstur spasial, serta kehilangan karakteristik unik desa tradisional di Xiaoxi, Hunan (Jiang et al., 2023).

Adapun solusinya adalah gerakan penyelamatan lingkungan hidup di desa dapat dilakukan melalui pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Bahwa revitalisasi kearifan lokal Maja Labo Dahu melalui penguatan program sosial, lembaga adat, dan pengawasan hutan penting untuk menyelamatkan lingkungan di Kabupaten Bima (Furkan et al., 2023). Peran penting kearifan lokal dalam konservasi sumber daya alam, menggabungkan antropologi lingkungan dengan praktik pertanian tradisional untuk mempertahankan harmoni ekologis (Kamakaula et al., 2023). Kebijakan pembangunan berkelanjutan di Tiga Luhak mendorong pelestarian dan pemanfaatan kearifan lokal Minangkabau sebagai nilai budaya dan pengetahuan asli yang mendukung pengembangan sumber

daya manusia (Efrizon et al., 2024). Sistem Mamar di Timor Barat sebagai kebijakan kearifan lokal untuk konservasi lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai nilai-nilai dan kondisi komunitas setempat (Lewoleba et al., 2023). Keterampilan dalam mengelola sumber daya alam di Simeulue, seperti kelapa, mencerminkan kearifan lokal, namun keengganan untuk memperbarui kebun kelapa akibat penghormatan terhadap warisan budaya memerlukan kesadaran komunitas untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (Nasution et al., 2024).

Melibatkan penggunaan praktik tradisional yang ramah lingkungan dan menjaga keberlanjutan ekosistem desa. Pengenalan teknologi pertanian ramah iklim di desa-desa untuk meningkatkan hasil dan ketahanan pangan, serta praktik pertanian tradisional, dapat meningkatkan keberlanjutan ekosistem desa (Dev et al., 2023). Bahwa untuk mengevaluasi keberlanjutan agroforestri tradisional Mamar di Timor Barat dengan menganalisis aset mata pencaharian masyarakat, kinerja lahan secara biofisik, dan nilai jasa ekosistem, menunjukkan perubahan dalam manajemen yang mengganggu keberlanjutan ekosistem desa (Ngaji et al., 2021). Praktik pertanian bergilir tradisional di Desa Hutan di Lembah Barak, Assam, India Timur Laut mengalami perubahan menuju sistem pertanian lain, menekankan pentingnya keberlanjutan ekosistem dalam beralihnya ke sumber penghidupan yang beragam (Chanu et al., 2023). Urbanisasi di kawasan Hindu Kush Himalaya (HKH) berdampak besar pada ekosistem desa; evaluasi data terpercaya diperlukan untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem (Chao et al., 2023). Pembangunan koridor ekologis untuk burung bangau putih di Chongming Dongtan membantu menjaga keberlanjutan ekosistem desa melalui optimalisasi pola habitat yang sesuai dan jaringan ekologis yang kuat (Xu et al., 2023).

Menjaga keseimbangan alam dan kepastian keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Pasar tenaga kerja sangat tergantung pada pendidikan akademik dan vokasional serta pelatihan lanjutan untuk mengatasi tantangan digitalisasi dan keberlanjutan, dengan pendidikan sebagai faktor kunci untuk memastikan daya saing nasional dan inovasi berkelanjutan (Fischer & Dörpinghaus, 2024). Transisi ke sumber energi bersih dan berkelanjutan penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan di masa depan (Pan et al., 2024). Membahas upaya meningkatkan pengelolaan produksi pertanian melalui penggunaan bijaksana sumber daya alam yang tersedia, untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dalam jangka Panjang (Borisova & Dimitrov, 2024). Keberlanjutan penggunaan sumber daya alam adalah tanggung jawab utama manusia terhadap kelestarian lingkungan, memastikan tersedianya kebutuhan generasi mendatang (Dr.KirtiDiddi & Dr.Vishwas Tiwari, 2024). Pemahaman tentang proses evolusi penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam demi masa depan yang berkelanjutan (Vázquez-Domínguez et al., 2024).

Kerangka konseptual untuk gerakan penyelamatan lingkungan hidup di desa berfokus pada pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Mengintegrasikan praktik tradisional ramah lingkungan yang telah terbukti menjaga keseimbangan alam, menciptakan lingkungan desa yang lebih sehat dan produktif, selaras dengan budaya dan nilai-nilai lokal, untuk mendukung keberlanjutan ekosistem desa. Mendorong partisipasi aktif komunitas dalam konservasi dan rehabilitasi lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan, serta memanfaatkan teknologi tepat guna yang sejalan dengan prinsip-prinsip kearifan lokal. Memastikan keberlanjutan sumber daya alam dengan menetapkan aturan pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan, sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Hipotesis bahwa mengintegrasikan praktik tradisional ramah lingkungan dengan teknologi tepat guna akan meningkatkan keberlanjutan ekosistem desa. Partisipasi aktif komunitas dalam konservasi melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kearifan lokal akan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Hal ini berkontribusi terhadap keberlanjutan ekosistem dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Epilog. Satu-satunya kata yang meski terasa tidak enak didengar oleh semua pihak bahwa sesungguhnya eksploitasi hutan belantara pegunungan merupakan bom waktu yang cukup misterius, sehingga cepat atau lambat bakal memborbardemen penghuni bumi pertambangan dan sekitarnya. Betapa tidak, gunung dan pegunungan yang di dalam Alqur'an disebut sebagai "**pasak**" dan menjadi perekat zamrut katulistiwa, sehingga bumi menjadi kuat dan tidak terguncangkan. Kini, semuanya tampak terbabat habis dan digantikan dengan satwa-satwa baru berupa peralatan industri berat dan mobil-mobil raksasa yang membisingkan telinga dan membuat hidung para penghuninya tersumbat.

Harus diakui bahwa semakin hari bumi dan lingkungan tempat tinggal kita terus memburuk kualitasnya. Potret degradasi lingkungan ini terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat karena manusia terus melakukan aktivitas yang kurang ramah lingkungan. Meskipun pada umumnya orang berpandangan bahwa untuk melakukan penyelamatan lingkungan adalah diperlukan sebuah gebrakan spektakuler. Akan tetapi sesungguhnya kita dapat mengedepankan ikhwal sepele dan sederhana secara partisipatif untuk menunjukkan upaya penyelamatan lingkungan hidup. Adapun beberapa hal yang kategori sepele, sederhana dan praktis itu.

Pertama, sikap dan perilaku penghematan dalam penggunaan enersi listrik, sesungguhnya merupakan salah satu

tindakan yang sangat bijaksana. Memang penggunaan cahaya lampu adalah berbeda dengan penggunaan sinar matahari yang sepanjang masa kita nikmati, sehingga menjadi sumber kehidupan anak manusia sehari-hari. Artinya, sehari saja listrik terlambat dibayar, maka petugas PLN langsung datang memutuskan aliran dan arus listriknya. Sedangkan pemanfaatan sinar matahari sehari-hari dan selama-lamanya, tidak pernah ada petugas dari langit yang datang menagih dan mematikan atau meredupkan cahaya matahari ketika terlambat bayar dan apalagi kalau kita tidak pernah membayarnya.

Karena itu, betapa dengan sangat mudah kita melakukan upaya penghematan atas penggunaan listrik yang setiap hari kita manfaatkan di rumah dan di kantor atau di tempat-tempat lain. Meskipun terlihat sepele karena hanya mengubah sikap dan perilaku kita dari tindakan mubazir menjadi tindakan hidup sederhana yang dilandasi dengan kesyukuran atas nikmat yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba-NYA. Betapa upaya penghematan listrik akan memberikan dampak yang besar terhadap penyelamatan lingkungan hidup, terutama di Indonesia. Pasalnya, selain Indonesia merupakan negara yang 'miskin' listrik, juga sebanyak 80 persen sumber energi listrik di Indonesia masih bergantung pada energi berbahan bakar fosil atau bukan merupakan energi yang terbarukan, sehingga kian tinggi penggunaan energi fosil, maka semakin meningkatkan pemanasan global.

Kedua, betapa besar nikmat air yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia, sehingga tampil menjadi negara dengan sumber daya air yang melimpah. Akan tetapi, kenyataannya, hingga kini kita belum mampu memanaje air secara baik. Akibatnya, hampir setiap musim penghujan air justru menjadi musibah banjir dan di musim kemarau memunculkan musibah kekeringan di berbagai daerah. Belum lagi ditambah dengan polusi udara yang marak mulai dari sungai hingga laut. Dengan demikian, menghemat udara di rumah dan

membuat sumur resapan serta membuat biopori, bisa menjadi sumber inspirasi untuk ikut serta menyelamatkan lingkungan.

Sementara itu, penggalian sumur bor adalah praktek yang umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air di lingkungan pedesaan maupun perkotaan. Namun, praktek ini dapat berdampak pada sumber daya air di sekitarnya. Dengan demikian, upaya penggalian sumur bor yang tak terhitung lagi jumlahnya, maka dapat menjadi sebuah tindakan eksploitasi air tanah yang berlebihan, sehingga menyebabkan penurunan permukaan air tanah secara drastis. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan efek kekeringan, penurunan kualitas air tanah dan kerusakan ekosistem.

Ketiga, bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan dibutuhkan 1 batang pohon untuk membuat 15 rim kertas ukuran A4. Sementara itu, hampir 70% bahan baku kertas diambil dari hutan belantara, sehingga tak terbayangkan betapa pentingnya upaya penyelamatan lingkungan yang bisa kita berikan ketika kita menunjukkan perilaku penghematan dalam pemakaian kertas. Betapa tidak, ada beberapa dampak lingkungan dari produksi kertas penting untuk diperhatikan karena memiliki banyak efek negatif, yakni (1) 40% dari kayu yang ditebang secara komersial di dunia digunakan untuk produksi kertas; (2) perkebunan dan pabrik bubur kayu membahayakan habitat alami; (3) lebih dari 30 juta hektar hutan dihancurkan setiap tahunnya; (4) industri pulp dan kertas merupakan penyumbang besar terhadap masalah penggundulan hutan dan turut bertanggung jawab atas terancamnya beberapa spesies yang hidup di hutan; (5) siklus hidup kertas merusak lingkungan dari awal hingga akhir yang dimulai dengan penebangan pohon dan berakhir dengan pembakaran yang kemudian melepaskan karbon dioksida ke atmosfer; (6) Produksi kertas menggunakan banyak air seperti kertas A4 membutuhkan 10 liter air per lembar; dan (7) sebagian besar bahan di tempat pembuangan sampah terbuat dari kertas. Tak terbayangkan bahwa ketika

kertas membusuk, maka kertas mengeluarkan metana dan gas rumah kaca dan ketika dibakar atau dijadikan kompos, maka kertas pun mengeluarkan karbon dioksida.

Memang kertas dapat didaur ulang, tetapi tidak semua orang mampu dan berkemauan untuk mendaur ulang, sehingga kita perlu berupaya untuk konsisten dalam mendaur ulang. Dalam konteks ini, kita telah sampai pada titik krusial dan maksimal untuk semua orang tampil berkontribusi pada lingkungan yang lebih hijau dengan mengubah cara mereka mengelola sampah pribadi mereka masing-masing. Karena itulah, maka sebaiknya kita mengajak semua orang yang kita kenal untuk mendaur ulang dan mendorong orang-orang untuk membeli kertas daur ulang serta sekaligus mendorong industri kertas untuk menggunakan cara-cara yang ramah lingkungan dalam memproduksi kertas.

Keempat, seringkali tidak kita sadari bahwa acapkali menanam pohon selama ini hanya sebatas seremonial belaka atau mungkin sebuah aktivitas yang diklaim sepele tanpa arti. Namun faktanya bahwa betapa banyak manfaat menanam pohon yang tidak hanya untuk dirasakan oleh manusia tetapi semua makhluk hidup di sekitarnya. Menanam pohon menjadi solusi termurah dan paling efektif dalam mengatasi perubahan iklim. Telah banyak penelitian yang menandakan bahwa untuk memerangi pemanasan global kita perlu menanam sekitar tiga triliun pohon. Pasalnya, pohon menyerap karbondioksida dan menghasilkan oksigen rata-rata 1,2 kg perhari/batang. Sementara anak manusia sangat membutuhkan oksigen untuk bernapas sebesar 0,5 kg per hari/orang. Pohon juga menyerap dan menyimpan air hujan untuk menghindari banjir dan menjadikannya sebagai air tanah, cadangan udara hingga musim kemarau tiba. Pohon juga menjadi habitat bagi berbagai organisme yang membentuk keseimbangan alam dengan jaringan makanannya. Berbagai manfaat pohon tersebut menempatkan kegiatan penanaman pohon sebagai salah satu

bentuk nyata dalam menyelamatkan lingkungan. Betapa kita seringkali melupakan bahwa kita tidak sendirian tinggal di bumi. Ada makhluk hidup lain yang juga perlu kita hargai keberadaannya, termasuk di dalamnya adalah hewan.

Kelima, plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun silam, kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 milyar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam satu tahun. Hal ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya, maka diperlukan 12 juta barel minyak per tahun dan 14 juta pohon yang harus ditebang. Ketika plastik sudah tidak terpakai dan menjadi sampah, maka membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk bisa terurai oleh tanah. Artinya, plastik yang kita gunakan hari ini akan terus memberikan dampak negatif pada lingkungan dan bahkan setelah kita meninggal sekalipun. Mengurangi pemakaian plastik berarti ikut serta dalam penyelamatan lingkungan. Hanya saja selama ini untuk menanggulangi sampah plastik beberapa pihak mencoba untuk membakarnya, tetapi proses pembakaran yang kurang sempurna dan tidak mengurai partikel-partikel plastik dengan sempurna, sehingga menjadi dioksin di udara yang pasti kemudian dihirup oleh anak manusia. Pada gilirannya, menjadi sangat rentan terhadap berbagai penyakit di antaranya kanker, gangguan sistem syaraf, hepatitis, pembengkakan hati, dan gejala depresi.

Keenam, keberadaan transportasi adalah sangat menunjang kehidupan manusia, karena perjalanan dapat ditempuh lebih cepat untuk melakukan berbagai aktivitas. Karena itu, adalah tidak mengherankan jika kebutuhan transportasi terus bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk. Betapa tidak, transportasi dapat membuat akses masyarakat menjadi lebih mudah dan tidak memerlukan terlalu banyak tenaga untuk menempuh berbagai wilayah yang diinginkan. Atas dasar kemudahan itulah, maka warga

masyarakat memilih menggunakan transportasi untuk memudahkan kegiatan sehari-harinya, baik itu transportasi umum maupun transportasi pribadi. Akan tetapi, meskipun transportasi dapat menunjang kehidupan manusia, namun sektor transportasi dikategorikan sebagai penyumbang terbesar terhadap emisi karbon di Indonesia.

Sementara itu, udara merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Akibat meningkatnya aktivitas manusia di berbagai bidang seperti pada aktivitas industri, pertanian, pertambangan, peternakan, dan perikanan maupun transportasi akan mempengaruhi kualitas udara. Di Indonesia penyumbang pencemaran udara terbesar sekitar 85% berasal dari emisi kendaraan bermotor yang sekaligus menjadi pemicu pemanasan global. Gas hasil pembuangan kendaraan bermotor merupakan sumber polusi udara yang utama khususnya di kawasan perkotaan. Kendaraan bermotor di seluruh dunia diperkirakan menghasilkan emisi karbon hingga 2 miliar pertahun dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Upaya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan beralih menggunakan kendaraan non motor. Hal ini penting disadari dan segera diwujudkan karena dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok merupakan pemicu utama terjadinya gangguan pernapasan, seperti asma, ISPA, dan kanker paru-paru. Pada gilirannya, menyebabkan berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia, sehingga membahayakan kesehatan.

Ketujuh, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat produksi sampah yang tinggi. Pertumbuhan populasi yang cepat, urbanisasi, dan konsumsi yang meningkat telah menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap tahun. Tentu saja Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi yang terus bertambah, maka sudah pasti terus menghadapi tantangan serius atas pengelolaan sampah. Betapa sulit rasanya anak manusia berpisah dengan

sampah, baik sampah organik maupun non-organik adalah sama-sama menimbulkan dampak negatif terhadap pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran laut, hingga pemanasan global sebagai akibat terlepasnya gas-gas dalam proses menyebarkan sampah. Karena itu, upaya penerapan 3R (*Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle*) menjadi pilihan paling masuk akal untuk meminimalkan sampah. *Reuse* atau menggunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan, mengurangi atau mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, serta *recycle* atau melakukan daur ulang sampah (sumber: <http://alamendah.org/>)¹.

Sebenarnya, Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan pengelolaan sampah, termasuk melalui implementasi kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah dan program-program daur ulang. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut, seperti peningkatan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, peraturan yang lebih ketat terkait penggunaan plastik sekali pakai dan perbaikan sistem pengumpulan serta pemrosesan sampah. Akhirnya, untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia, maka sangat diperlukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam konteks ini, adalah sangat perlu dilakukan “kampanye edukasi” yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Namun demikian, pemerintah juga perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk pembangunan tempat pembuangan akhir modern dan sistem daur ulang yang efektif. Sedangkan pola pengelolaan sampah secara tradisional seperti mengumpulkan lalu dibuang dan diangkut sudah harus ditinggalkan dan segera mengubah perilaku dimulai dengan upaya pilah pilah sampah di rumah hingga gaya hidup 3R (*reduce*, *reuse*, *recycle*),

Pada sisi lain, salah satu terobosan yang terkesan cukup spektakuler adalah strategi terobosan *Green Al Maun* yang

dikedepankan oleh Muhammadiyah untuk mengintegrasikan ajaran Islam, khususnya prinsip-prinsip sosial dalam Al-Ma'un sebagai tanggung jawab menjaga kelestarian alam. Konsep dan implementasi makna *Green Al-Maun* merupakan manifestasi kepedulian Muhammadiyah terhadap kerusakan sosial dan alam sekitarnya. Dalam konteks ini, Allah menegaskan bahwa “pendusta agama adalah bagi mereka yang tidak memedulikan terhadap penderitaan orang miskin dan menganjurkan untuk memberikan bantuan. Sehubungan dengan keberadaan alam semesta, maka Al Maun ini menjadi relevan bahwa orang yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak peduli dengan kerusakan lingkungan dan tidak menganjurkan pada perbaikan lingkungan².

Sesungguhnya dalam agama Islam lingkungan adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan dengan persoalan keimanan seorang manusia terhadap Tuhan. Karena itu, Islam menyimpulkan bahwa perilaku manusia terhadap lingkungan merupakan refleksi dari tingkat keimanannya kepada Tuhan. Pасalnya, iman mampu membebaskan seseorang dari sifat nafsu angkara murkah, sehingga tidak *over acting*, terutama dalam mengeksplorasi serta mengeksploitasi alam atau lingkungan di sekitarnya.

Sementara itu, sifat takwa membuat kesadaran seseorang untuk bertanggung jawab pada perbuatannya. Orang yang bertakwa tidak akan melakukan perilaku semena-mena, kecerobohan, ketidakadilan, dan kesombongan terhadap apapun dan kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Betapa nilai ketakwaan yang baik dari para penduduk wilayah perkampungan dapat menjadikan mereka tampil bekerja sama untuk melakukan kebaikan dalam mengelola lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, Allah SWT. berfirman dalam Surah Al-A'raf, ayat 96 bahwa:

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka

berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” Sehubungan dengan itu, Allah Yang Maha Kuasa pun berfirman dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat 41 bahwa: "telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

BIBLIOGRAPHY

- Adger, W. N., Fransen, S., De Campos, R. S., & Clark, W. C. (2024). Migration And Sustainable Development. *Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America*, 121(3). <https://doi.org/10.1073/Pnas.2206193121>
- Akin, M. S. (2023). Communication With The Social Environment In Multiplayer Online Games: The Turkey Case. *International Journal Of Game-Based Learning*, 13(1). <https://doi.org/10.4018/Ijgbl.330755>
- Arsyad, M., Suaib, E., Amir, M., Ridwan, H., Abdullah, H., Tjoetra, A., Lensoni, L., & Anto, R. P. (2024). Pendampingan Masyarakat Pesisir Sebagai Trigger Wisata Lokal Potensial. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.37478/Abdika.V4i1.3637>
- Arthington, A. H., Tickner, D., McClain, M. E., Acreman, M. C., Anderson, E. P., Babu, S., Dickens, C. W. S., Horne, A. C., Kaushal, N., Monk, W. A., O'brien, G. C., Olden, J. D., Opperman, J. J., Owusu, A. G., Leroy Poff, N., Richter, B. D., Salinas-Rodríguez, S. A., Shamboko Mbale, B., Tharme, R. E., & Yarnell, S. M. (2023). Accelerating Environmental Flow Implementation To Bend The Curve Of Global Freshwater Biodiversity Loss. *Environmental Reviews*. <https://doi.org/10.1139/Er-2022-0126>
- Badr, a., & RI-Shazly, H. (2024). Climate Change And Biodiversity Loss: Interconnected Challenges And Priority Measures. *Catrina: The International Journal Of Environmental Sciences*, 0(0). <https://doi.org/10.21608/Cat.2024.340596>
- Bajnok, M., Wichmann, B., Turcsányi-Járdi, I., & Takács, A. (2024). Különböző Gyepkezelések Hatásának Cönológiai És Természetvédelmi Vizsgálati Eredményei Üde

- Gyepen. *Gyepgazdálkodási Közlemények*, 21(2).
<https://doi.org/10.55725/Gygk/2023/21/2/13467>
- Bardsley, D. K., Cedamon, E., Paudel, N., & Nuberg, I. (2024). Forest Livelihood Values And Management Opportunities To Support The Agrarian Transition In Nepal. *Journal Of Rural Studies*, 107.
<https://doi.org/10.1016/J.Jrurstud.2024.103253>
- Borisova, L., & Dimitrov, V. (2024). Ensuring Environmental Friendliness As The Main Tendency In The Development Of The Agro-Industrial Complex. *E3s Web Of Conferences*, 493.
<https://doi.org/10.1051/E3sconf/202449301020>
- Cai, W., Shu, C., & Zhu, Y. (2023). Using Ecosystem Services To Inform Sustainable Waterfront Area Management: A Case Study In The Yangtze River Delta Ecological Green Integration Demonstration Zone. *Land*, 12(7).
<https://doi.org/10.3390/Land12071351>
- Catarino, S., Goyder, D., Darbyshire, I., Costa, E., Figueira, R., Duarte, M. C., & Romeiras, M. M. (2022). Species Diversity And Endemicity In The Angolan Leguminosae Flora. *Frontiers In Ecology And Evolution*, 10.
<https://doi.org/10.3389/Fevo.2022.871261>
- Chang, J., Lin, Z., Vojnovic, I., Qi, J., Wu, R., & Xie, D. (2023). Social Environments Still Matter: The Role Of Physical And Social Environments In Place Attachment In A Transitional City, Guangzhou, China. *Landscape And Urban Planning*, 232.
<https://doi.org/10.1016/J.Landurbplan.2022.104680>
- Chanu, L. K., De, A., Chakraborty, K., & Paul, S. (2023). Characterization Of Shifting Cultivation, Trends, And Diversification Of Livelihood Patterns: A Case Study From Forest Villages In Barak Valley, Assam, Northeast India. *Trees, Forests And People*, 14.
<https://doi.org/10.1016/J.Tfp.2023.100420>

- Chao, Z., Shang, Z., Fei, C., Zhuang, Z., & Zhou, M. (2023). Spatiotemporal Analysis Of Urban Expansion In The Mountainous Hindu Kush Himalayas Region. *Land*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/Land12030576>
- Cheng, Y. (2023). Analysis Of Development Strategy For Ecological Agriculture Based On A Neural Network In The Environmental Economy. *Sustainability (Switzerland)*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/Su15086843>
- Colyn, R. B., Campbell, A., & Smit-Robinson, H. A. (2020). The Use Of A Camera Trap And Acoustic Survey Design To Ascertain The Vocalization And Breeding Status Of The Highly Elusive White-Winged Flufftail, *Sarothrura Ayresi*. *Avian Conservation And Ecology*, 15(2). <https://doi.org/10.5751/Ace-01681-150212>
- De Sousa Junior, P. M., Miranda, J. E. S., Pereira, S. De F. P., Dinis, A. C., Nunes, L. De S., De Paula, F. S., Dos Reis Dias, A. J., De Souza Da Silva, M. L., Teixeira, O. M. M., & Da Silva Gonçalves, A. C. (2022). Integration Of Environmental Assessment Models: A Study Of The Impact On Urban Micro-Watersheds In The Amazon-Brazil. *Revista Brasileira De Geografia Fisica*, 15(5). <https://doi.org/10.26848/Rbgf.V15.5.P2194-2199>
- Dedi, M. (2023). Socialization And Evaluation Of The Blm Program For Penataban Giri Banyuwangi Village. *Tekiba : Jurnal Teknologi Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.36526/Tekiba.V3i1.2611>
- Dev, P., Khandelwal, S., Yadav, S. C., Arya, V., Mali, H. R., & Poonam. (2023). Climate Based Smart Agriculture: Need For Food Security And Sustainability. *International Journal Of Environment And Climate Change*, 13(3). <https://doi.org/10.9734/Ijecc/2023/V13i31702>
- Dr.Kirtididdi, & Dr.Vishwas Tiwari. (2024). Environmental Sustainability And Its Effect On The Scenario Of Socio-

- Economic And Pollution Aspects Of Water Bodies In Ujjain, M.P. *Epra International Journal Of Multidisciplinary Research (Ijmr)*.
<https://doi.org/10.36713/Epra15721>
- Efrizon, Mz, M. D., Santoso, S., & Saluy, A. B. (2024). Sustainability Of Cultural Values, Inheritance, And Literacy In Strengthening Human Resources In Minangkabau. *Journal Of Law And Sustainable Development*, 12(2).
<https://doi.org/10.55908/Sdgs.V12i2.3127>
- Fischer, A., & Dörpinghaus, J. (2024). Web Mining Of Online Resources For German Labor Market Research And Education: Finding The Ground Truth? *Knowledge*, 4(1).
<https://doi.org/10.3390/Knowledge4010003>
- Franco, A. (2020). Balancing User Comfort And Energy Efficiency In Public Buildings Through Social Interaction By Ict Systems. *Systems*, 8(3).
<https://doi.org/10.3390/Systems8030029>
- Furkan, Syah, A., & Sunaryo. (2023). Model Of Revitalization Of Local Wisdom Maja Labo Dahu In Saving The Environment In Bima Regency. *International Journal Of Membrane Science And Technology*, 10(2).
<https://doi.org/10.15379/Ijmst.V10i2.1485>
- Goodall, A. K., Mcwilliam, W., Meurk, C., Schelezki, O., & Muangsri, S. (2023). Evaluation Of An Incentive Programme For Increasing Green Infrastructure On Vineyards. *Land*, 12(9).
<https://doi.org/10.3390/Land12091765>
- Groulx, M., Freeman, S., & Lemieux, C. (2022). Accessible Nature Beyond City Limits – A Scoping Review. *Journal Of Outdoor Recreation And Tourism*, 37.
<https://doi.org/10.1016/J.Jort.2022.100490>
- Hadanu, R., . S., Syahrudin, M., Wahyuningrum, R., & Gp, S. (2022). Ethnopharmacological Survey Of Medicinal

- Herbs In Tolaki-Mekongga Tribe Of Kolaka Regency And East Kolaka Regency, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Journal Of Medicinal Plants Studies*, 10(6). <https://doi.org/10.22271/Plants.2022.V10.I6a.1484>
- Huang, J. (2024). Resources, Innovation, Globalization, And Green Growth: The Brics Financial Development Strategy. *Geoscience Frontiers*, 15(2). <https://doi.org/10.1016/j.gsf.2023.101741>
- Jiang, Y., Li, N., & Wang, Z. (2023). Parametric Reconstruction Of Traditional Village Morphology Based On The Space Gene Perspective—The Case Study Of Xiaoxi Village In Western Hunan, China. *Sustainability (Switzerland)*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/su15032088>
- Kamakaula, Y., Amruddin, A., Aryana, R. D., Saprudin, S., & Nugroho, R. J. (2023). The Role Of Local Knowledge In Natural Resources Conservation: An Environmental Anthropological Perspective In Traditional Agriculture. *Global International Journal Of Innovative Research*, 1(2). <https://doi.org/10.59613/global.v1i2.13>
- Kaur, N., Somasundram, C., Razali, Z., Mourad, A. H. I., Hamed, F., & Ahmed, Z. F. R. (2024). Aloe Vera/Chitosan-Based Edible Film With Enhanced Antioxidant, Antimicrobial, Thermal, And Barrier Properties For Sustainable Food Preservation. *Polymers*, 16(2). <https://doi.org/10.3390/polym16020242>
- Khan, T., Waseem, M., Muqet, H. A., Hussain, M. M., Yu, M., & Annuk, A. (2022). 3e Analyses Of Battery-Assisted Photovoltaic-Fuel Cell Energy System: Step Towards Green Community. *Energy Reports*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.10.393>
- Khetib, S. M. B., & Zemri, B. E. (2024). The Role Of Labour Productivity Within Algeria's Sustainable Economic Development. *Croatian Review Of Economic, Business And Social Statistics*, 9(2).

- <https://doi.org/10.62366/Crebss.2023.2.002>
- Krämer, N. C., Rösner, L., Eimler, S. C., Winter, S., & Neubaum, G. (2014). Let The Weakest Link Go! Empirical Explorations On The Relative Importance Of Weak And Strong Ties On Social Networking Sites. *Societies*, 4(4). <https://doi.org/10.3390/Soc4040785>
- Kumaresan, P. R., Hidangmayum, N., Singh, A., Yadav, D., Shabnam, Brajendra, Devi, A. B., & Asmatullah. (2023). A Comprehensive Report On Environmental Sustainability: A Global Perspective. *International Journal Of Environment And Climate Change*, 13(11). <https://doi.org/10.9734/Ijecc/2023/V13i113283>
- Lewoleba, G., Widianarko, B., & Dewi, Y. T. N. (2023). Environmental Conservation Based On Mamar System As Local Wisdom Of West Timor, East Nusa Tenggara. *Man And Environment. Issues Of Neoecology*, 40. <https://doi.org/10.26565/1992-4224-2023-40-08>
- Liu, Z. (2024). Assessing The Role Of Green Finance In Enhancing Rural Economic Resilience And Environmental Sustainability. *Frontiers In Management Science*, 3(1). <https://doi.org/10.56397/Fms.2024.02.09>
- Manzoor, U. (2023). Assessing The Benefit Of Adopting Tqm Philosophy And Green Supply Chain Management Towards Sustainable Operations: An Evidence From Textile Industries Of Pakistan. *Asia Proceedings Of Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.31580/Apss.V11i1.2764>
- Moshe, A., Beza, M., Daniel, H., & Chala, M. (2024). Integrated Watershed Management Strategies For Sustainable Resource Utilization Using The Swat Model: Case Study Of The Kalte River Watershed, Rift Valley Basin, Ethiopia. *H2open Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.2166/H2oj.2024.107>
- Mulder, P., Dalla Longa, F., & Straver, K. (2023). Energy

- Poverty In The Netherlands At The National And Local Level: A Multi-Dimensional Spatial Analysis. *Energy Research And Social Science*, 96. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102892>
- Nasution, A. A., Ilham, I., Akbar, H., Huda, N., Wulandari, D., & Kudussisara. (2024). Obstacles To Revitalizing Communities Coconut Plantations To Support The Green Economy - Based Coconut Industry In Indonesia: The Case Of Simeulue Island, Aceh Province. *Universal Journal Of Agricultural Research*, 12(1). <https://doi.org/10.13189/Ujar.2024.120107>
- Ngaji, A. U. K., Baiquni, M., Suryatmojo, H., & Haryono, E. (2021). Assessing The Sustainability Of Traditional Agroforestry Practices: A Case Of Mamar Agroforestry In Kupang-Indonesia. *Forest And Society*, 5(2). <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.14380>
- Normalina, Hatta, M., Hafizianoor, & Hamdani. (2021). Plastic Waste Management Through The Role Of Leadership Adaptation Of Environmental Inspected Habits. *Webology*, 18(Special Issue). <https://doi.org/10.14704/web/v18si04/web18127>
- Pan, A., Xu, S., & Zaidi, S. A. H. (2024). Environmental Impact Of Energy Imports: Natural Resources Income And Natural Gas Production Profitability In The Asia-Pacific Economic Cooperation Countries. *Geoscience Frontiers*, 15(2). <https://doi.org/10.1016/j.gsf.2023.101756>
- Pang, X., Xie, B., Lu, R., Zhang, X., Xie, J., & Wei, S. (2024). Spatial–Temporal Differentiation And Driving Factors Of Cultivated Land Use Transition In Sino–Vietnamese Border Areas. *Land*, 13(2). <https://doi.org/10.3390/land13020165>
- Peribadi, Dkk., 2023. Eksploitasi Kapitalisme Agraris Dan Urgensi Social Responsibility: Sebuah Diskursus Sosiologi Profetik, Karya Bersama, Banjarmasin.

- Piliang, Amir, Yasraf, 1998, Sebuah Dunia Yang Dilipat, Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga Dan Matinya Posmodernisme, Mizan, Anggota Ikapi, Bandung.
- Rahayu, D. P., Rahayu, S., Faisal, & Yanto, A. (2024). Countering Illegal Tin Mining With A Legal Formulation Of Law Based On Local Wisdom In Bangka Belitung, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2311053>
- Rochmani, R., Megawati, W., Suliantoro, A., & Listyarini, D. (2023). Deep –Ecology Approach To Environmental Protection And Saving Through Environmental Case Settlement In Court. *Journal Of Law And Sustainable Development*, 11(10). <https://doi.org/10.55908/Sdgs.V11i10.1290>
- Sehrawat, R., Kumar Sahdev, R., Chhabra, D., Tiwari, S., Khargotra, R., Singh, T., & Manisha. (2023). Environmental And Economic Management Study Of Phase Change Material Integrated Bifacial Photovoltaic Thermal-Greenhouse Drying System: A Thermal Approach. *Energy Conversion And Management*, 286. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2023.117065>
- Sembiring, T. B., Fitri, L. L., Holil, H., Siburian, H. K., & Cakranegara, P. A. (2022). Challenge Of Customary Law Implementation In The Optimistic Law Era In Saving Healthy Indonesian Environment. *International Research Journal Of Management, It And Social Sciences*, 9(4). <https://doi.org/10.21744/Irjmis.V9n4.2147>
- Septiana, R., Ummah, Q., Muslim, R. I., & Wuryani, M. T. (2023). Community Empowerment Through Social-Culture To Enhance Human Resources. *Journal Of Community Services And Engagement: Voice Of Community* (Voc), 3(2).

- <https://doi.org/10.23917/Voc.V3i2.2538>
- Simbolon, M. R., Lubis, S. N., & Aritonang, E. (2024). Analysis And Strategy For Developing Potential Sectors In The Development Of Humbang Hasundutan District, Indonesia. *Asian Journal Of Advanced Research And Reports*, 18(5). <https://doi.org/10.9734/Ajarr/2024/V18i5629>
- Stiglingh, A. D., Mosley, L. M., Smernik, R. J., & Fitzpatrick, R. W. (2024). Mapping Soil Corrosivity Potential To Exclusion Fencing Using Pedotransfer Functions And Open-Source Soil Data. *Soil Use And Management*, 40(1). <https://doi.org/10.1111/Sum.13019>
- Syed Ahmad, S. M. F., Khairi, H., & Kamarudin, M. F. (2023). The Resilience Of Malay Silver Craft Design: Sustaining Cultural Heritage And Promoting Sustainable Industrialization. *E-Bangi Journal Of Social Science And Humanities*, 20(4). <https://doi.org/10.17576/Ebangi.2023.2004.35>
- Tabti, R. (2024). Environmental Protection In Algerian Constitutions. *Comparative Legilinguistics*, 57. <https://doi.org/10.14746/Cl.2024.57.1>
- Tochukwu Chinwuba Nwankwo, Emuesiri Ejairu, Kehinde Feranmi Awonuga, Favour Oluwadamilare Usman, & Ekene Ezinwa Nwankwo. (2024). Conceptualizing Sustainable Supply Chain Resilience: Critical Materials Manufacturing In Africa As A Catalyst For Change. *International Journal Of Science And Research Archive*, 11(1). <https://doi.org/10.30574/Ijsra.2024.11.1.0314>
- Van Genuchten, C. M., Wang, K., & Jakobsen, R. (2024). Vadose Zone Perspectives In Global Arsenic Research: A Review And Future Opportunities. In *Vadose Zone Journal*. <https://doi.org/10.1002/Vzj2.20313>
- Vázquez-Domínguez, E., Kassen, R., Schroer, S., De Meester, L., & Johnson, M. T. J. (2024). Recentering Evolution

- For Sustainability Science. *Global Sustainability*, 7.
<https://doi.org/10.1017/Sus.2024.5>
- Wang, D., Liu, C., Guo, Y., Tang, P., Jiao, J., Kong, W., Zhang, L., Liu, Y., & Kong, D. (2022). Research Strategy For Constructing A Green Infrastructure Network Based On Spatial Prioritization. *Ecosystem Health And Sustainability*, 8(1).
<https://doi.org/10.1080/20964129.2022.2088403>
- Wulandari, N. D., Kurniasari, L., Ruscitasari, Z., Almuna, N. F., Idries, F. A., & Nurkhamid, F. (2023). Building Blocks: Sustainable Solution For Waste Management. *Proceeding International Conference Of Technology On Community And Environmental Development*, 1(1).
<https://doi.org/10.18196/Ictced.V1i1.50>
- Xu, Z., Dong, B., Wang, C., Gao, X., Xu, H., Wei, Z., Lu, Z., & Liu, X. (2023). Construction Of International Important Wetland White-Headed Crane Ecological Corridor In Chongming Dongtan, China. *Ecological Indicators*, 149.
<https://doi.org/10.1016/J.Ecolind.2023.110156>
- Yu, G., Wang, Z., Liu, Y., Yang, X., Zhang, J., & Gao, K. (2024). Evaluation Of Coastal Zone Development And Utilization Considering Natural Ontology, A Case Study In Liaoning Province, China. *Ocean And Coastal Management*, 250.
<https://doi.org/10.1016/J.Ocecoaman.2024.107027>
- Yu, H., Zahidi, I., Fai, C. M., Liang, D., & Madsen, D. Ø. (2024). Mineral Waste Recycling, Sustainable Chemical Engineering, And Circular Economy. *Results In Engineering*, 21.
<https://doi.org/10.1016/J.Rineng.2024.101865>
- Zainal, S., Nirzalin, N., Fakhurrazi, F., Yunanda, R., Ilham, I., & Badaruddin, B. (2024). Actualizing Local Knowledge For Sustainable Ecotourism Development In A Protected Forest Area: Insights From The Gayonese In Aceh

- Tengah, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2302212>
- Zaretsky, A. A., & Kozyrev, A. A. (2024). Strategic Project Management Of The Socio-Ecological Development Of The Arctic Zone Of The Russian Federation. *Administrative Consulting*, 12.
<https://doi.org/10.22394/1726-1139-2023-12-131-144>
- Zhang, J., Yang, X., Wang, Z., Liu, Y., Liu, X., & Ding, Y. (2023). Mapping Of Land-Based Aquaculture Regions In Southeast Asia And Its Spatiotemporal Change From 1990 To 2020 Using Time-Series Remote Sensing Data. *International Journal Of Applied Earth Observation And Geoinformation*, 124.
<https://doi.org/10.1016/j.jag.2023.103518>
- Zhukov, M. A., Kershengolts, B. M., & Kuvaev, A. V. (2024). Traditional Nature Management In The North As A Technological Culture Of The Arctic Subcivilization: From Past To Future. *Arctic And Subarctic Natural Resources*, 28(4). <https://doi.org/10.31242/2618-9712-2023-28-4-574-583>
1. <https://environment-indonesia.com/7-cara-mudah-untuk-berpatisipasi-dalam-penyelamatan-lingkungan-hidup/>
 2. <https://umsida.ac.id/green-al-maun-muhammadiyah-upaya-menjaga-lingkungan/>

SEKILAS TENTANG PENULIS

DR, Peribadi, MSi. Penulis adalah seorang lektor kepala pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari. Ada beberapa referensi lima tahun terakhir yang telah penulis publikasikan, yakni: (1) *Prophetic Epistemology Discourse: An Initial Thought*, LAP Germany, (2020); (2) *Beragam Epistemologi Di Pentas Keilmuan*, Adab Anggota IKAPI, Indramayu (2020); (3) *Kepemimpinan Tradisional dan Potret Demokrasi Lokal*, Literasi Nusantara Anggota IKAPI, Malang (2020) (4) *Diskursus Metodologi Profetik dan Riset Pembebasan*, Zahir Publishing, Anggota IKAPI, Yogyakarta (2021); dan (5) *Strategi Pembangunan Partisipatif Menuju Desa Masa Depan*, Literasi Nusantara, Anggota IKAPI Kota Malang (Edisi Revisi 2021); (6) *Paradigma, Pendekatan, Dan Multimetodologi: Sebuah Riset Pembebasan Menuju Post Kualitatif*, Zahir Publishing, Anggota IKAPI Yogyakarta (Edisi Revisi 2022); (7) *Pemiskinan dan Kemiskinan: Perspektif Fenomenologi*, Literasi Institut, Kendari, 2022; (8) *Konstruksi Perencanaan Partisipatif Berbasis Profetik*, Deepublish Anggota IKAPI, Yogyakarta (Edisi Revisi 2022); (9) *Potensi dan Problematika Wilayah Perdesaan: Menyoal Keberadaan Desa-Desa Tertinggal*, Adab Anggota IKAPI, Indramayu (2022); (10) *Resolusi Pemiskinan Berbasis IESQ Power*, CV. Sketsa Media Anggota IKAPI, Purbalingga, Jawa Tengah (2023); (11) *Literasi Kritis Berbasis IESQ Power, Menyoal Kaum Milenial di Era Digital*, Zahir Publishing, Anggota IKAPI, Sleman, Yogyakarta (2023); (12) *Selayang Pandang Dunia Perdesaan*, Zahir Publishing, Anggota IKAPI, Sleman, Yogyakarta (2023); (13) *Eksplorasi Kapitalisme Agraris dan Urgensi Social Responsibility: Sebuah Diskursus Sosiologi Profetik*, Ruang Karya Bersama Anggota IKAPI, Kalimantan Selatan; (14) *Urgensi Corporate Social Responsibility: Perspektif*

Kesejahteraan Sosial, Zahir Publishing, Anggota IKAPI, Sleman, Yogyakarta (2024); (15) Realitas Sosial Kontemporer: Sebuah Bedah Kritisisme, Tangguh Denara Jaya Publisher, Anggota IKAPI Nusa Tenggara Timur; dan (16) Selayang Pandang Dinamika Sosial Perdesaan, Adab, Anggota IKAPI, Indramayu (2024).

DR. H. Muhammad Arsyad, MSi. Penulis adalah seorang Lektor Kepala pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (Fisip UHO) yang dilahirkan di Matalalang Kabupaten Selayar pada tanggal 10 Juni 1965. Gelar sarjana sosiologi diperoleh pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Fisipol Unhas), dan gelar Magister pada tahun 1999 dari Pascasarjana Universitas Airlangga (PPS Unair), gelar Doktor pada tahun 2017 dari Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasi antara lain: 1. The Structure of Heterogeneous Society Action in Meeting the Needs to social Integration (A study on rice Farmer Community in Wonggeduku Konawe). 2. Mining and Peasant Societies Resistance: Political Ecology Perspective. Participation of Community in Rural Development in Oengkolaki Village Mawasangka District Central Buton Regency. 3. The Contribution of Family Hope Program in Increasing The Social Welfare of Poor Families in Kendari City. 4. Farmer Adaptation Strategy to Their Environment in the Village of Makoro Binongko Wakatobi (2021). 5. Gender Relations in Stone-Breaking Women's Families in Southeast Sulawesi, Indonesia: A Phenomenological Study (2021). Juridical Overview of Existence Community Customary Forests (2021). 6. Conflict Management in Multiethnic Communities: a Case Study in Southeast Sulawesi, Indonesia (2021). 7. Time Allocation and Economic Contribution of Women in Fulfilling the Basic Needs of Poor Households (2021). 8. Sructural and

Cultural Strategies in Building Social, Economic, and Ecological Resilience toward and Independent Society (2022), 9. Social and Governance Activities Towards the Process of Social Integration of Rural Multi-Ethnic Communities (2023), 10. Caring for Different Economic Conditions to Maintain the Social Integration of Multi-Ethnic Farmers (2023), 11. The relationships amongst career patterns, neutrality and organizational performance: the case of local government organizations in South Konawe District, Indonesia (2024), 12. Circular Communication Network Pattern (ccnp) Strategy and Triangular Communication Network Pattern (tcnp) to Reduce Political Conflict in North Button, Indonesia (2024), 13. Evolution and Development of Metaverse: Bibliometric Analysis (2024). Adaptasi Sosial Mahasiswa Papua di Universitas Halu Oleo (2019), Menuju Desa Masa Depan: Sebuah Strategi Membangun Desa Terpadu (2020), Beragam Epistemologi di Pentas Keilmuan Sebuah Ulasan Komparatif (2020). Resolusi Konflik Sebuah Perspektif Sosiologi (2021). Epistemologi Pergerakan Intelektual Dari Masa Ke Masa Sebuah Ulasan Komparatif (2021). Dasar-Dasar Penelitian Sosial (2021). Spektrum Metode Penelitian Sosial: Sosiologi, Komunikasi, dan Pendidikan (2021). Strategi Pembangunan Partisipatif Menuju Desa Masa Depan (2021). Konstruksi Perencanaan Partisipatif Berbasis Profetik: Sebuah Tinjauan Teoretis dan Praktikal (2022). Potensi dan Problematika Wilayah Perdesaan, Menyoal Keberadaan Desa-desa Tertinggal (2022). Eksploitasi Kapitalisme, Agraris, dan urgensi, Corporate Sosial Responsibility: Sebuah Dirkuis Sosiologi Profetik (2022). Perjudian dalam Keberagaman masyarakat dan kenisbian kebudayaan (2023), Selayang Pandang Dunia Perdesaan (2023), Sosiologi Pembangunan jilid 1 (2024), Sosiologi Pembangunan jilid 2 (2024), Sistem Sosial Budaya Indonesia (2024), Cyber Society Dan Problematikanya Perspektif Sosiologi Komunikasi 2024.

Dr. Darmin Tuwu, S.Sos, M.A adalah **sebagai** Dosen Lektor Kepala yang sejak Tahun 2022 sampai sekarang dipercaya sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UHO Kendari. Ia lahir di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara dan menempuh Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bau-Bau, Sedangkan Pendidikan SMA ditamatkan di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Kemudian pada Tahun 1997 sukses gemilang meraih Gelar Sarjana-S1 (S.Sos.) di Jurusan Sosiologi Fisipol Universitas Hasanuddin Makassar. Sedangkan Gelar Master of Art (M.A.) bidang Sosiologi dan Pemberdayaan Masyarakat diraihinya di Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2009 serta Gelar Doktor bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia Tahun 2016. Kini, menjadi peneliti dan *presenter* pada seminar nasional dan internasional, serta aktif menulis artikel yang dipublikasikan dalam jurnal Nasional dan Internasional. Publikasi karya ilmiah Nasional/Internasional 5 tahun terakhir antara lain: The Challenges of Madani Brotherhood Program on Overcoming Poverty in The City of Kendari (2018), Empowering Bajo Women in Managing Household Finances In Bajo Indah Village, Soropia District, Konawe Regency, Southeast Sulawesi (2019), The Contribution of Hope Family Program and *Madani* Brotherhood Program in Increasing Public Health in Kendari City (2019), The Contribution of Family Hope Program in increasing qualities of Life of Poor Families in Kendari City (2020), Dormitory-Based Intervention Method For Children With Special Needs (2020), Farmer Adaptation Strategy to Their Environment in the Village of Makoro Binongko Wakatobi (2021), Improvement of Work Capacity with Welfare of Apparatus and Work Facilities and Their Impact on Performance (2021), Marginalization socio farm laborers due to conversion of agriculture land (2021), Social Services for the Elderly in the Era of the Covid-19 Pandemic (2022), Kebijakan

Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 (2020), Perempuan Penenun: Dari Budaya Kerja Hingga Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (2020), Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19: Perspektif Kesejahteraan Sosial (2021), Implementasi Program Sembako Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Mengurangi Beban Pengeluaran Keluarga Miskin (2022), Implementasi Program Pelayanan Sosial Pada Anak Bermasalah di Panti Sosial Anak dan Remaja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara (2023), Efektivitas Program Baruga Moico Dalam Meningkatkan Kualitas Rumah Layak Huni Masyarakat Miskin Di Kec Rumbia Tengah Kabupaten Bombana (2023), Pemberdayaan Remaja Kurang Mampu Melalui Keterampilan Tata Rias Di UPTD-Panti Sosial Anak Dan Remaja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara (2023). Adapun publikasi buku dalam 5 tahun terakhir antara lain: *Islam and Local Wisdom: Religious Expression in Southeast Asia* (2017), *Konflik, Kekerasan dan Perdamaian* (2018), *Sosiologi Pasar* (2018), *20 Tahun Reformasi Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi (1998-2018)* (2018), *Dasar-Dasar Penelitian Sosial* (2021). Kini, juga sebagai “Editor in Chief” Jurnal Nasional bernama *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, yang Terakreditasi Ristek Dikti Peringkat SINTA5.

Asriani. S.IP., M.A yang lahir di Wawotobi 13 Februari 1977 sukses menyelesaikan Studi Jenjang S1 pada Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Hasanuddin (Unhas) pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan Jenjang S2 di Jurusan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2007 dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2009. Kini, sebagai dosen tetap di Universitas Halu Oleo sejak tahun 2005 hingga saat ini, sedang menjalani pendidikan S3 di Jurusan Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Publik di Universitas Halu Oleo. Beberapa karya tulis yang telah diterbitkan lima tahun terakhir,

diantaranya: *The Influence Of Competence On Employee Performance: A Studi On The Depatement Of Population And Civil Registry In Kendari City, Indonesia*, diterbitkan RJOAS. *Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan asli Daerah: Studi Taman Wisata Alam Mangolo (Kea-Kea) di Kabupaten Kolaka*. Diterbitkan NeoRespublica; *Jurnal Ilmu Pemerintahan. Pendidikan Politik Islam Melalui Organisasi Kemahasiswaan. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Money Politic Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Muna Barat Tahun 2019*. *Transparansi Pengelolaan Dana Desa 2018 (Studi DEsa Laeya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan)*, diterbitkan Jurnal CALGOVS Local Politic and Government issue. *Efektifitas E-Government Sistem Informasi Manajemen Data Kepegawaian BKPSDM Kota Kendari*, diterbitkan NeoRespublica; *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.,. *Strategi Politik Relawan Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020*. Diterbitkan Jurnal CALGOVS Local Politic and Government issue. *Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa (Studi Desa Wantiworo Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna)*, di terbitkan Jurnal Publicuho. *Akuntabilitas dan transparansi pelayanan Publik dalam perspektif masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, diterbitkan Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora JIMSH. *Implementasi Hak Politik Masyarakat Adat: Analisis Perilaku Memilih Di Desa Adat Hukaea Laea*, diterbitkan Jurnal (JAPMAS). *Politik Anggaran dan Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, diterbitkan Jaurnal Publicuho. *Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Petani dan Nelayan Di Kabupaten Konawe Kepulauan*, Terbit Jurnal Trimas. *Publish or Perish Analisis Bibliometrik Terhadap Literatur Tentang Pengembangan Objek Wisata Dalam Mendukung PADes di Indonesia Pada Tahun 2019–2021*. *Publish or Perish Analisis Bibliometrik Terhadap Pengembangan Objek Wisata Dalam*

Upaya Peningkatan PAD di Indonesia Pada Tahun 2021–2023, diterbitkan Jurnal Adminstrasi dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol. Publish or Perish Analisis Bibliometrik Peran Media Sosial Terhadap Promosi Pariwisata tahun 2021-2023 diterbitkan Jurnal Ilmiah Ilmu Adminstrasi (Jiia). Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif Dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Inklusif Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Diterbitkan Jurnal PublicUho. Buku Politik Lokal, diterbitkan CV. Literasi Indonesia 2022, dan Sistem Informasi Manajemen Teori dan Prinsip-Prinsip Dasar. diterbitkan CV. Literasi Indonesia 2024. Selain itu, Opini Dari Panggung Debat Ke Realitas: Mampukah kandidat Penuhi Harapan Masyarakat, diterbitkan Surat Kabar Kendari Pos sabtu 9 November 2024. Antara Kebutuhan Ekonomi dan Pilihan Politik. Refleksi Sosial dari Masifnya Politik Uang Di Pilkada, diterbitkan Kendari Pos Kamis 28 November 2024.

Suharty Roslan. Penulis adalah dosen tetap berpangkat Lektor Kepala pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo (Fisip UHO) yang dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1967 di Ujung Pandang Sulawesi Selatan. Gelar Sarjana Sosiologi di peroleh pada tahun 1991 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Haluoleo Kendari dan gelar Magister pada tahun 2001 dari Pascasarjana Universitas Airlangga (PPS Unair). Penulis menjadi dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uivesitas Halu Oleo sejak tahun 1993. Beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan antara lain: Pembagian Kerja, Upah kerja dan Dinamika Hubungan Gender, Strategi Adaptasi etnik Di perantauan, Dampak Migrasi Etnik Bugis Terhadap Masyarakat Lokal, Eksistensi Passompe’ di Daerah Tujuan (Studi Tentang Misi Budaya Perantau Etnik Bugis Di Kota Kendari), Tantangan Yang Dihadapi Keluarga di Era Modern Dalam Pembentukan Karakter Anak: Studi Sosiologi Keluarga

Di Kota Kendari, Fenomena Perilaku Konsumerisme di Kalangan Mahasiswa Fisip UHO, Pertambangan Nikel dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi kasus Pada Warga Masyarakat di Sekitar Wilayah Industri Pertambangan Kabupaten Konawe Selatan), Performance of The Management of Social Economic Transformation (A Case study In Kendari City), Identifikasi Problem sosial dan Rekonstruksi Model Pendekatan Komunikasi Pariwisata Kemaritiman Pada Masyarakat di Wilayah Pesisir Pulau Bokori, The Existence of Studen and Contemporary Problems, Pola Komunikasi Organisasi Humas Kota Kendari Dalam Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Pada Masyarakat pesisir di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan, Media Non Periodik dan Pesan Kampanye Sosial Pada Pilwali 2017 Kota Kendari, Fisherman's Survival Pattern Toward Poverty. Interperonal Teamwork Among Ethnic Groups Toward Economic Development in Tansmigrations Areas. Fungsi Preventif Keluarga Terhadap Dampak Penggunaan Tekhnologi Smarthphone Pada Anak Di Kelurahan Dapu Dapura Kecamatan Kendari Kota Kendari. Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat. The Implementation of The Jigsaw Type Cooperative Method On Writyng Poetri in Senior High School Buru. Disaster Mitigation Based on Local Wisdom in Shifting Cultivators Communities. Pelatihan Parenting Bagi Keluarga Dalam Meningkatkan Dan Mendukung Perkembangan Fisik, Emosional, Sosial, Finansial, dan Intelektual Anak Di Wilayah Pesisir Pantai Nirwana di Kelurahan Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Bau-Bau. Dormitory-Based Intervention Method For Children With Special Need. Gender Relations in Stone-Breaking Womens Families In southeast Indonesia: A Phenomenological Study. Kampanye Inovasi Pelayanan Publik Dalam Merespon New Normal di Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Destinasi Wisata Kota Kendari, Pelatihan Sadar Wisata Berbasis Gerakan 5M Protokol Kesehatan Covid 19 Bagi Kelompok Pedagang Kuliner di

Wilayah Pesisir Kelurahan Watu Watu. Adapun buku yang ditulis bersama kawan-kawan adalah (1) Konflik Sosial Dan Resolusinya Sebuah Perspektif Sosiologi, Zahir Publishing, Anggota IKAPI, Sleman, Yogyakarta (2023); (2) Selayang Pandang Dunia Perdesaan, Zahir Publishing, Anggota IKAPI, Sleman, Yogyakarta (2023) dan (2).

Ratna Supiyah. Adalah staf pengajar sosiologi dan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari. Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 14 April 1965 dan juga menamatkan pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA di Jakarta. Seterusnya penulis menempuh pendidikan Strata 1 pada program studi Sosiologi Universitas Halu Oleo sampai sukses memperoleh predikat sarjana dengan gelar (Dra) pada tahun 1990. Kemudian begitu berhasil meraih sarjana, maka saat itu juga penulis diterima sebagai CPNS pada universitas Halu Oleo. Namun hanya beberapa tahun kemudian terus melanjutkan pendidikan magister tahun 1999 di Universitas Hasanuddin- Makassar pada prodi Sosiologi dan memperoleh gelar M.Si. Menulis buku bersama kawan-kawan yang berjudul: Urgensi Corporate Social Responsibility: Perspektif Kesejahteraan Sosial, Zahir Publishing, Anggota IKAPI, Sleman, Yogyakarta (2024).